

*Laporan Akhir*



PENGOLAHAN DAN ANALISIS  
HASIL PENILAIAN EVALUASI  
KINERJA KECAMATAN  
SE-JAWA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2005

KERJASAMA

BIRO DESENTRALISASI PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT

DENGAN

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

*Laporan Akhir*



PENGOLAHAN DAN ANALISIS  
HASIL PENILAIAN EVALUASI  
KINERJA KECAMATAN  
SE-JAWA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2005

KERJASAMA

BIRO DESENTRALISASI PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT

DENGAN

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA



# DAFTAR ISI

## HALAMAN

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi masalah .....	7
C. Maksud dan Tujuan .....	8
D. Output Kegiatan .....	8
E. Ruang Lingkup Kegiatan .....	9
 <b>BAB II PENETAPAN STANDAR KINERJA DAN EVALUASI KINERJA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI KECAMATAN .....</b>	 <b>12</b>
A. Peningkatan Peran Kecamatan .....	12
B. Pentingnya Standar Kinerja dan Evaluasi Kinerja Dalam Peningkatan Kapasitas Organisasi Kecamatan .....	14
C. Penetapan Indikator, Kriteria Penilaian, dan Instrumen Pengukuran, Sebagai Langkah Awal Penyusunan Standar dan Evaluasi .....	19
D. Keterkaitan Berbagai Unsur dalam Proses Evaluasi Kinerja Kecamatan .....	21
 <b>BAB III KRITERIA PENILAIAN KINERJA KECAMATAN .....</b>	 <b>24</b>
A. Pengertian Kriteria Penilaian .....	24
B. Kriteria Penilaian Per Indikator Operasional .....	26
1. Aspek Administratif .....	26
2. Aspek Pelayanan .....	40
3. Aspek Outcomes (Indikator Makro Pembangunan) .....	46

<b>BAB IV</b>	<b>METODE EVALUASI</b>	
A.	Konstruksi Indeks Kinerja Kecamatan.....	50
B.	Formula Penilaian .....	52
C.	Tahapan Penentuan Indeks Kinerja .....	56
<b>BAB V</b>	<b>HASIL PENILAIAN KINERJA KECAMATAN</b>	
A.	Indeks Kinerja Administratif (IKA) .....	58
1.	Wilayah Bogor .....	58
2.	Wilayah Cirebon .....	61
3.	Wilayah Purwakarta .....	64
4.	Wilayah Priangan .....	66
B.	Indeks Kinerja Pelayanan (IKP) .....	
1.	Wilayah Bogor .....	71
2.	Wilayah Cirebon .....	75
3.	Wilayah Purwakarta .....	78
4.	Wilayah Priangan .....	80
C.	Indeks Kinerja Indikator Makro Pembangunan (IKMP)...	85
1.	Wilayah Bogor .....	85
2.	Wilayah Cirebon .....	88
3.	Wilayah Purwakarta .....	91
4.	Wilayah Priangan.....	93
C.	Indeks Kinerja Kecamatan (IKK)	
1.	Wilayah Bogor .....	99
2.	Wilayah Cirebon.....	102
3.	Wilayah Purwakarta .....	105
4.	Wilayah Priangan .....	107
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b> .....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		116



## DAFTAR GAMBAR

halaman

Gambar 2.1 Hubungan Evaluasi Kinerja Dengan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kecamatan .....	19
Gambar 2.2. Keterkaitan Berbagai Unsur dalam Proses Evaluasi Kinerja Kecamatan .....	21
Gambar 4.1. Konstruksi Penetapan Capaian Kinerja Kecamatan .....	50

## DAFTAR TABEL

### HALAMAN

Tabel 3.1.	Kriteria Penilaian Per Indikator Pada Aspek Administratif .....	26
Tabel 3.2 .	Kriteria Penilaian Per Indikator pada Aspek Pelayanan Kategori Pelayanan Yang Dilakukan Kecamatan .....	40
Tabel 3.3.	Kriteria Penilaian Per Indikator pada Aspek Pelayanan Kategori Pelayanan dasar di Kecamatan.....	45
Tabel 3.4	Kriteria Penilaian Per Indikator pada Aspek utcomes (Indikator Makro Pembangunan .....	47



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada Tahun 1999 Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang Pemerintahan Daerah yang dikemas dalam UU Nomor 22 Tahun 1999. Kebijakan tersebut dinilai sangat bertolak belakang dengan kebijakan sebelumnya yang mengatur hal yang sama yaitu UU Nomor 5 Tahun 1974. Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 Daerah diberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sangat luas. Implikasi dari kebijakan tersebut, berbagai tatanan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah pun mengalami perubahan.

Seiring dengan perkembangan paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang menuju kepada iklim yang lebih demokratis, serta karena berbagai kelemahan yang ada dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, maka pada Tahun 2004, Pemerintah mengganti UU tersebut dengan UU Nomor 32 Tahun 2004. Dinatara kelemahan yang ada dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 adalah pemberian kewenangan yang dinilai terlalu luas kepada Daerah Kabupaten/Kota, sehingga peran Pusat dan Propinsi di Kabupaten/Kota menjadi sangat minim. Sementara itu, UU Nomor 32 Tahun 2004 mencoba mengakomodasi iklim demokratisasi yang lebih luas dan mengurangi kelemahan hubungan hirarkikal antara berbagai tingkatan pemerintahan tersebut.

Baik UU Nomor 22 Tahun 1999 ataupun UU Nomor 32 Tahun 2004, dimaksudkan agar dapat mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya, meningkatkan pemberdayaan dan

partisipasi masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pemerintah daerah berusaha meningkatkan kapasitasnya dengan memperkuat fungsi dan peranannya serta meningkatkan aparatur pemerintah yang bersih, profesional, dan bertanggungjawab (*good governance*). Usaha tersebut diharapkan pula dapat mendorong proses demokratisasi dan kemandirian daerah, sehingga terwujud cita-cita masyarakat madani (*civil society*).

Penerapan kebijakan Otonomi Daerah tersebut memberikan peluang pada daerah kabupaten dan kota untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam manajemen pemerintahannya. Salah satu Perubahan yang diusung oleh UU Nomor 22 Tahun 1999 adalah perubahan status atau kedudukan Kecamatan, Kecamatan bukan lagi sebagai instansi vertikal dan pemerintahan wilayah yang melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi dari Pemerintah Pusat. Tetapi Kecamatan menjadi Aparat Daerah yang menjalankan kewenangan-kewenangan dari Daerah Kabupaten / Kota sebagai Daerah otonom seperti yang tertera dalam Pasal 66 ayat 1 bahwa "Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan". Namun demikian Kecamatan akan tetap menyandang titel sebagai Instansi vertikal namun bukan instansi vertikal Pemerintah Pusat tetapi instansi vertikal dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Kecamatan diposisikan sebagai aparat dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian tugas-tugas yang merupakan tugas sebagai Daerah Otonom Kabupaten/Kota. Konsekuensi logisnya sebagai Aparat Daerah sehingga Pemerintah Kecamatan juga harus melaksanakan tugas-tugas yang telah didelegasikan Bupati atau pun Walikota, hal ini dinyatakan dalam Pasal 66 Ayat 4 : "*Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota*". Konsepsinya Pemerintah Kecamatan adalah melaksanakan tugas-tugas



dan fungsi *dekonsentrasi* atau menerima delegasi sebagian kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Adanya perubahan kedudukan Kecamatan tersebut, sehingga diposisikan sebagai ujung tombak pemerintah kabupaten atau kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengadakan pembangunan di daerah. Dimilikinya status baru ini merubah peran dan fungsi pemerintah kecamatan sebelumnya. Peran dan fungsi Pemerintahan mengalami reposisi ulang lebih menekankan pada aspek-aspek strategis pemerintahan yang adaptif dengan tingkat perkembangan dan peradaban dari suatu masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi, peran dan tugas baru yang harus diemban oleh Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kecamatan perlu mengadakan perubahan-perubahan dalam berbagai sektor atau bidang. Perubahan-perubahan yang harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor baik internal maupun eksternal, untuk itu pemerintah kecamatan perlu di reform untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya. Perubahan yang perlu dilakukan dalam Pemerintahan Kecamatan meliputi:

1. Kewenangan yang dilimpahkan ke Kecamatan didasarkan pada karakteristik dan potensi yang ada.
2. Kelembagaan Pemerintahan Kecamatan yang dapat menjalankan fungsi, tugas dan kewenangan yang dimiliki kecamatan.
3. Jenis layanan yang sebaiknya digeser ke Pemerintah Kecamatan supaya lebih efektif dan efisien.

Reformasi yang menyangkut pemerintahan kecamatan dibutuhkan mengingat masih adanya beberapa kendala atau fenomena-fenomena di daerah sebagai berikut:

- a. Kewenangan dan Kelembagaan Pemerintah Kecamatan masih bersifat homogen atau seragam sedangkan potensi dan karakteristik Kecamatan satu dengan yang lain beragam.
- b. Masih adanya keraguan dan keengganan untuk mendelegasikan kewenangan ke Pemerintahan Kecamatan karena akan mengurangi kewenangan Perangkat Daerah yang lain (Dinas, Lembaga teknis daerah dan Sekretariat Daerah).
- c. Masih minimnya jenis pelayanan yang didelegasikan ke Kecamatan padahal Kecamatan dengan Pemerintahan Kelurahan merupakan ujung tombak terdepan dalam berhadapan dengan masyarakat.

Pasal 126 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah menetapkan bahwa:

1. Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
3. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
  - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;



- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - f. Membina penyelenggaraan pemerintah desa dan atau kelurahan;
  - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
4. Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  5. Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah kabupaten/kota.
  6. Perangkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada camat.
  7. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan peraturan bupati atau walikota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah disebutkan bahwa Kecamatan terdiri dari satu Sekretariat, sebanyak-banyaknya lima Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional. Unit Pelaksana teknis Dinas Daerah Kabupaten/Kota secara operasional dikoordinasikan oleh Camat, mengingat camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota tertinggi di wilayah kecamatan serta untuk menghindari terjadinya duplikasi pelaksanaan tugas dan fungsi. Dalam pasal 12 disebutkan bahwa:

- a. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Pertanggungjawaban camat kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Camat berada langsung di bawah Bupati/Walikota.
- b. Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dari PNS yang memenuhi syarat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 12 PP No. 8 Tahun 2003 tersebut telah diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan. Dalam pasal 2 ayat (2) Kepmendagri tersebut disebutkan bahwa camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 158 Tahun 2004 tersebut, ditetapkan bahwa camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pelimpahan kewenangan pemerintah dimaksud berpedoman pada lampiran I tentang Pedoman Rincian Sebagian Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota kepada camat, yaitu meliputi Bidang Pemerintahan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat dan Bidang Pertanahan.



## **B. Identifikasi masalah**

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, kecamatan bukan lagi merupakan wilayah administrasi pemerintahan melainkan sebagai lingkungan kerja, sehingga camat bukan lagi sebagai kepala wilayah administrasi, melainkan sebagai perangkat daerah. Perangkat Daerah berdasarkan PP No. 8 Tahun 2003 terdiri dari Unsur Pembantu Pimpinan (Setda), Unsur Pelaksana (Dinas Daerah) dan Unsur Auxiliary (Lemtekda), kecamatan tidak disebutkan secara eksplisit. Tetapi dilihat dari karakteristiknya memberikan pelayanan langsung di suatu wilayah kerja tertentu. Dengan demikian kecamatan merupakan unsur lini kewilayahan.

Adanya perubahan kewenangan camat yang tadinya bersifat atributif (berdasarkan UU No. 5 Tahun 1974) menjadi bersifat delegatif yaitu menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati/Walikota dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala antara lain belum adanya kesamaan persepsi dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan dan penataan kecamatan, khususnya mengenai pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat, sebagai akibat belum adanya pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan selain itu dalam pelaksanaannya belum didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta dukungan personil, pembiayaan dan perlengkapan (3P) dalam pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati/Walikota yang telah dilimpahkan kepada kecamatan.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Kegiatan pengolahan dan analisis dimaksud adalah untuk mengidentifikasi kinerja pelaksanaan pembangunan di kecamatan dalam aspek administratif (Kelembagaan, Kewenangan, Perlengkapan, Pembiayaan, Personil dan Dokumentasi), outputs (pelayanan) dan outcomes (beberapa indikator makro pembangunan) sebagai upaya Pemerintah Propinsi dalam melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di daerah kabupaten/kota khususnya di kawasan kecaatan.

Adapun tujuan yang diharapkan tercapai, yaitu:

- Tersedianya bahan dalam mengukur dan menilai keberhasilan pembangunan di kecamatan dan memberikan gambaran nyata tentang kondisi dan permasalahan serta dapat mengetahui dengan jelas tentang kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan untuk mengembangkan potensinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Tersedianya bahan fasilitasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai instrumen dalam mendorong kompetisi dalam meningkatkan kinerja pembangunan antar kecamatan dan antar kabupaten/kota.

### **D. Output Kegiatan**

Output dari kegiatan ini adalah indeks kinerja kecamatan yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kecamatan di lihat dari dimensi administratif, pelayanan dan kinerja indikator makro pembangunan.



Disamping itu output kegiatan ini juga dilengkapi dengan analisis deskriptif indeks kinerja kecamatan dan kategorisasi kecamatan berdasarkan indeks tersebut.

#### **E. Ruang Lingkup Kegiatan**

Kegiatan Pengolahan dan Analisis hasil penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Data Umum, meliputi:
  1. Jumlah penduduk kecamatan 3 tahun terakhir, luas wilayah Kecamatan, Jumlah Desa, Kelurahan, RT, RW.
  2. Mata pencaharian penduduk (dalam %).
2. Aspek Administratif, meliputi:
  - a. Kewenangan, yaitu mengenai jumlah, jenis dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan dan cara pelaksanaannya serta pembiayaannya dll.
  - b. Kelembagaan, yaitu berkaitan dengan jabatan struktural dan kelembagaan lain yang ada di kecamatan.
  - c. Kepegawaian, yaitu anggaran jumlah pegawai kecamatan dan pendidikannya, jumlah PNS yang dibutuhkan dan upaya kesejahteraannya.
  - d. Pendanaan, yaitu anggaran yang dikelollla langsung oleh kecamatan (Belanja Publik dan Belanja Aparatur) dan dana-dana lain baik swadaya masyarakat maupun dana lainnya (program pembantuan).
  - e. Perlengkapan, yaitu sarana dan prasarana yang dimiliki kecamatan dan instansi teknis lainnya yang ada di kecamatan, Sistem Administrasi, Kearsipan, tata naskah dan dokumentasi

termasuk pemanfaatan teknologi komputer dan publikasi/sosialisasi kebijakan dan program di Kecamatan.

3. Aspek Pelayanan, yaitu pelayanan yang dilakukan Kecamatan, meliputi jumlah dan jenis layanan langsung yang diberikan Kecamatan, pelayanan pembuatan KTP per Tahun, produk hukum/keputusan Camat yang bersifat mengatur masyarakat dan layanan instansi teknis lain yang ada di Kecamatan serta bentuk-bentuk fasilitasi, pembinaan dan pengawasan Kecamatan kepada instansi/organisasi/perusahaan dan Desa/Kelurahan termasuk pelaksanaan rapat koordinasi.
4. Pelayanan Dasar, meliputi;
  - a. Bidang pendidikan (jumlah SD/SLTP/SLTA, anak usia SD, Guru SD/SLTP/SLTA)
  - b. Bidang kesehatan (jumlah Puskesmas, Poliklinik, Rumah Sakit, Dokter dan tenaga kesehatan lainnya serta penduduk yang memiliki Kartu Sehat)
  - c. Sarana dan prasarana umum (telepon, listrik, jalan aspal, kantor pos)
  - d. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang diberikan Kabupaten/Kota
  - e. Sistem pengelolaan kebersihan lingkungan
  - f. Pengelolaan sumber daya produktif
5. Aspek Indikator Makro Pembangunan, meliputi:
  - a. Bidang Ekonomi, yaitu total pendapatan masyarakat di Kecamatan per tahun, nilai pendapatan rata-rata masyarakat per tahun, jumlah penduduk miskin, desa tertinggal, jumlah usia kerja, jumlah pengangguran.
  - b. Bidang Pendidikan (jumlah usia sekolah dasar, murid dan jumlah yang lulus SD/SLTP/SLTA tahun terakhir dll).

- c. Bidang Kesehatan (jumlah bayi yang lahir/meninggal dan rata-rata usia penduduk).
- d. Bidang Politik (jumlah hak pilih, yang ikut memilih dan jumlah Dewan Pimpinan Parpol yang ada di Kecamatan).
- e. Bidang Pemerintahan (Partisipasi Pembangunan), meliputi nilai, jenis dan potensi pajak daerah dan PBB.
- f. Bidang Budaya dan lainnya (jumlah lembaga kemasyarakatan, kesenian dan budaya daerah dll).

Pekerjaan Pengolahan dan Analisis Hasil Penilaian Kinerja Kecamatan dimaksud yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan dan perumusan konsepsi model pemberdayaan Kecamatan di Jawa Barat;
2. Pengelompokkan dan pengklasifikasian Kecamatan;
3. Pengolahan hasil penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan se Jawa Barat;
4. Analisis Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan di Jawa Barat.
5. Penyajian/presentasi hasil Pengolahan dan Analisis Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan;
6. Penyempurnaan hasil Pengolahan dan Analisis Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan sesuai masukan dan tanggapan yang disampaikan;
7. Penyusunan Laporan pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.



## **BAB II**

# **PENETAPAN STANDAR KINERJA DAN EVALUASI KINERJA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI KECAMATAN**

### **A. Peningkatan Peran Kecamatan**

Penerapan kebijakan desentralisasi yang didasari oleh UU Nomor 32 Tahun 2003 sebagai pengganti UU Nomor 22 Tahun 1999, memberikan peluang pada daerah kabupaten dan kota untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam manajemen pemerintahannya. Salah satu Perubahan yang diusung oleh UU ini adalah perubahan Status atau kedudukan Kecamatan, Kecamatan bukan lagi sebagai instansi vertikal dan pemerintahan wilayah yang melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi dari Pemerintah Pusat, sebagaimana dalam UU Nomor 5 Tahun 1974, tetapi Kecamatan menjadi Aparat Daerah yang menjalankan kewenangan-kewenangan dari Daerah Kabupaten / Kota.

Perubahan kedudukan kecamatan sebagaimana disebutkan, tidak terlepas dari amanat UU 32 Tahun 2003 dan kecenderungan paradigma pemerintahan yang berpandangan bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang semakin dekat dengan masyarakat. Karena itu, Tugas dan fungsi kecamatan menurut paradigma ini, dan pada masa yang akan datang akan lebih berperan dalam melaksanakan pemerintahan maupun pembangunan daerah.

Pemerintah Kecamatan diposisikan sebagai aparat Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota untuk melaksanakan sebagian tugas-tugas Daerah Otonom Kabupaten/Kota. Konsekuensi logisnya, sebagai Aparat Daerah maka Pemerintah Kecamatan juga harus melaksanakan tugas-

tugas yang telah didelegasikan Bupati atau pun Walikota pada tingkat yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Dengan demikian, kedudukan Kecamatan adalah sebagai ujung tombak pemerintah kabupaten atau kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengadakan pembangunan di daerah. Dimilikinya status baru ini merubah peran dan fungsi pemerintah kecamatan sebelumnya.

Dengan adanya perubahan ini, maka tugas kecamatan di masa yang akan datang akan mengalami perluasan, yaitu tidak hanya pada tugas-tugas administratif yaitu pemerintahan umum dan pembinaan masyarakat, tapi juga termasuk tugas-tugas substantif, yang menyangkut pelayanan umum dan pembangunan daerah.

Dalam menjalankan fungsi, peran dan tugas baru yang harus diemban, Pemerintah Kecamatan perlu mengadakan perubahan-perubahan dalam berbagai sektor atau bidang. Perubahan-perubahan tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Perubahan yang perlu dilakukan dalam Pemerintahan Kecamatan antara lain berkaitan dengan: (1) Kewenangan yang dilimpahkan ke Kecamatan harus didasarkan pada karakteristik dan potensi yang ada; (2) Kelembagaan Pemerintahan Kecamatan harus dapat menjalankan fungsi, tugas dan kewenangan yang dimiliki kecamatan; (3) Beberapa jenis layanan yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (Dinas, Badan, Lembaga) sebaiknya digeser ke Pemerintah Kecamatan supaya lebih efektif dan efisien.

Upaya-upaya pembenahan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, karena kecamatan dinilai sebagai ujung tombak penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan di Daerah.



Terjadi interaksi antara formulaasi dengan implementasi kebijakan dan pelaksanaan program serta ketetapan atau keputusan dan evaluasi tentang kualitas program. Kebijakan diformulasikan untuk memandu dan

meningkatkan kualitas serta kebijakan program. Disamping itu, evaluasi dapat dimanfaatkan untuk menilai dan kebijakan penataan ulang personil dan sumber daya yang dimiliki. penajaman struktur program dan aktivitas serta memberi sinyal akan mengarahkan alokasi sumber dana, memfasilitasi modifikasi dan kebijakan, evaluasi dapat membantu menata seperangkat prioritas, depan. Dengan menyediakan informasi yang relevan untuk pembuatan kelemahan yang ada, efektivitas biaya dan arah produktif potensial masa tentang bagaimana kualitas operasional program, layanan, kekuatan dan hasilnya dengan tajam, kegiatan evaluasi dapat memberi gambaran Dengan menyusun, mendesain evaluasi yang baik dan menganalisis penting dalam memandu pembuatan kebijakan di seluruh strata organisasi. meningkatkan kualitas operasional suatu kebijakan dan berkontribusi Pada hakekatnya evaluasi diyakini sangat berperan dalam upaya

## **B. Pentingnya Standar Kinerja dan Evaluasi Kinerja Dalam Peningkatan Kapasitas Organisasi Kecamatan**

Dalam kenyataan sering kali penyelenggaraan pembangunan dan pelaksanaan pada Tingkat Kecamatan. ditetapkan standar kinerja, dan evaluasi kinerja secara objektif perlu yang signifikan bagi perbaikan kinerja kecamatan. Dalam konteks inilah, balik (*feedback*) dari hasil evaluasi tersebut tidak memberikan koreksi sehingga penilaian kinerja kecamatan menjadi tidak objektif, dan umpan penyebabnya adalah tidak adanya standar baku kinerja kecamatan, pelayanan di kecamatan masih belum optimal, salah satu faktor



Sudut pandang tersebut, dinilai telah berkorespondensi dengan pandangan tradisional tentang peran evaluasi dalam pengembangan suatu program. Dilihat dari sudut yang lain, sebagai contoh, evaluasi kualitas yang telah dibuktikan atau yang belum dibuktikan kebenarannya dapat mengantarkan kepada penilaian yang mengidentifikasi adanya kebutuhan

pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh, selanjutnya dilakukan pengambilan keputusan. Langkah berikutnya adalah menerapkan keputusan yang telah ditetapkan dengan melanjutkan atau mengubah kebijakan yang ada, mengeliminasi, meluaskan atau memodifikasi operasi

integratif.

lain. Dengan demikian akan diperoleh keputusan tentang nilai kualitas dan standar yang diterapkan serta luasnya rentang nilai faktor-faktor yang kinerja dan besarnya yang disepakati, tujuan atau obyektif yang jelas programnya. Untuk itu diperlukan model evaluasi yang tepat, indikator keputusan tentang sebaik apa kualitas kebijakan dan pelaksanaan penilaian, dari serangkaian proses, evaluasi dilakukan pengambilan total kualitas pelaksanaan program dan dampaknya. Setelah melalui fase masing-masing pola tersebut hanya mampu menetapkan sebagian dari bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Meskipun harus diakui pula bahwa kualitas program dinilai. Hal ini dapat dilakukan baik melalui proses yang (atau kualitas operasional organisasi). Melalui proses evaluasi adalah suatu selanjutnya dikombinasikan untuk menghasilkan kualitas aktual program kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan dan pelaksanaan program pelaksanaan program bukanlah suatu certiminan akurat dari suatu pedoman dan berkorelasi erat dengan kemampuan adaptasi individual, maka operasionalisasi program merupakan sasaran interpretasi suatu kebijakan, menetapkan arah pelaksanaan program. Akan tetapi, karena

penilaian dalam hal ini adalah untuk memenuhi kebutuhan suatu evaluasi. Oleh karena itu, intervensi baru -- yang dapat berupa kebijakan, strategi, dan lain-lain-- seyogyanya dinilai dan dievaluasi setelah diimplementasikan serta menjadi subyek atau acuan untuk dilanjutkan atau dimodifikasinya suatu aksi.

Dalam konteks ini, pelaksanaan evaluasi kinerja kecamatan diperlukan agar kinerja pelayanan terhadap masyarakat makin meningkat dan kualitas kehidupan masyarakat yang dicerminkan oleh indikator-indikator makro pembangunan sebagai outcome makin membaik. Dengan kata lain, jika evaluasi tidak dilakukan, atau evaluasi dilakukan dengan cara yang tidak objektif maka mustahil terjadi perbaikan kinerja kecamatan di masa yang akan datang.

Salah satu faktor penentu keberhasilan evaluasi kinerja adalah adanya standar kinerja yang memadai. Standar kinerja merupakan patokan dalam melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja suatu organisasi. Sedangkan pengukuran dan evaluasi kinerja merupakan suatu bagian dari proses manajemen yang ditujukan untuk melihat sampai sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan dan dimana letak kekurangan yang terjadi. Tanpa standar kinerja, tidak mungkin suatu pengukuran dan evaluasi dapat dilakukan dengan objektif. Sebagaimana dikatakan oleh Berry, Zeithaml dan Parasuraman (Lovelock, 1992; 225) bahwa yang menjadi potensi terjadinya kegagalan peningkatan pelayanan publik antara lain: *No service standard; Too Many service Standard, General Service standard; Poorly communicated service standard; Service Standard unconnected to the performance measurement.*



tersebut nampak bahwa standar merupakan faktor kunci untuk menentukan keberhasilan peningkatan kinerja suatu organisasi. Dengan demikian, evaluasi kinerja kecamatan merupakan langkah yang dilakukan setelah terlebih dahulu dilaksanakan pengukuran terhadap kinerja pembangunan di Kecamatan. Pengukuran (proses mengukur) adalah membandingkan kondisi riil dengan alat ukur. Alat ukur tidak lain dari standar kinerja. Dengan demikian, sebelum dilakukan penilaian, maka perlu terlebih dahulu dilakukan pengukuran, dan sebelum dilakukan pengukuran perlu terlebih dahulu dibuat standar.

Unit analisis dari evaluasi ini adalah Kecamatan. Dengan demikian, evaluasi kinerja kecamatan berarti mengukur kinerja pembangunan yang dilakukan oleh berbagai pihak di kecamatan, bukan pembangunan yang dilakukan oleh kecamatan saja. Implikasi dari hal ini, peran Daerah Kabupaten/Kota, Propinsi, dan Pusat tetap menjadi objek evaluasi. Hal ini perlu dilakukan atas dasar pertimbangan, bahwa kecamatan bukan merupakan daerah otonom melainkan perangkat daerah yang kewenangannya tergantung kepada pendelegasian dari Pemerintah Kabupaten/Kota, bahkan untuk saat ini, di daerah-daerah tertentu kewenangan Kecamatan hanya bersifat fasilitatif dan koordinatif, sedangkan yang melaksanakannya adalah instansi teknis daerah.

Dalam kaitan ini, penetapan standar kinerja kecamatan bermanfaat dalam rangka:

1. Mengidentifikasi kinerja pelaksanaan pembangunan di Kecamatan dalam aspek administratif (Kelembagaan, Kewenangan, Perlengkapan, Pembiayaan, Personil dan Dokumentasi), outputs (pelayanan), dan outcomes (beberapa indikator makro pembangunan).



2. Upaya Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di Daerahnya (dalam hal ini yang menjadi lokus pembangunan sebenarnya adalah Kecamatan).
3. Sebagai bahan referensi bagi Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan yang berkelanjutan dan terstruktur terhadap Kecamatan, sehingga Daerah Kabupaten maupun Kota mampu mengaktualisasikan secara cermat aturan-aturan yang diimplementasikan secara simultan dan berkelanjutan di Kecamatan.
4. Secara konsisten Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memperbaiki kinerja pembangunan di kecamatan yang didasarkan kepada kinerja administrative (input), pelayanan (output), dan kinerja indicator makro pembangunan (outcomes).
5. Sebagai bahan bagi Daerah Kabupaten/Kota dalam mengukur dan menilai keberhasilan pembangunannya di Kecamatan
6. Untuk memberikan gambaran nyata tentang kondisi dan permasalahan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan
7. Untuk mengetahui dengan jelas tentang kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan untuk mengembangkan potensinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8. Untuk dijadikan pendorong dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
9. Sebagai instrument dalam mendorong kompetisi dalam meningkatkan kinerja pembangunan antar kecamatan.

## Hubungan Evaluasi Kinerja Dengan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kecamatan



### C. Penetapan Indikator, Kriteria Penilaian, dan Instrumen Pengukuran, Sebagai Langkah Awal Penyusunan Standar dan Evaluasi

Penetapan standar tidak mungkin dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja Kecamatan. Indikator adalah hal-hal yang menjadi objek pengukuran dan evaluasi dari setiap aspek kinerja kecamatan yang meliputi aspek administratif atau input (kewenangan, kelembagaan, personil, pembiayaan, perlengkapan, serta dokumentasi dan kearsipan), aspek outputs (pelayanan), dan aspek outcomes (indikator makro pembangunan). Dalam hal ini, setiap aspek kinerja pembangunan kecamatan harus ditetapkan indikatornya.

Setelah indikator ditemukan, perlu ditetapkan kriteria penilaian (evaluasi). Kriteria menunjukkan kualifikasi yang dimiliki oleh suatu indikator untuk dimasukkan ke dalam suatu kategori atau klasifikasi tertentu. Dengan demikian, kriteria bersifat gradasi, ketika semakin jauh

dari standar yang ditentukan. Dengan demikian, tanpa adanya standar, maka penetapan kriteria pun menjadi tidak jelas. Disinilah sekali lagi letak pentingnya standar kinerja Kecamatan.

Setelah indikator dan standar ditetapkan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan sebelum evaluasi adalah penggalian data dan informasi. Data dan informasi hanya dapat digali dengan instrumen yang dapat dipercaya. Dengan kata lain, instrumen adalah alat yang digunakan untuk menggali data dan informasi berkaitan dengan setiap indikator kinerja Kecamatan. Data untuk setiap indikator sangat mungkin diterjemahkan ke dalam lebih dari satu instrumen. Baru setelah instrumen dibuat, penggalian data dilakukan, lalu pengukuran dilakukan, dan pada akhirnya dilaksanakan evaluasi kinerja.

Pengukuran dan penilaian kinerja terhadap aspek administratif diorientasikan kepada pencapaian efisiensi, karena pada hakekatnya pengukuran dan penilaian terhadap aspek administratif tidak lain dari pengukuran dan penilaian terhadap *inputs*. Dengan demikian, makin efisien penggunaan input (dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan) maka makin baik kinerja kecamatan yang dicapai.

Pengukuran dan penilaian terhadap aspek pelayanan diorientasikan kepada optimalisasi kinerja pelayan, karena pada hakekatnya pengukuran terhadap aspek pelayanan tidak lain dari pengukuran dan penilaian terhadap *outputs*. Dengan demikian, makin besar outputs atau potensi outputs, maka dianggap makin baik kinerja kecamatan.

Pengukuran dan penilaian terhadap indikator makro pembangunan, juga diorientasikan kepada optimalisasi kinerja, karena pada hakekatnya pengukuran terhadap indikator makro pembangunan tidak lain dari pengukuran dan penilaian terhadap *outcomes*. Dengan demikian, makin

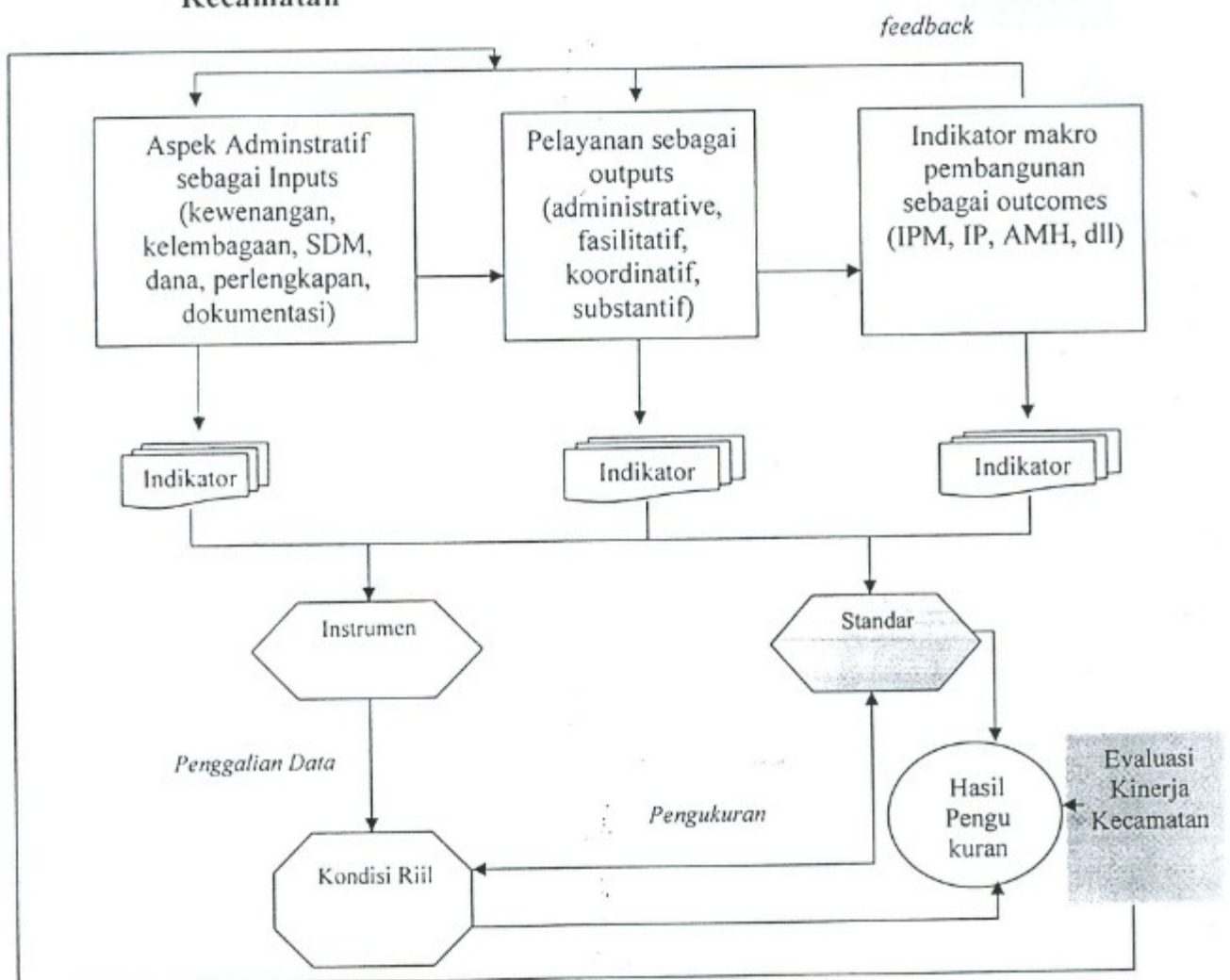


tinggi atau makin optimal outcomes atau potensi outcomes, maka dianggap makin baik kinerja kecamatan.

#### D. Keterkaitan Berbagai Unsur dalam Proses Evaluasi Kinerja Kecamatan

Sebagaimana diuraikan di atas, terdapat berbagai hal yang terkait dengan proses evaluasi kinerja kecamatan dalam upaya peningkatan kapasitas organisasi Kecamatan. Berikut ini, digambarkan keterkaitan berbagai unsur yang terkait dengan proses evaluasi kinerja kecamatan, serta melihat posisi penting standar kinerja dalam rangkaian proses evaluasi tersebut.

**Gambar 2.2:**  
**Keterkaitan Berbagai Unsur Dalam Proses Evaluasi Kinerja Kecamatan**



Gambar di atas dapat dijelaskan bahwa dalam proses evaluasi kinerja kecamatan, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Evaluasi dilakukan terhadap 3 aspek penting, yang meliputi aspek *inputs* (sumber daya), aspek *outputs* (kinerja pelayanan), dan aspek *outcomes* (indikator makro pembangunan).
2. Penetapan indikator yang akan diukur dan dievaluasi untuk setiap aspek. Aspek *inputs* meliputi kelompok indikator kewenangan, kelembagaan, SDM, pendanaan, perlengkapan, dan dokumentasi. Aspek *outputs* meliputi pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan dan oleh instansi teknis yang ada di Kecamatan berupa pelayanan administratif, fasilitatif, koordinatif, dan substantif. Sedangkan penilaian terhadap aspek *outcomes* meliputi antara lain indikator bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan indikator lainnya.
3. Menetapkan standar kinerja. Karena sasaran evaluasi ditujukan kepada 3 aspek dengan berbagai indikatornya, maka standar kinerja kecamatan perlu ditetapkan berkaitan dengan ketiga aspek dengan indikator-indikatornya tersebut.
4. Pembuatan instrumen penggali data dan informasi. Instrumen ini diperlukan untuk menjaring data dan informasi berkaitan dengan semua indikator yang ada pada ketiga aspek yang telah ditetapkan tersebut;
5. Jika instrumen telah dibuat, baru dapat dikakukan proses penggalan data dan informasi.
6. Dan setelah data dan informasi berkaitan dengan kondisi riil dari ketiga aspek beserta indikatornya tersebut terkumpul, baru dapat

dilakukan pengukuran kinerja, yaitu dengan cara membandingkan antara kondisi riil dengan standar yang telah ditetapkan.

7. Terakhir baru berdasarkan hasil pengukuran tersebut dilakukan evaluasi untuk melihat apakah kinerja kecamatan sudah baik atau masih kurang. Hasil evaluasi merupakan *feedback* bagi perbaikan kinerja kecamatan di masa yang akan datang. Dari sini nampak bagaimana letak pentingnya evaluasi kinerja sebagai upaya peningkatan kapasitas organisasi kecamatan.



## **BAB III**

### **KRITERIA PENILAIAN KINERJA KECAMATAN**

#### **A. Pengertian Kriteria Penilaian**

Evaluasi kinerja kecamatan merupakan langkah yang dilakukan setelah terlebih dahulu dilaksanakan pengukuran terhadap kinerja pembangunan di Kecamatan. Pengukuran (proses mengukur) adalah membandingkan kondisi riil dengan alat ukur. Alat ukur tidak lain dari standar pengukuran. Dengan demikian, sebelum dilakukan penilaian, maka perlu terlebih dahulu dilakukan pengukuran, dan sebelum dilakukan pengukuran perlu terlebih dahulu dibuat standar pengukuran. Dan sebelum dilakukan pengukuran perlu dibuat instrument untuk melakukan pengukuran.

Unit analisis dari evaluasi ini adalah Kecamatan. Dengan demikian, evaluasi kinerja kecamatan berarti mengukur kinerja pembangunan yang dilakukan oleh berbagai pihak di kecamatan, bukan pembangunan yang dilakukan oleh kecamatan saja. Implikasi dari hal ini, peran Daerah Kabupaten/Kota, Propinsi, dan Pusat tetap menjadi objek evaluasi, namun tidak dimunculkan secara eksplisit. Hal ini dilakukan atas dasar pertimbangan, bahwa kecamatan bukan merupakan daerah otonom melainkan perangkat daerah yang kewenangannya relative terbatas, bahkan untuk daerah-daerah tertentu hanya bersifat fasilitatif dan koordinatif, sedangkan yang melaksanakannya adalah instansi teknis daerah.

Indikator adalah hal-hal yang menjadi objek pengukuran dari setiap aspek kinerja kecamatan yang meliputi aspek administratif atau input

(kewenangan, kelembagaan, personil, pembiayaan, perlengkapan, serta dokumentasi dan kearsipan), aspek outputs (pelayanan), dan aspek outcomes (indikator makro pembangunan). Dalam hal ini, setiap aspek kinerja pembangunan kecamatan mempunyai beberapa indikator secara bervariasi, yang dianggap mewakili untuk mengukur aspek tersebut. Indikator operasional merupakan turunan dari indikator yang dapat diukur secara operasional dalam bentuk kuantitatif dalam skala rasio, interval, atau ordinal (tidak ada yang bersifat nominal).

Hasil evaluasi terhadap “kinerja kecamatan” merupakan suatu predikat yang diberikan kepada masing-masing kecamatan atas kinerjanya. Untuk memberikan predikat kepada masing-masing kecamatan tersebut, maka diperlukan “suatu nilai” yang diberikan kepada masing-masing kecamatan, sebagai patokan pemberian predikat tersebut. Penilaian baru bisa dilakukan apabila variasi nilai menunjukkan variasi kualitas. Atas dasar variasi nilai inilah ditetapkan kriteria penilaian. Jadi, *kriteria penilaian menunjukkan* kualifikasi yang dimiliki oleh suatu indikator operasional untuk dimasukkan ke dalam suatu kategori atau klasifikasi nilai tertentu. Misalnya, makin tinggi nilai suatu indikator, makin tinggi kualitas kinerja kecamatan, atau makin rendah nilai suatu indikator makin rendah kualitas kinerja kecamatan tersebut.

Selanjutnya, pengukuran dan penilaian terhadap aspek administratif diorientasikan kepada pencapaian efisiensi, karena pada hakekatnya pengukuran dan penilaian terhadap aspek administratif tidak lain dari pengukuran dan penilaian terhadap *inputs*. Dengan demikian, makin efisien penggunaan input (dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan) maka makin baik kinerja kecamatan yang dicapai.



Pengukuran dan penilaian terhadap aspek pelayanan diorientasikan kepada optimalisasi kinerja pelayan, karena pada hakekatnya pengukuran terhadap aspek pelayanan tidak lain dari pengukuran dan penilaian terhadap *outputs*. Dengan demikian, makin besar *outputs* atau potensi *outputs*, maka dianggap makin baik kinerja kecamatan.

Pengukuran dan penilaian terhadap indikator makro pembangunan, juga diorientasikan kepada optimalisasi kinerja, karena pada hakekatnya pengukuran terhadap indikator makro pembangunan tidak lain dari pengukuran dan penilaian terhadap *outcomes*. Dengan demikian, makin tinggi atau makin optimal *outcomes* atau potensi *outcomes*, maka dianggap makin baik kinerja kecamatan.

## B. Kriteria Penilaian Per Indikator Operasional

### 1. Aspek Administratif

Aspek administratif merupakan aspek pertama yang diukur dan dinilai. Ada 6 (enam) indikator yang dinilai dalam aspek ini, yaitu indikator kewenangan, kelembagaan, kepegawaian, pendanaan, perlengkapan, dan dokumentasi. Berdasarkan indikator-indikator tersebut maka ditetapkan kriteria penilaiannya sebagai berikut:

Tabel 3.1

#### Kriteria Penilaian Per Indikator pada Aspek Administratif

INDIKATOR	INDIKATOR OPERASIONAL	KRITERIA PENILAIAN
1. Kewenangan	Jumlah kewenangan total yang dilimpahkan dari kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Makin banyak jumlah kewenangan yang diterima, makin berat beban kerja kecamatan, yang berarti makin tinggi kinerja kecamatan tersebut</li> </ul>
	Jumlah kewenangan yang dapat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Makin banyak jumlah kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh</li> </ul>



INDIKATOR	INDIKATOR OPERASIONAL	KRITERIA PENILAIAN
	dilaksanakan	<i>kecamatan, makin baik</i>
	Rasio jumlah kewenangan terhadap jumlah pegawai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio ini mengindikasikan beban pekerjaan yang harus ditanggung oleh setiap pegawai kecamatan</li> <li>• Makin tinggi rasio jumlah kewenangan terhadap pegawai, makin tinggi kinerja kecamatan yang bersangkutan</li> </ul>
	Rasio jumlah kewenangan terhadap anggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggaran tahunan menunjukkan modal kerja yang dimiliki oleh kecamatan</li> <li>• Rasio ini mengindikasikan jumlah kewenangan yang harus dibiayai oleh setiap rupiah anggaran</li> <li>• Makin tinggi rasio ini berarti makin efisiensi pelaksanaan kewenangan, sehingga makin baik kinerja kecamatan</li> </ul>
	Rasio jumlah kewenangan terhadap sarpras (asset) yang dimiliki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asset dinilai dengan Rupiah dan menunjukkan modal tetap yang dimiliki kecamatan</li> <li>• Rasio ini menunjukkan jumlah kewenangan yang dapat dilaksanakan setiap satu rupiah asset yang dimiliki</li> <li>• Makin tinggi rasio ini makin efisien penggunaan asset oleh kecamatan, sehingga makin baik kinerja kecamatan tersebut</li> </ul>
	Rasio jumlah kewenangan yang tidak berduplikasi terhadap total kewenangan yang dimiliki kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator ini menunjukkan ketidakjelasan dalam pelimpahan kewenangan. Meskipun merupakan kinerja Daerah Kabupaten/Kota, namun dampaknya dirasakan oleh kecamatan, sehingga relevan untuk diukur sebagai bagian dari kinerja kecamatan (bukan kinerja camat)</li> <li>• Makin banyak kewenangan yang duplikasi dengan instansi teknis,</li> </ul>

INDIKATOR	INDIKATOR OPERASIONAL	KRITERIA PENILAIAN
		<i>makin tidak baik kinerja kecamatan. Atau makin tinggi rasio ini makin baik kinerja kecamatan</i>
	Rasio jumlah kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dan mampu untuk dilaksanakan terhadap total kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meskipun factor penyebab ketidakmampuan kecamatan dalam melaksanakan kewenangan ditentukan oleh berbagai factor yang diantaranya political will Bupati dalam melimpahkan sumber daya, namun bagaimanapun akan berdampak terhadap kinerja kecamatan (bukan camat).</li> <li>• Makin tinggi rasio ini makin baik kinerja kecamatan.</li> </ul>
	Jumlah kewenangan yang dilaksanakan dengan swadaya murni masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator ini menunjukkan kemampuan camat dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, yang diukur secara absolut</li> <li>• Semakin banyak jumlah kewenangan yang dilaksanakan secara swadaya, semakin baik kinerja kecamatan</li> </ul>
	Jumlah kewenangan yang dilaksanakan secara bekerjasama dengan swasta setempat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator ini menunjukkan kemampuan Camat dalam menggali potensi yang ada di "wilayahnya".</li> <li>• Untuk hal ini misalnya dalam perbaikan jalan lingkungan (gang), dll.</li> <li>• Makin banyak kerjasama dengan swasta, makin baik kinerja kecamatan</li> </ul>
	Jumlah kewenangan yang dilaksanakan secara bekerjasama dengan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator ini juga menunjukkan kemampuan Camat dalam menggali potensi yang ada di "wilayahnya".</li> <li>• Contoh untuk hal ini juga perbaikan jalan lingkungan (gang), dll.</li> <li>• Makin banyak kerjasama dengan masyarakat (tokoh masyarakat),</li> </ul>



INDIKATOR	INDIKATOR OPERASIONAL	KRITERIA PENILAIAN
		<i>makin baik kinerja kecamatan</i>
	Jumlah kewenangan yang dalam pelaksanaan pembiayaannya bekerjasama antara instansi teknis dengan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meskipun yang melaksanakan kegiatan bukan Camat (kecamatan), tetapi indikator ini menunjukkan kemampuan camat dalam menggerakkan partisipasi masyarakat sehingga dapat bekerjasama dengan instansi teknis dalam melaksanakan pembangunan di kecamatannya</li> <li>• Makin banyak jumlah kewenangan ini, makin baik kinerja kecamatan.</li> </ul>
2. Kelembagaan	Rasio jumlah jabatan struktural terhadap kewenangan kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pola maksimal kelembagaan kecamatan telah ditentukan oleh Kepmendagri Nomor 158 Tahun 2004 yaitu terdiri dari Camat, Sekretaris, dan 5 seksi ditambah jabatan fungsional. Namun demikian, tidak ada pola minimum, sehingga jumlah seksi boleh 3 atau 4.</li> <li>• Apabila jumlah kewenangan sama, maka makin sedikit jabatan struktural yang ada berarti makin efisien, dan makin baik kinerja kecamatan</li> </ul>
	Rasio jumlah jabatan struktural terhadap jumlah penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio ini menunjukkan kemampuan pejabat struktural dalam melayani masyarakat</li> <li>• Makin rendah rasio ini berarti makin banyak jumlah penduduk yang dapat dilayani oleh setiap pejabat struktural di kecamatan, sehingga makin baik kinerja kecamatan</li> </ul>
	Rasio jumlah jabatan struktural terhadap jumlah desa/kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio ini menunjukkan kemampuan pejabat struktural dalam melayani desa/kelurahan</li> <li>• Makin rendah rasio ini berarti makin banyak jumlah desa yang dapat dilayani oleh setiap pejabat struktural di kecamatan, sehingga makin baik kinerja kecamatan</li> </ul>



INDIKATOR	INDIKATOR OPERASIONAL	KRITERIA PENILAIAN
	Rasio jumlah jabatan struktural terhadap luas wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio ini menunjukkan kemampuan pejabat struktural dalam menjangkau pelosok-pelosok desa/kelurahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.</li> <li>• Makin rendah rasio ini berarti makin luas wilayah yang dapat dijangkau oleh setiap pejabat struktural di kecamatan, sehingga makin baik kinerja kecamatan</li> </ul>
	Rasio jumlah jabatan struktural terhadap jumlah dana yang bersumber dari swadaya masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi SDM dalam memanfaatkan dana</li> <li>• Makin tinggi rasio ini berarti makin sedikit dana rata-rata yang digunakan oleh pejabat struktural, sehingga makin efisien dan makin baik kinerja kecamatan</li> </ul>
	Jumlah kelembagaan kecamatan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio ini menunjukkan kreativitas kecamatan dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya.</li> <li>• Makin banyak kelembagaan kecamatan atau desa/kelurahan yang dimiliki dan dibiayai secara swadaya, maka makin baik kinerja kecamatan tersebut.</li> </ul>
	Keterlibatan camat dalam penyusunan kelembagaan kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika camat dilibatkan dalam penyusunan kelembagaan kecamatan, maka kinerja kecamatan baik. Sebaliknya jika tidak dilibatkan</li> </ul>
3. SDM	Rasio Jumlah Jabatan Fungsional terhadap jumlah pegawai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator ini menunjukkan komitmen kecamatan dan kabupaten/kota untuk meningkatkan profesionalisme pegawai</li> <li>• Makin banyak jumlah jabatan fungsional, makin baik kinerja kecamatan.</li> </ul>
	Rasio jumlah pegawai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator ini menunjukkan</li> </ul>

INDIKATOR	INDIKATOR OPERASIONAL	KRITERIA PENILAIAN
	terhadap jumlah penduduk	<p><i>kemampuan pegawai dalam memberikan layanan terhadap masyarakat</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Makin rendah rasio ini, makin tinggi jangkauan dan kemampuan pegawai dalam memberikan layanan terhadap masyarakat.</i></li> </ul>
	Rasio jumlah pegawai terhadap luas wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Indikator ini menunjukkan kemampuan pegawai dalam menjangkau pelosok-pelosok wilayah kecamatan</i></li> <li>• <i>Makin rendah rasio ini, makin tinggi kemampuan pegawai dalam menjangkau pelosok-pelosok kecamatan.</i></li> </ul>
	Rasio pegawai terhadap Jumlah kelurahan dan desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Indikator ini menunjukkan kemampuan pegawai dalam memberikan layanan, sosialisasi, dsb terhadap desa/kelurahan</i></li> <li>• <i>Makin rendah rasio ini, makin tinggi kemampuan pegawai dalam memberikan layanan dan sosialisasi terhadap desa/kelurahan.</i></li> </ul>
	Rasio jumlah pegawai terhadap anggaran anggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Indikator ini menunjukkan tingkat efisiensi pemanfaatan dana per pegawai.</i></li> <li>• <i>Makin tinggi rasio ini, makin efisien pemanfaatan dana yang dimiliki</i></li> </ul>
	Rasio jumlah PNS yang ada di kecamatan (bukan hanya pegawai kecamatan) terhadap jumlah PNS yang diperlukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Rasio ini menunjukkan tingkat keterpenuhan kebutuhan pegawai di kecamatan</i></li> <li>• <i>Nilai ideal adalah 100%. Kurang dari 100% berarti masih kekurangan pegawai. Sedangkan lebih dari 100% berarti kelebihan pegawai</i></li> <li>• <i>Makin jauh dari 100% (kurang atau lebih) makin tidak baik kinerja</i></li> </ul>



INDIKATOR	INDIKATOR OPERASIONAL	KRITERIA PENILAIAN
		<i>kecamatan</i>
	Rasio jumlah pegawai riil Golongan I terhadap jumlah pegawai golongan I yang dibutuhkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Rasio ini menunjukkan tingkat keterpenuhan kebutuhan pegawai golongan I di kecamatan</i></li> <li>• <i>Nilai ideal adalah 100%. Kurang dari 100% berarti masih kekurangan pegawai. Sedangkan lebih dari 100% berarti kelebihan pegawai</i></li> <li>• <i>Makin jauh dari 100% (kurang atau lebih) makin tidak baik kinerja kecamatan</i></li> </ul>
	Rasio jumlah pegawai riil Golongan II terhadap jumlah pegawai golongan II yang dibutuhkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Rasio ini menunjukkan tingkat keterpenuhan kebutuhan pegawai golongan II di kecamatan</i></li> <li>• <i>Nilai ideal adalah 100%. Kurang dari 100% berarti masih kekurangan pegawai. Sedangkan lebih dari 100% berarti kelebihan pegawai</i></li> <li>• <i>Makin jauh dari 100% (kurang atau lebih) makin tidak baik kinerja kecamatan</i></li> </ul>
	Rasio jumlah pegawai riil Golongan III terhadap jumlah pegawai golongan III yang dibutuhkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Rasio ini menunjukkan tingkat keterpenuhan kebutuhan pegawai golongan III di kecamatan</i></li> <li>• <i>Nilai ideal adalah 100%. Kurang dari 100% berarti masih kekurangan pegawai. Sedangkan lebih dari 100% berarti kelebihan pegawai</i></li> <li>• <i>Makin jauh dari 100% (kurang atau lebih) makin tidak baik kinerja kecamatan</i></li> </ul>
	Rasio jumlah pegawai riil Golongan IV terhadap jumlah pegawai golongan IV yang dibutuhkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Rasio ini menunjukkan tingkat keterpenuhan kebutuhan pegawai golongan IV di kecamatan</i></li> <li>• <i>Nilai ideal adalah 100%. Kurang dari 100% berarti masih kekurangan pegawai. Sedangkan lebih dari 100%</i></li> </ul>



INDIKATOR	INDIKATOR OPERASIONAL	KRITERIA PENILAIAN
		<p><i>berarti kelebihan pegawai</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Makin jauh dari 100% (kurang atau lebih) makin tidak baik kinerja kecamatan</i></li> </ul>
	Rasio jumlah pegawai riil berpendidikan S1 ke atas terhadap jumlah pegawai berpendidikan S1 ke atas yang dibutuhkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Rasio ini menunjukkan tingkat keterpenuhan kebutuhan pegawai S1 ke atas di kecamatan</i></li> <li>• <i>Nilai ideal adalah 100%. Kurang dari 100% berarti masih kekurangan pegawai. Sedangkan lebih dari 100% berarti kelebihan pegawai</i></li> <li>• <i>Makin jauh dari 100% (kurang atau lebih) makin tidak baik kinerja kecamatan</i></li> </ul>
	Rasio jumlah pegawai riil berpendidikan Diploma terhadap jumlah pegawai berpendidikan Diploma yang dibutuhkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Rasio ini menunjukkan tingkat keterpenuhan kebutuhan pegawai Diploma di kecamatan</i></li> <li>• <i>Nilai ideal adalah 100%. Kurang dari 100% berarti masih kekurangan pegawai. Sedangkan lebih dari 100% berarti kelebihan pegawai</i></li> <li>• <i>Makin jauh dari 100% (kurang atau lebih) makin tidak baik kinerja kecamatan</i></li> </ul>
	Rasio jumlah pegawai riil berpendidikan SLTA ke bawah terhadap jumlah pegawai berpendidikan SLTA ke bawah yang dibutuhkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Rasio ini menunjukkan tingkat keterpenuhan kebutuhan pegawai SLTA ke bawah di kecamatan</i></li> <li>• <i>Nilai ideal adalah 100%. Kurang dari 100% berarti masih kekurangan pegawai. Sedangkan lebih dari 100% berarti kelebihan pegawai</i></li> <li>• <i>Makin jauh dari 100% (kurang atau lebih) makin tidak baik kinerja kecamatan</i></li> </ul>
	Rasio jumlah pegawai Kecamatan yang sudah mengikuti Diklat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Makin tinggi rasio ini makin baik kinerja kecamatan</i></li> </ul>

INDIKATOR	INDIKATOR OPERASIONAL	KRITERIA PENILAIAN
	Struktural (Diklat Pim) terhadap seluruh pegawai kecamatan	
	Rasio jumlah pegawai kecamatan yang telah mengikuti diklat teknis dan fungsional terhadap seluruh pegawai kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Makin tinggi rasio ini makin baik kinerja kecamatan</i></li> </ul>
	Rasio jumlah pegawai PEMDA yang ada di Kecamatan yang sudah mengikuti Diklat Struktural (Diklat Pim) terhadap seluruh pegawai PEMDA di kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Makin tinggi rasio ini makin baik kinerja kecamatan</i></li> </ul>
	Rasio jumlah pegawai PEMDA yang ada di kecamatan yang telah mengikuti diklat teknis dan fungsional terhadap seluruh pegawai PEMDA di kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Makin tinggi rasio ini makin baik kinerja kecamatan</i></li> </ul>
	Lamanya pengalaman camat menduduki jabatan camat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Makin lama makin baik kinerja kecamatan</i></li> </ul>
	Banyaknya wilayah yang camat pernah melaksanakan tugas di wilayah tersebut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Makin banyak makin baik kinerja kecamatan</i></li> </ul>
	Rata-rata waktu yang diperlukan untuk kenaikan pangkat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Rasio ini menunjukkan komitmen PEMDA dalam melakukan pengembangan karier pegawai di kecamatan. Selain itu, menunjukkan komitmen Camat juga dalam mengusulkan bawahannya untuk promosi.</i></li> <li>• <i>Makin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat, makin baik</i></li> </ul>



INDIKATOR	INDIKATOR OPERASIONAL	KRITERIA PENILAIAN
		<i>kinerja kecamatan</i>
	Rata-rata waktu yang diperlukan untuk kenaikan pangkat pejabat fungsional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio ini menunjukkan komitmen PEMDA dalam melakukan pengembangan karier pegawai di kecamatan. Selain itu, menunjukkan komitmen Camat juga dalam melakukan pembinaan karier terhadap bawahannya.</li> <li>• Makin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat, makin baik kinerja kecamatan</li> </ul>
	Rasio jumlah pegawai yang tidak melakukan pelanggaran disiplin terhadap jumlah keseluruhan pegawai di kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio ini menunjukkan komitmen Camat dalam melakukan pembinaan disiplin terhadap bawahannya.</li> <li>• Makin tinggi rasio ini, makin baik kinerja kecamatan</li> </ul>
	Rasio jumlah pegawai terhadap jumlah koperasi PNS di kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio ini menunjukkan komitmen PEMDA dan Camat dalam melakukan pembinaan kesejahteraan terhadap bawahannya dan pegawai lain yang ada di kecamatan</li> <li>• Makin rendah rasio ini, makin baik kinerja kecamatan</li> </ul>
	Jumlah penerimaan lain yang legal yang dipergunakan untuk kesejahteraan pegawai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Makin besar, makin baik kinerja kecamatan.</li> <li>• Sumber penerimaan ini bisa dari kabupaten/kota, internal kecamatan, upah pungut sebagai mediator, atau lainnya.</li> </ul>
4. Pendanaan	Rasio jumlah belanja aparatur terhadap jumlah pegawai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pemanfaatan dana per kapita pegawai.</li> <li>• Makin kecil rasio ini (dengan asumsi pelayanan tetap), maka makin efisien pemanfaatan dana dan makin baik kinerja kecamatan</li> </ul>



INDIKATOR	INDIKATOR OPERASIONAL	KRITERIA PENILAIAN
	Rasio jumlah belanja publik terhadap jumlah penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio ini menunjukkan komitmen PEMDA untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.</li> <li>• Makin tinggi rasio ini berarti makin besar alokasi belanja publik perkapita, yang berarti makin tinggi komitmen PEMDA terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kinerja kecamatan dianggap makin baik.</li> </ul>
	Rasio jumlah anggaran terhadap jumlah desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio ini menunjukkan komitmen PEMDA untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat desa/kelurahan.</li> <li>• Makin tinggi rasio ini berarti makin besar alokasi belanja publik per desa/kelurahan, yang berarti makin tinggi komitmen PEMDA terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kinerja kecamatan dianggap makin baik.</li> </ul>
	Rasio jumlah anggaran terhadap luas wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio ini menunjukkan komitmen PEMDA untuk pengembangan wilayah</li> <li>• Makin tinggi rasio ini berarti makin besar alokasi belanja publik per luas wilayah. Dengan demikian, kinerja kecamatan dianggap makin baik.</li> </ul>
	Rasio Anggaran terhadap jumlah kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran</li> <li>• Makin rendah rasio ini, berarti makin sedikit anggaran yang digunakan untuk membiayai setiap jenis kewenangan yang dimiliki atau makin efisien penyelenggaraan kewenangan, sehingga makin baik kinerja</li> </ul>

INDIKATOR	INDIKATOR OPERASIONAL	KRITERIA PENILAIAN
		<i>kecamatan.</i>
	Kontribusi dana yang bersumber dari swadaya terhadap keseluruhan dana pembangunan yang diterima kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Rasio ini menunjukkan kemampuan Camat dan perangkatnya dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, sekaligus juga menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat di kecamatan yang bersangkutan.</i></li> <li>• <i>Makin tinggi rasio ini makin tinggi kemampuan camat dalam menggerakkan partisipasi, makin tinggi partisipasi masyarakat, dan makin baik kinerja kecamatan.</i></li> </ul>
	Alokasi sektoral dana APBD di kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Angka ini untuk melihat pemerataan pembangunan antar sektor dan kesesuaian dengan prioritas pembangunan kecamatan</i></li> <li>• <i>Makin merata dan makin sesuai dengan prioritas kecamatan, makin baik kinerja kecamatan.</i></li> </ul>
	Jumlah dana yang bersumber dari program pembantuan yang ada di kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Makin tinggi jumlah dana pembantuan, makin baik kinerja kecamatan.</i></li> </ul>
5. Perlengkapan (Asset) Kecamatan	Jumlah Asset Daerah dalam Rupiah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Perlengkapan yang dimiliki kecamatan dianggap sebagai Asset Tetap.</i></li> <li>• <i>Makin tinggi nilai rupiah perlengkapan yang dimiliki, berarti makin potensial kecamatan tersebut untuk berkembang, dan makin baik kinerja kecamatan.</i></li> </ul>
	Rasio Asset Daerah yang dimiliki terhadap asset daerah yang diperlukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Rasio ini menunjukkan komitmen PEMDA dalam memenuhi kebutuhan perlengkapan di kecamatan.</i></li> <li>• <i>Rasio ideal adalah 100%, artinya kondisi yang ada telah sesuai dengan kebutuhan. Makin jauh dari 100%</i></li> </ul>

INDIKATOR	INDIKATOR OPERASIONAL	KRITERIA PENILAIAN
		<i>(kurang atau lebih) makin baik kinerja kecamatan.</i>
	Rasio luas kantor kecamatan terhadap jumlah masyarakat yang harus dilayani setiap hari.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Rasio ini menunjukkan kemampuan atau kapasitas kantor kecamatan dalam menampung masyarakat yang akan dilayani</i></li> <li>• <i>Makin tinggi rasio ini makin nyaman layanan yang diterima masyarakat, sehingga makin baik kinerja kecamatan</i></li> </ul>
	Rasio luas kantor kecamatan terhadap jumlah pegawai kecamatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Rasio ini menunjukkan kemampuan atau kapasitas kantor kecamatan dalam mewadahi pegawai yang akan memberikan pelayanan.</i></li> <li>• <i>Makin tinggi rasio ini makin nyaman penyelenggaraan pelayanan, sehingga makin baik kinerja kecamatan</i></li> </ul>
	Rasio luas kantor pemerintah lainnya yang ada di kecamatan terhadap jumlah masyarakat yang harus dilayani setiap hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Rasio ini menunjukkan kemampuan atau kapasitas kantor PEMDA yang ada di kecamatan dalam menampung masyarakat yang akan dilayani</i></li> <li>• <i>Makin tinggi rasio ini makin nyaman layanan yang diterima masyarakat, sehingga makin baik kinerja kecamatan</i></li> </ul>
	Rasio luas kantor pemerintah lainnya yang ada di kecamatan terhadap jumlah pegawai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Rasio ini menunjukkan kemampuan atau kapasitas kantor PEMDA yang ada di kecamatan dalam mewadahi pegawai yang akan memberikan pelayanan.</i></li> <li>• <i>Makin tinggi rasio ini makin nyaman penyelenggaraan pelayanan, sehingga makin baik kinerja kecamatan</i></li> </ul>
6. Dokumentasi	Tingkat kelengkapan kebijakan Pengaturan Administrasi Kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Angka ini menunjukkan komitmen PEMDA dalam menata dokumentasi yang ada di daerah termasuk di</i></li> </ul>



INDIKATOR	INDIKATOR OPERASIONAL	KRITERIA PENILAIAN
	dan Tata Naskah yang dikeluarkan Pemerintah Daerah	<p>kecamatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Makin tinggi angka ini, makin baik kinerja kecamatan.</i></li> </ul>
	Tingkat keamanan dokumentasi tersimpan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Indikator ini menunjukkan komitmen dan keseriusan Camat dalam mengamankan berbagai dokumen penting dari kerusakan fisik</i></li> <li>• <i>Makin tinggi tingkat keamanan, makin baik kinerja kecamatan</i></li> </ul>
	Tingkat Kemudahan dan Kecepatan penelusuran kembali dokumen tersimpan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Indikator ini menunjukkan komitmen Camat dalam menata kearsipan dan dokumentasi agar mudah dan cepat dalam proses pengambilan keputusan</i></li> <li>• <i>Makin tinggi tingkat kemudahan dan kecepatan penelusuran kembali dokumen, makin baik kinerja kecamatan</i></li> </ul>
	Tingkat keterjaminan kerahasiaan dokumen penting	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Indikator ini menunjukkan komitmen Camat dalam menjaga kerahasiaan dokumen penting</i></li> <li>• <i>Makin tinggi tingkat keterjaminan kerahasiaan dokumen yang semestinya dirahasiakan, makin baik kinerja kecamatan</i></li> </ul>
	Tingkat pemanfaatan teknologi komputer untuk kearsipan dan dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Indikator ini menunjukkan komitmen Camat dalam melakukan modernisasi dokumentasi dan kearsipan agar proses perencanaan dan pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat</i></li> <li>• <i>Makin tinggi tingkat pemanfaatan teknologi komputer, makin baik kinerja kecamatan.</i></li> </ul>
	Rasio jumlah komputer terhadap jumlah pegawai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Rasio ini menunjukkan tingkat pemanfaatan komputer sebagai media untuk pendokumentasian dan pemberian layanan kepada</i></li> </ul>

INDIKATOR	INDIKATOR OPERASIONAL	KRITERIA PENILAIAN
		<i>masyarakat</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Makin tinggi rasio ini, makin besar potensi pendokumentasian dan pelayan dengan baik, sehingga kinerja kecamatan makin baik.</i></li> </ul>
	Jumlah dan jenis media publikasi yang dimiliki oleh kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Makin banyak media yang digunakan makin baik kinerja kecamatan</i></li> </ul>

## 2. Aspek Pelayanan

Aspek pelayanan merupakan aspek kedua yang diukur dan dinilai. Pelayanan dibagi ke dalam 2 kategori yaitu: Pertama, pelayanan yang diberikan oleh Camat (Kantor Kecamatan) yang bersifat pelayanan administratif, koordinatif, dan fasilitatif. Kedua, pelayanan dasar yang ada di Kecamatan. Berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan sebelumnya, maka ditetapkan kriteria penilaiannya sebagai berikut:

Tabel 3.2

### Kriteria Penilaian Per Indikator pada Aspek Pelayanan Kategori Pelayanan Yang Dilakukan Kecamatan

INDIKATOR	INDIKATOR OPERASIONAL	KRITERIA PENILAIAN
1. Pelaksanaan layanan langsung kepada masyarakat	Jumlah pelayanan langsung kepada masyarakat yang diberikan kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Indikator ini menunjukkan kemampuan kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat</i></li> <li>• <i>Makin banyak jumlah layanan langsung yang diberikan, makin baik kinerja kecamatan</i></li> </ul>
	Rasio jumlah layanan langsung kecamatan terhadap jumlah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Indikator ini menunjukkan produktivitas pegawai kecamatan dalam memberikan layanan kepada</i></li> </ul>



INDIKATOR	INDIKATOR OPERASIONAL	KRITERIA PENILAIAN
	pegawai kecamatan	<p><i>masyarakat</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Makin tinggi rasio ini, makin baik kinerja kecamatan</i></li> </ul>
	Jumlah layana KTP per tahun (pembuatan baru, mutasi, dll)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Angka ini hanya digunakan untuk analisis kualitatif, sebagai alat kontrol pengendalian penduduk</i></li> </ul>
	Rata-rata lamanya pembuatan KTP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Makin cepat pembuatan KTP, makin baik kinerja kecamatan</i></li> </ul>
	Keberadaan Keputusan Camat yang bersifat mengatur masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Jika ada, maka kinerja kecamatan baik. Sebaliknya jika tidak ada</i></li> </ul>
	Rasio jumlah layanan langsung kecamatan terhadap belanja aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Indikator ini menunjukkan produktivitas modal kerja yang dimiliki kecamatan dalam menghasilkan layanan masyarakat</i></li> <li>• <i>Makin tinggi rasio ini, makin baik kinerja kecamatan</i></li> </ul>
	Rasio jumlah layanan langsung kecamatan terhadap asset kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Indikator ini menunjukkan produktivitas modal tetap yang dimiliki kecamatan</i></li> <li>• <i>Makin tinggi rasio ini, makin baik kinerja kecamatan</i></li> </ul>
	Rasio jumlah layanan langsung PEMDA yang ada di kecamatan terhadap jumlah pegawai PEMDA di kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Indikator ini menunjukkan produktivitas pegawai PEMDA yang ada di kecamatan dalam memberikan layanan kepada masyarakat</i></li> <li>• <i>Makin tinggi rasio ini, makin baik kinerja kecamatan</i></li> </ul>
	Rasio jumlah layanan langsung PEMDA di kecamatan terhadap belanja aparatur PEMDA di kecamatan yang bersangkutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Indikator ini menunjukkan produktivitas modal kerja yang dimiliki PEMDA yang ada di Kecamatan dalam menghasilkan layanan masyarakat</i></li> <li>• <i>Makin tinggi rasio ini, makin baik kinerja kecamatan</i></li> </ul>



INDIKATOR	INDIKATOR OPERASIONAL	KRITERIA PENILAIAN
	Rasio jumlah layanan langsung PEMDA di kecamatan terhadap asset PEMDA di kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator ini menunjukkan produktivitas modal tetap yang dimiliki PEMDA di Kecamatan kecamatan dalam menghasilkan layanan kepada masyarakat</li> <li>• Makin tinggi rasio ini, makin baik kinerja kecamatan</li> </ul>
	Jumlah layanan kecamatan yang bersifat menghubungkan masyarakat dengan layanan instansi teknis (Camat bertindak sebagai mediator), misalnya pengumpulan PBB, pengumpulan pajak daerah tertentu, dll.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Makin banyak jumlah layanan ini, makin kreatif kecamatan, dan makin baik kinerja kecamatan</li> </ul>
2. Fasilitasi	Frekuensi pemberian fasilitasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh instansi teknis dalam setahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angka ini menunjukkan komitmen camat dalam memberikan fasilitasi kepada instansi teknis.</li> <li>• Makin tinggi angka ini, makin baik kinerja kecamatan</li> </ul>
	Frekuensi pemberian fasilitasi kepada organisasi atau perusahaan swasta dalam setahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angka ini menunjukkan komitmen camat dalam memberikan fasilitasi kepada organisasi atau perusahaan swasta.</li> <li>• Makin tinggi angka ini, makin baik kinerja kecamatan</li> </ul>
	Frekuensi pemberian fasilitasi kepada desa/kelurahan dalam setahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angka ini menunjukkan komitmen camat dalam memberikan fasilitasi kepada desa/kelurahan.</li> <li>• Makin tinggi angka ini, makin baik kinerja kecamatan</li> </ul>
	Frekuensi pemberian fasilitasi kepada kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angka ini menunjukkan komitmen camat dalam memberikan fasilitasi kepada kelembagaan ekstrastruktural.</li> </ul>

INDIKATOR	INDIKATOR OPERASIONAL	KRITERIA PENILAIAN
	ekstrastruktural (RT/RW/PKK dll) dalam setahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Makin tinggi angka ini, makin baik kinerja kecamatan</i></li> </ul>
	Frekuensi pemberian fasilitasi kepada kecamatan lain dalam setahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Angka ini menunjukkan komitmen camat dalam memberikan fasilitasi kepada kecamatan lain.</i></li> <li>• <i>Makin tinggi angka ini, makin baik kinerja kecamatan</i></li> </ul>
3. Koordinasi	Frekuensi rapat dan pertemuan koordinasi dengan instansi teknis dalam setahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Indikator ini menunjukkan komitmen camat dalam upaya menyalurkan dan menyalurkan penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan instansi teknis di kecamatan.</i></li> <li>• <i>Makin tinggi angka ini, maka makin baik kinerja kecamatan.</i></li> </ul>
	Frekuensi rapat atau pertemuan koordinasi dengan desa/kelurahan dalam setahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Indikator ini menunjukkan komitmen camat dalam upaya menyalurkan dan menyalurkan berbagai kegiatan yang dilakukan desa/kelurahan.</i></li> <li>• <i>Makin tinggi angka ini, maka makin baik kinerja kecamatan.</i></li> </ul>
	Frekuensi konsultasi Camat dengan instansi teknis di Daerah dalam setahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Indikator ini menunjukkan komitmen camat dalam upaya menyalurkan dan menyalurkan penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan instansi teknis di kecamatan.</i></li> <li>• <i>Makin tinggi angka ini, maka makin baik kinerja kecamatan.</i></li> </ul>
4. Pembinaan	Frekuensi pembinaan kecamatan terhadap instansi teknis yang ada di kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Indikator ini menunjukkan komitmen Camat dalam melakukan pembinaan terhadap instansi teknis di kecamatan</i></li> <li>• <i>Makin tinggi frekuensi pembinaan, makin baik kinerja kecamatan</i></li> </ul>
	Frekuensi pembinaan kecamatan terhadap desa dan kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Indikator ini menunjukkan komitmen Camat dalam melakukan pembinaan terhadap desa dan kelurahan</i></li> </ul>



INDIKATOR	INDIKATOR OPERASIONAL	KRITERIA PENILAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Makin tinggi frekuensi pembinaan, makin baik kinerja kecamatan</i></li> </ul>
	Frekuensi pembinaan kecamatan terhadap organisasi ekstrastruktural di kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Indikator ini menunjukkan komimen Camat dalam melakukan pembinaan terhadap organisasi ekstrastruktural</i></li> <li>• <i>Makin tinggi frekuensi pembinaan, makin baik kinerja kecamatan</i></li> </ul>
	Frekuensi pembinaan kecamatan terhadap organisasi lain (LSM dan swasta) yang ada di kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Indikator ini menunjukkan komimen Camat dalam melakukan pembinaan terhadap organisasi lain di kecamatan</i></li> <li>• <i>Makin tinggi frekuensi pembinaan, makin baik kinerja kecamatan</i></li> </ul>
5. Pengawasan	Frekuensi pengawasan kecamatan terhadap instansi teknis yang ada di kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Indikator ini menunjukkan komimen Camat dalam melakukan pengawasan terhadap instansi teknis di kecamatan</i></li> <li>• <i>Makin tinggi frekuensi pengawasan, makin baik kinerja kecamatan</i></li> </ul>
	Frekuensi pengawasan kecamatan terhadap desa dan kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Indikator ini menunjukkan komimen Camat dalam melakukan pengawasan terhadap desa dan kelurahan</i></li> <li>• <i>Makin tinggi frekuensi pengawasan, makin baik kinerja kecamatan</i></li> </ul>
	Frekuensi pengawasan kecamatan terhadap organisasi ekstrastruktural di kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Indikator ini menunjukkan komimen Camat dalam melakukan pengawasan terhadap organisasi ekstrastruktural</i></li> <li>• <i>Makin tinggi frekuensi pengawasan, makin baik kinerja kecamatan</i></li> </ul>
	Frekuensi pengawasan kecamatan terhadap organisasi lain (LSM dan swasta) yang ada di kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Indikator ini menunjukkan komimen Camat dalam melakukan pengawasan terhadap organisasi lain di kecamatan</i></li> <li>• <i>Makin tinggi frekuensi pengawasan, makin baik kinerja kecamatan</i></li> </ul>



Tabel 3.3

**Kriteria Penilaian Per Indikator pada Aspek Pelayanan Kategori  
Pelayanan Dasar di Kecamatan**

INDIKATOR	INDIKATOR OPERASIONAL	KRITERIA PENILAIAN
1. Bidang pendidikan	Rasio jumlah usia sekolah dasar terhadap jumlah sekolah dasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Makin rendah rasio ini, makin baik kinerja kecamatan</i></li> </ul>
	Rasio jumlah usia sekolah dasar terhadap jumlah guru sekolah dasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Makin rendah rasio ini, makin baik kinerja kecamatan</i></li> </ul>
	Rasio jumlah usia SLTP terhadap jumlah SLTP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Makin rendah rasio ini, makin baik kinerja kecamatan</i></li> </ul>
	Rasio jumlah usia SLTP terhadap jumlah guru SLTP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Makin rendah rasio ini, makin baik kinerja kecamatan</i></li> </ul>
	Rasio jumlah usia SLTA terhadap jumlah SLTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Makin tinggi rendah ini, makin baik kinerja kecamatan</i></li> </ul>
	Rasio jumlah usia SLTA terhadap jumlah guru SLTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Makin rendah rasio ini, makin baik kinerja kecamatan</i></li> </ul>
	Rasio jumlah siswa penerima beasiswa dari terhadap keseluruhan jumlah siswa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Makin tinggi rasio ini makin baik kinerja kecamatan</i></li> <li>• <i>Asumsi, keberadaan beasiswa menunjukkan adanya jaminan pendidikan bagi penduduk yang kurang/tidak mampu.</i></li> </ul>
2. Bidang Kesehatan	Rasio jumlah penduduk terhadap jumlah PUSKESMAS, Poliklinik, dan RS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Makin rendah rasio ini, makin baik kinerja kecamatan</i></li> </ul>
	Rasio jumlah penduduk terhadap jumlah Dokter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Makin rendah rasio ini, makin baik kinerja kecamatan</i></li> </ul>
	Rasio jumlah penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Makin rendah rasio ini, makin baik</i></li> </ul>

INDIKATOR	INDIKATOR OPERASIONAL	KRITERIA PENILAIAN
	terhadap jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya	<i>kinerja kecamatan</i>
	Rasio penduduk yang mempunyai Kartu Sehat terhadap keseluruhan penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Makin tinggi rasio ini makin baik kinerja kecamatan</i></li> </ul>
3. Bidang Keamanan dan lainnya	Rasio jumlah pelanggan telepon terhadap penduduk jumlah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Makin tinggi rasio ini makin baik kinerja kecamatan.</i></li> </ul>
	Rasio jumlah pelanggan listrik terhadap jumlah penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Makin tinggi rasio ini makin baik kinerja kecamatan</i></li> </ul>
	Rasio panjang jalan terhadap luas wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Makin tinggi rasio ini makin baik kinerja kecamatan</i></li> </ul>
	Rasio jumlah polisi terhadap jumlah penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Makin tinggi rasio ini makin baik kinerja kecamatan</i></li> </ul>
	Keberadaan Kantor Pos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Jika ada, berarti kinerja kecamatan baik, sebaliknya jika tidak ada</i></li> </ul>
	Keberadaan RDTR (Rencana Detil Tata Ruang)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Jika ada, berarti kinerja kecamatan baik, sebaliknya jika tidak ada</i></li> </ul>
	Keberadaan sistem pengelolaan kebersihan lingkungan (sampah, limbah, penghijauan, dll)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Jika ada, berarti kinerja kecamatan baik, sebaliknya jika tidak ada</i></li> </ul>
	Pengelolaan sumber daya produktif yang ada di kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Jika dikelola dengan baik, maka kinerja kecamatan baik. Sebaliknya jika tidak dikelola</i></li> </ul>

### 3. Aspek Outcomes (Indikator Makro Pembangunan)

Aspek outcomes atau indikator makro pembangunan merupakan aspek ketiga yang diukur dan dinilai. Ada 6 (enam) bidang indikator yang

ditetapkan untuk aspek ini, yaitu indikator bidang ekonomi, indikator bidang social, indikator bidang budaya, indikator bidang politik, indikator bidang pemerintahan, dan indikator gabungan. Berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan kriteria penilaiannya sebagai berikut:

**Tabel 3.4**

**Kriteria Penilaian Per Indikator pada Aspek Outcomes (Indikator Makro Pembangunan)**

INDIKATOR	INDIKATOR OPERASIONAL	KRITERIA PENILAIAN
1. Indikator Bidang Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan	• <i>Makin tinggi laju pertumbuhan ekonomi, makin baik kinerja kecamatan</i>
	Pendapatan perkapita masyarakat	• <i>Makin tinggi pendapatan perkapitan masyarakat, makin baik kinerja kecamatan</i>
	Jumlah Penduduk Miskin	• <i>Makin sedikit jumlah penduduk miskin, makin baik kinerja kecamatan</i>
	Jumlah desa miskin	• <i>Makin sedikit jumlah desa miskin, makin baik kinerja kecamatan</i>
2. Indikator Bidang Sosial	Tingkat pengangguran	• <i>Makin kecil tingkat pengangguran, makin baik kinerja kecamatan</i>
	Laju Pertumbuhan Pertumbuhan Penduduk	• <i>Makin kecil tingkat pertumbuhan penduduk, makin baik kinerja kecamatan.</i>
	Jumlah Lembaga Sosial Kemasyarakatan/Profesi atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang aktif dan terdaftar.	• <i>Makin banyak jumlah Lembaga Sosial Kemasyarakatan/Profesi atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang aktif dan terdaftar, makin baik kinerja kecamatan</i>
	Angka Partisipasi Pendidikan (APP) Sekolah Dasar	• <i>Makin tinggi APP Dasar, makin baik kinerja kecamatan</i>



INDIKATOR	INDIKATOR OPERASIONAL	KRITERIA PENILAIAN
	APP Sekolah Lanjutan Pertama	• <i>Makin tinggi APP Lanjutan Tingkat Pertama, makin baik kinerja kecamatan</i>
	APP Sekolah Lanjutan Atas	• <i>Makin tinggi APP Lanjutan Tingkat Atas, makin baik kinerja kecamatan</i>
	Angka Kematian Bayi saat dilahirkan,	• <i>Makin rendah Angka Kematian Bayi, makin baik kinerja kecamatan</i>
	Angka Melek Huruf	• <i>Makin tinggi Angka Melek Huruf, makin baik kinerja kecamatan</i>
	Angka Harapan Hidup	• <i>Makin tinggi Angka Harapan Hidup, makin baik kinerja kecamatan</i>
3. Indikator Bidang Budaya	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang kebudayaan	• <i>Makin banyak jumlah Lembaga kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang budaya, makin baik kinerja kecamatan</i>
	Jumlah atraksi seni dan budaya	• <i>Makin banyak jumlah atraksi seni dan budaya, makin baik kinerja kecamatan</i>
	Frekuensi atraksi seni dan budaya	• <i>Makin banyak frekuensi atraksi seni dan budaya, makin baik kinerja kecamatan</i>
	Jumlah sanggar seni dan budaya	• <i>Makin banyak sanggar seni dan budaya, makin baik kinerja kecamatan</i>
	Jumlah budayawan dan seniman	• <i>Makin banyak budayawan dan seniman, makin baik kinerja kecamatan</i>
4. Indikator Bidang Politik	Rasio penduduk memilih terhadap keseluruhan penduduk yang punya hak pilih pada PEMILU	• <i>Makin tinggi rasio penduduk yang ikut memilih terhadap keseluruhan penduduk yang punya hak pilih, makin baik kinerja kecamatan</i>
	Jumlah Dewan Pimpinan Kecamatan Partai Politik	• <i>Makin banyak jumlah DP Kecamatan Parpol, makin tinggi tingkat demokratisasi, dan makin baik kinerja</i>

INDIKATOR	INDIKATOR OPERASIONAL	KRITERIA PENILAIAN
		<i>kecamatan.</i>
5. Indikator Bidang Pemerintahan (Kontribusi Kecamatan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan)	Nilai pajak daerah yang diperoleh dari kecamatan yang bersangkutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Makin tinggi nilai pajak daerah yang diperoleh dari kecamatan yang bersangkutan, makin baik kinerja kecamatan.</i></li> </ul>
	Rasio antara realisasi pajak daerah terhadap potensi yang dimiliki di kecamatan yang bersangkutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Makin tinggi rasio antara realisasi pajak daerah terhadap potensi yang dimiliki di kecamatan yang bersangkutan, makin baik kinerja kecamatan</i></li> </ul>
	Nilai PBB yang diperoleh dari kecamatan yang bersangkutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Makin tinggi Nilai PBB yang diperoleh dari kecamatan yang bersangkutan, makin baik kinerja kecamatan</i></li> </ul>
	Rasio antara realisasi PBB terhadap potensi yang dimiliki di kecamatan yang bersangkutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Makin tinggi rasio antara realisasi PBB terhadap potensi yang dimiliki di kecamatan yang bersangkutan, makin baik kinerja kecamatan.</i></li> </ul>
6. Indikator Gabungan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Makin tinggi IPM, makin baik kinerja kecamatan.</i></li> </ul>

## BAB IV

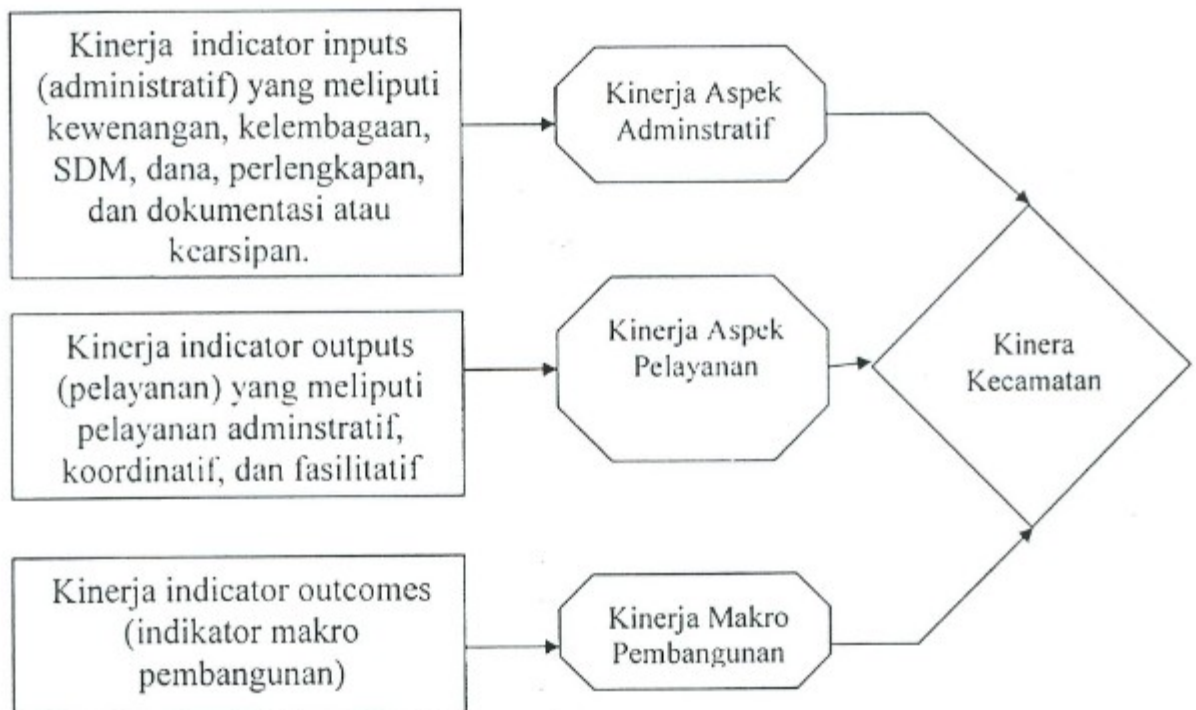
### METODE EVALUASI

#### A. Konstruksi Indeks Kinerja Kecamatan

Kinerja kecamatan merupakan totalitas kinerja kecamatan dan kinerja seluruh tingkatan pemerintahan (Kabupaten/Kota, Propinsi, Pusat) yang berlokasi di kecamatan tertentu. Dengan demikian, baik buruknya kinerja kecamatan bukan hanya ditentukan oleh kinerja Pemerintah Kecamatan saja, melainkan kinerja seluruh tingkatan Pemerintahan. Berikut ini konstruksi kinerja kecamatan yang dibangun atas indikator-indikatornya:

**Gambar 4.1**

#### Konstruksi Penetapan Capaian Kinerja Kecamatan





Sebagaimana nampak pada Gambar 4.1, bahwa kinerja Kecamatan dikonstruksi oleh tiga aspek penting yaitu aspek administratif, aspek pelayanan, dan kinerja makro pembangunan. Kinerja Aspek Adminsitraif dikonstruksi oleh 6 kelompok indikator utama yaitu kewenangan, kelembagaan, SDM, pendanaan, perlengkapan, dan dokumentasi atau kearsipan. Kinerja Aspek Pelayanan dikonstruksi oleh pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kecamatan dan berbagai instansi yang ada di Kecamatan berupa pelayanan administratif, fasilitatif, koordinatif, dan substansif. Sementara itu kinerja Makro Pembangunan dikonstruksi oleh berbagai indikator makro pada bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara konseptual, peningkatan kapasitas organisasi tidak akan berhasil jika hanya menyentuh sumber daya manajemen yang meliputi personil, kelembagaan, kewenangan, SDM, dana, dan lain-lain. Keberhasilan peningkatan kapasitas organisasi juga ditentukan oleh perbaikan dalam proses manajemen. Dalam kaitan ini, evaluasi merupakan bagian dari rangkai proses manajemen yang sering terabaikan objektivitasnya, yang disebabkan oleh tidak adanya standar penilaian yang dapat dijadikan acuan.

Berkaitan dengan hal tersebut, peningkatan kapasitas organisasi kecamatan perlu menyentuh berbagai aspek termasuk proses manajemen. Bagian dari proses manajemen yang kurang mendapat perhatian pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kecamatan adalah fungsi evaluasi. Oleh karena itu, jika Pemerintah Daerah Kota Bandung berkeinginan untuk meningkatkan kapasitas organisasi kecamatan, dan memang merupakan suatu niatan yang sangat baik, maka fungsi evaluasi perlu dioptimalkan dengan objektif. Salah satu langkah yang perlu

dilakukan adalah menetapkan standar kinerja beserta berbagai faktor yang terkait.

## B. Formula Penilaian

Sebagaimana nampak pada Gambar 4.1 ada 4 nilai yang akan muncul untuk setiap kecamatan, yaitu Indeks Kinerja Administratif (IKA), Indeks Kinerja Pelayanan (IKP), Indeks Kinerja Makro Pembangunan (IKMP), dan Indeks Kinerja Kecamatan secara total (IKK). Formula untuk setiap indeks tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Indeks Kinerja Administratif (IKA) adalah suatu angka yang menunjukkan nilai kinerja kecamatan dalam aspek administratif (kewenangan, kelembagaan, SDM. Dana, perlengkapan dan dokumentasi atau kearsipan). Indeks ini lebih menggambarkan kemampuan dan kemauan daerah kabupaten/kota dalam mengoptimalkan fungsi kecamatan.

$$IKA = \frac{X_{ai} - X_{a,min}}{X_{a,max} - X_{a,min}} \times 100$$

**Keterangan:**

- $X_{a,i}$  = Nilai standar total suatu kecamatan untuk aspek administratif  
 $X_{a, min}$  = Nilai standar minimal (paling kecil) yang dicapai oleh kecamatan untuk aspek administratif  
 $X_{a, max}$  = Nilai standar maksimal (paling besar) yang dicapai oleh kecamatan untuk aspek administratif

**Catatan:**

- Perhitungan indeks dilakukan per wilayah (Bakorwil)
- Dengan demikian, penentuan  $X_{a,min}$  dan  $X_{a,max}$  dilakukan per wilayah, bukan per kabupaten/kota atau per propinsi.

2. Indeks Kinerja Pelayanan (IKP) adalah suatu angka yang menunjukkan nilai kinerja pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan

yang meliputi pelayanan administratif, fasilitatif, dan koordinatif. Indeks ini lebih menggambarkan kemampuan dan kemauan kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

$$IKP = \frac{X_{pi} - X_{p,min}}{X_{p,max} - X_{p,min}} \times 100$$

Keterangan:

- $X_{p,i}$  = Nilai standar total suatu kecamatan untuk aspek pelayanan  
 $X_{p, min}$  = Nilai standar minimal (paling kecil) yang dicapai oleh kecamatan untuk aspek pelayanan  
 $X_{p, max}$  = Nilai standar maksimal (paling besar) yang dicapai oleh kecamatan untuk aspek pelayanan

Catatan:

- Penghitungan indeks dilakukan per wilayah (Bakorwil)
- Dengan demikian, penilaian  $X_{p,min}$  dan  $X_{p,max}$  dilakukan per wilayah, bukan per kabupaten/kota atau per propinsi.

3. Indeks Kinerja Makro Pembangunan (IKMP) adalah suatu angka yang menunjukkan nilai kinerja indikator makro pembangunan yang meliputi Indeks Pembangunan Manusia, Angka Harapan Hidup, Angka partisipasi Sekolah, Income Percapita, dan lain-lain. Indeks ini lebih menggambarkan interaksi antara kemampuan dan kemauan Kecamatan dengan kemampuan dan kemauan Kabupaten, Propinsi, dan Pusat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Kecamatan.



$$IKMP = \frac{X_{m,i} - X_{m,min}}{X_{m,max} - X_{m,min}} \times 100$$

Keterangan:

- $X_{m,i}$  = Nilai standar total suatu kecamatan untuk aspek indikator Makro pembangunan  
 $X_{m,min}$  = Nilai standar minimal (paling kecil) yang dicapai oleh kecamatan untuk aspek indikator makro pembangunan  
 $X_{m,max}$  = Nilai standar maksimal (paling besar) yang dicapai oleh kecamatan untuk aspek indikator makro pembangunan

Catatan:

- Penghitungan indeks dilakukan per wilayah (Bakorwil)
- Dengan demikian, penilaian  $X_{m,min}$  dan  $X_{m,max}$  dilakukan per wilayah, bukan per kabupaten/kota atau per propinsi.

4. Indeks Kinerja Kecamatan (IKK) adalah suatu angka yang menunjukkan nilai kinerja Kecamatan baik dalam aspek administratif, pelayanan, maupun indikator makro pembangunan. Indeks ini menunjukkan kinerja semua tingkatan pemerintahan (Kabupaten/Kota, Propinsi, dan Pusat) termasuk Kecamatan Sendiri sebagai SKPD yang mempunyai batasan wilayah kerja, dalam melakukan pembangunan di kecamatan. Untuk menentukan besarnya IKK ini ada dua cara. *Pertama*, dengan menganggap bahwa setiap aspek (administratif, pelayanan, dan indikator makro pembangunan) mempunyai bobot yang berbeda-beda dalam memberikan kontribusi terhadap kinerja kecamatan. Formula yang dibangun untuk pendekatan ini adalah sebagai berikut:

$$IKK = (IKA \times b1) + (IKP \times b2) + (IKMP \times b3)$$

Keterangan: b1, b2, dan b3 adalah bobot kepentingan masing masing aspek (administrative, pelayanan, dan indikator makro pembangunan) dalam mengkonstruksi IKK. Besarnya bobot masing-masing aspek ini ditentukan berdasarkan pertimbangan para ahli di bidangnya (*expert judgement*).

*Pendekatan kedua*, menggap bahwa semua indikator yang ada pada semua aspek mempunyai bobot yang sama dalam memberikan kontribusi terhadap kinerja kecamatan, maka formulanya sebagai berikut:

$$IKA = \frac{Xi - Xmin}{Xmax - Xmin} \times 100$$

Keterangan:

- $Xi$  = Nilai standar total suatu kecamatan untuk semua aspek
- $Xmin$  = Nilai standar minimal (paling kecil) yang dicapai oleh kecamatan untuk semua aspek
- $Xmax$  = Nilai standar maksimal (paling besar) yang dicapai oleh kecamatan untuk semua aspek

Catatan:

- Penghitungan indeks dilakukan per wilayah (Bakorwil)
- Dengan demikian, penilaian  $Xmin$  dan  $Xmax$  dilakukan per wilayah, bukan per kabupaten/kota atau per propinsi.

*Atas dasar formula-formula sebagaimana di atas, maka nilai indeks suatu kecamatan, baik indeks parsial (per aspek) ataupun indeks total (keseluruhan) akan terletak pada interval 0 sampai dengan 100.*

*Indeks 0 tidak berarti bahwa kinerja kecamatan sama dengan 0, tetapi kinerja kecamatan yang bersangkutan paling rendah diantara kecamatan-kecamatan yang ada di wilayahnya (Bakorwil). Demikian juga indeks 100, bukan berarti kecamatan tersebut telah mempunyai kinerja optimal, melainkan kinerja tertinggi diantara kecamatan-kecamatan lainnya dalam wilayah (Bakorwil) yang bersangkutan.*

### C. Tahapan Penentuan Indeks Kinerja

Untuk mendapatkan nilai capaian kinerja kecamatan yang dinyatakan dalam indeks sebagaimana diuraikan di atas, dilakukan tahapan penilaian sebagai berikut:

1. Setelah data mentah yang digali dengan instrumen direkap, selanjutnya dilakukan standarisasi nilai. Maksud dari standarisasi nilai adalah agar nilai-nilai dari semua indikator yang mempunyai satuan berbeda-beda dapat dijumlahkan. Misalnya indikator jumlah kewenangan dengan satuan jenis, indikator jumlah pegawai dengan satuan orang, dan indikator anggaran dengan satuan rupiah, jika tidak dilakukan standarisasi maka tidak dapat dilakukan penjumlahan. Dengan dilakukan standarisasi maka dapat dijumlahkan. Formula untuk melakukan standarisasi adalah sebagai berikut:

$$X_{is} = \frac{X_i - \bar{X}}{S}$$

Keterangan:

$X_i$  = Data mentah (yang belum distandarisasi)

$X_{is}$  = Nilai standar ke  $i$

$\bar{X}$  = Nilai rata-rata

$S$  = Standar deviasi

2. Setelah dilakukan standarisasi nilai, selanjutnya dijumlahkan per aspek untuk setiap kecamatan.



3. Setelah dijumlahkan, selanjutnya dihitung indeks untuk setiap daerah per aspek.
4. Langkah terakhir adalah pemeringkatan (perankingan) kecamatan berdasarkan angka indeks nya.

## BAB V

### HASIL PENILAIAN KINERJA KECAMATAN

#### A. Indeks Kinerja Administratif (IKA)

##### 1. Wilayah Bogor

No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks
1.	Kabupaten Bogor	Kec. Dramaga	0,663644816
2.	Kabupaten Bogor	Kec. Kemang	0,494886099
3.	Kabupaten Bogor	Kec. Ciawi	0,470478847
4.	Kabupaten Bogor	Kec. Cibungbulang	0,445141795
5.	Kabupaten Bogor	Kec. Jonggol	0,434100418
6.	Kabupaten Bogor	Kec. Caringin	0,426662018
7.	Kabupaten Bogor	Kec. Babakan Madang	0,414807066
8.	Kabupaten Bogor	Kec. Megamendung	0,413179916
9.	Kabupaten Bogor	Kec. Cibinong	0,40213854
10.	Kabupaten Bogor	Kec. Tamansari	0,39958159
11.	Kabupaten Bogor	Kec. Kalapanunggal	0,382845188
12.	Kabupaten Bogor	Kec. Citeureup	0,380869363
13.	Kabupaten Bogor	Kec. Jasinga	0,368433287
14.	Kabupaten Bogor	Kec. Nanggung	0,364714086
15.	Kabupaten Bogor	Kec. Cijeruk	0,363668061
16.	Kabupaten Bogor	Kec. Tenjo	0,362854486
17.	Kabupaten Bogor	Kec. Rancabungur	0,359135286
18.	Kabupaten Bogor	Kec. Ciseeng	0,356927011
19.	Kabupaten Bogor	Kec. Tanjungsari	0,332635983
20.	Kabupaten Bogor	Kec. Leuwiliang	0,326243608
21.	Kabupaten Bogor	Kec. Bojonggede	0,308926081
22.	Kabupaten Bogor	Kec. Sukaraja	0,307298931
23.	Kabupaten Bogor	Kec. Sukamakmur	0,305206881
24.	Kabupaten Bogor	Kec. Leuwisadeng	0,293933054
25.	Kabupaten Bogor	Kec. Cogombong	0,280218503
26.	Kabupaten Bogor	Kec. Cigudeg	0,277312878

No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks
27.	Kabupaten Bogor	Kec. Tanjurhalang	0,275685728
28.	Kabupaten Bogor	Kec. Rumpin	0,266387727
29.	Kabupaten Bogor	Kec. Gunungsindur	0,177708043
30.	Kabupaten Cianjur	Kecamatan Pacet	0,757787076
31.	Kabupaten Cianjur	Kecamatan Warung Kondang	0,30241748
32.	Kabupaten Cianjur	Kecamatan Cibirong	0,288354254
33.	Kabupaten Cianjur	Kecamatan Cilaku	0,247094375
34.	Kabupaten Cianjur	Kecamatan Cipanas	0,244072524
35.	Kabupaten Cianjur	Kecamatan Cugenang	0,15423059
36.	Kabupaten Cianjur	Kecamatan Cidaun	0,012087401
37.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Kadudampit	0,534983728
38.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Kebonpedes	0,435030219
39.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Nagrak	0,410506741
40.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Sukaraja	0,404811715
41.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Cibadak	0,40027894
42.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Caringin	0,396908415
43.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Cidahu	0,391562064
44.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Pabuaran	0,377498838
45.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Cicurug	0,365992562
46.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Cidolog	0,357856811
47.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Parakansalak	0,354951185
48.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Tegalbuleud	0,346815435
49.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Ciracap	0,337168759
50.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Jampangkulon	0,334728033
51.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Cikakak	0,332984658
52.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Kalibunder	0,331589958
53.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Kalapanunggal	0,330543933
54.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Cidadap	0,315783357
55.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Nyalindung	0,315086007
56.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Cisaat	0,30450953
57.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Waluran	0,303231055
58.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Cikembar	0,302766155



No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks
59.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Surade	0,29776848
60.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Lengkong	0,29637378
61.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Cibitung	0,294049279
62.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Simpenan	0,293119479
63.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Purabaya	0,291143654
64.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Sukalarang	0,287424454
65.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Parungkuda	0,284635053
66.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Palabuhanratu	0,278475128
67.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Cikidang	0,267782427
68.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Ciemas	0,263830776
69.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Warungkiara	0,256624826
70.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Jampangtengah	0,255927476
71.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Sukabumi	0,253138075
72.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Gegerbitung	0,251743375
73.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Curugkembar	0,249186425
74.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Kabandungan	0,240469549
75.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Cisolok	0,240120874
76.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Cicantayan	0,227684798
77.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Gunungguruh	0,227568573
78.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Sagaranten	0,225941423
79.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Bantargadung	0,222919572
80.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Bojonggenteng	0,179567643
81.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Cireunghas	0,177824268
82.	Kota Bogor	Kec. Bogor Selatan	0,508135751
83.	Kota Bogor	Kec. Bogor Barat	0,283356578
84.	Kota Bogor	Kec. Bogor Tengah	0,279172478
85.	Kota Bogor	Kec. Tanah Sareal	0,256043701
86.	Kota Bogor	Kec. Bogor Timur	0,251046025
87.	Kota Bogor	Kec. Bogor Utara	0
88.	Kota Depok	Kecamatan Limo	0,410158066
89.	Kota Depok	Kecamatan Sawargan	0,35413761
90.	Kota Depok	Kecamatan Beji	0,324500232

No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks
91.	Kota Depok	Kecamatan Sukmajaya	0,261157601
92.	Kota Depok	Kecamatan Cimanggis	0,2537192
93.	Kota Depok	Kecamatan Pancoran mas	0,135867039
<b>94.</b>	<b>Kota Sukabumi</b>	<b>Kec. Cikole</b>	<b>1</b>
95.	Kota Sukabumi	Kec. Citamiang	0,373082287
96.	Kota Sukabumi	Kec. Cibeureum	0,355183636
97.	Kota Sukabumi	Kec. Baros	0,322640632
98.	Kota Sukabumi	Kec. Lembursitu	0,282078103
99.	Kota Sukabumi	Kec. Warudoyong	0,274058577
100.	Kota Sukabumi	Kec. Gunung Puyuh	0,249418875

## 2. Wilayah Cirebon

No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks
2.	Kabupaten Cirebon	Kec. Losari	0,706092276
3.	Kabupaten Cirebon	Kec. Ciledug	0,65383635
4.	Kabupaten Cirebon	Kec. Babakan	0,631659444
5.	Kabupaten Cirebon	Kec. Palimanan	0,5641091
6.	Kabupaten Cirebon	Kec.Susukan	0,558501147
7.	Kabupaten Cirebon	Kec.Pabuaran	0,475656385
8.	Kabupaten Cirebon	Kec.Klangenan	0,412949274
9.	Kabupaten Cirebon	Kec. Astanajapura	0,388478205
10.	Kabupaten Cirebon	Kec.Gebang	0,383125159
11.	Kabupaten Cirebon	Kec.Pabedilan	0,343869488
12.	Kabupaten Cirebon	Kec.Ciwaringin	0,320418047
13.	Kabupaten Cirebon	Kec. Dukupuntang	0,308947234
14.	Kabupaten Cirebon	Kec. Kedawung	0,292888096
15.	Kabupaten Cirebon	Kec.Karangwareng	0,289319398
16.	Kabupaten Cirebon	Kec.Panguragan	0,271221004
17.	Kabupaten Cirebon	Kec. Pangenan	0,257456029
18.	Kabupaten Cirebon	Kec Waled	0,254397145
19.	Kabupaten Cirebon	Kec.Beber	0,250063727
20.	Kabupaten Cirebon	Kec. Karangsembung	0,248279378



No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks
21.	Kabupaten Cirebon	Kec Weru	0,177160336
22.	Kabupaten Cirebon	Kec. Susukanlebak	0,156512873
23.	Kabupaten Cirebon	Kec.Cirebon Utara	0,155748152
24.	Kabupaten Cirebon	Kec. Kaliwedi	0,121080806
25.	Kabupaten Cirebon	Kec. Kapetakan	0
26.	Kabupaten Indramayu	Kec. Haurgeulis	0,572775937
27.	Kabupaten Indramayu	Kec. Anjatan	0,55493245
28.	Kabupaten Indramayu	Kec. Bangodua	0,531226102
29.	Kabupaten Indramayu	Kec. Karangampel	0,504460872
30.	Kabupaten Indramayu	Kec. Kandanghaur	0,467499363
31.	Kabupaten Indramayu	Kec. Sukra	0,41320418
32.	Kabupaten Indramayu	Kec. Widasari	0,353046138
33.	Kabupaten Indramayu	Kec. Bongas	0,330869233
34.	Kabupaten Indramayu	Kec. Sukagumiwang	0,126943666
35.	Kabupaten Indramayu	Kec. Krangkeng	0,099158807
36.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Darma	0,875605404
37.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Nusaherang	0,828702524
38.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Cigugur	0,713229671
39.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Pasawahan	0,664032628
40.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Mandirancan	0,601580423
41.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Luragung	0,599541167
42.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Jalaksana	0,580168239
43.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Garawangi	0,576344634
44.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Selajambe	0,569717053
45.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Subang	0,569462146
46.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Kadugede	0,552128473
47.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Lebak Wangi	0,494264593
48.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Cilimus	0,449910783
49.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Cimahi	0,438694876
50.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Ciawigebang	0,401223553
51.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Ciwaru	0,396380321



No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks
52.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Ciniru	0,391537089
53.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Japara	0,375223044
54.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Pancalang	0,370889625
55.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Karangancana	0,354065766
56.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Kuningan	0,347438185
57.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Cilebak	0,344124395
58.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Kramatmulya	0,33443793
59.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Cibingbin	0,314045373
60.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Cigandamekar	0,309966862
61.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Sindang Agung	0,306143258
62.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Cidahu	0,296966607
63.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Maleber	0,291358654
64.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Cibeureum	0,238338007
65.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Kalimanggis	0,222278868
66.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Hantara	0,195258731
67.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Cipicung	0,193984196
<b>68.</b>	<b>Kabupaten Majalengka</b>	<b>Kec.Majalengka</b>	<b>1</b>
69.	Kabupaten Majalengka	Kec. Banjaran	0,926586796
70.	Kabupaten Majalengka	Kec. Kertajati	0,629365282
71.	Kabupaten Majalengka	Kec. Maja	0,611776702
72.	Kabupaten Majalengka	Kec. Kadipaten	0,587305633
73.	Kabupaten Majalengka	Kec. Jatitujuh	0,581952587
74.	Kabupaten Majalengka	Kec. Rajagaluh	0,559265868
75.	Kabupaten Majalengka	Kec.Leuwimunding	0,533010451
76.	Kabupaten Majalengka	Kec.Sindangwangi	0,481009432
77.	Kabupaten Majalengka	Kec.Bantarujeg	0,431557482
78.	Kabupaten Majalengka	Kec.Cigasong	0,421106296
79.	Kabupaten Majalengka	Kec. Palasah	0,388478205
80.	Kabupaten Majalengka	Kec. Talaga	0,369869997
81.	Kabupaten Majalengka	Kec. Dawuan	0,335457558
82.	Kabupaten Majalengka	Kec. Argapura	0,260260005

No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks
83.	Kabupaten Majalengka	Kec. Cingambul	0,254397145
84.	Kabupaten Majalengka	Kec. Sukahaji	0,192199847
85.	Kabupaten Majalengka	Kec. Lemahsugih	0,170277849
86.	Kota Cirebon	Kec. Pekalipan	0,57583482
87.	Kota Cirebon	Kec. Kesambi	0,35788937
88.	Kota Cirebon	Kec. Harjamukti	0,277083864
89.	Kota Cirebon	Kec. Lemahwungkuk	0,252102982

### 3. Wilayah Purwakarta

No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks
1.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Telagasari	0,717206133
2.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Tempuran	0,709823964
3.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Tirtamulya	0,684081015
4.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Pedes	0,670073822
5.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Ciampel	0,659473784
6.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Jayakarta	0,656823774
7.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Karawang Barat	0,649252319
8.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Telujambe Timur	0,628998675
9.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Rawameta	0,587923528
10.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Karawang Timur	0,586219951
11.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Kutawaluya	0,582434223
12.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Kotabaru	0,575998486
13.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Cilamaya Wetan	0,558962711
14.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Cilamaya Kulon	0,524512588
15.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Cikampek	0,50444823
16.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Majalaya	0,498391066
17.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Lemahabang	0,498201779
18.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Pangkalan	0,469430248
19.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Purwasari	0,453908764
20.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Jatisari	0,445580163



21.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Cibuaya	0,431762256
22.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Batujaya	0,430437252
23.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Banyusari	0,406208594
24.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Telukjambe Barat	0,371947757
25.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Tegalwaru	0,340715503
26.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Cilebar	0,31251183
27.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Pakisjaya	0,300018929
28.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Rengasdengklok	0,258565209
<b>29.</b>	<b>Kabupaten Purwakarta</b>	<b>Kec. Campaka</b>	<b>1</b>
30.	Kabupaten Purwakarta	Kec. Purwakarta	0,932424759
31.	Kabupaten Purwakarta	Kec. Bungursari	0,884346016
32.	Kabupaten Purwakarta	Kec. Pasawahan	0,720045429
33.	Kabupaten Purwakarta	Kec. Jatiluhur	0,704713231
34.	Kabupaten Purwakarta	Kec. Sukasari	0,689191747
35.	Kabupaten Purwakarta	Kec. Sukatani	0,640734431
36.	Kabupaten Purwakarta	Kec. Darangdan	0,599848571
37.	Kabupaten Purwakarta	Kec. Cibatu	0,598523566
38.	Kabupaten Purwakarta	Kec. Bojong	0,57789135
39.	Kabupaten Purwakarta	Kec. Babakancikao	0,543441227
40.	Kabupaten Purwakarta	Kec. Kiarapedes	0,522430437
41.	Kabupaten Purwakarta	Kec. Plered	0,438576566
42.	Kabupaten Purwakarta	Kec. Maniis	0,369487034
43.	Kabupaten Purwakarta	Kec. Pondokslam	0,354344123
44.	Kabupaten Purwakarta	Kec. Tegalwaru	0,303047511
45.	Kabupaten Purwakarta	Kec. Wanayasa	0,193450691
46.	Kabupaten Subang	Kec. Sagalaherang	0,827749385
47.	Kabupaten Subang	Kec. Kalijati	0,804088586
48.	Kabupaten Subang	Kec. Cisalak	0,77872421
49.	Kabupaten Subang	Kec. Cijambe	0,693356048
50.	Kabupaten Subang	Kec. Cipunagara	0,671966686
51.	Kabupaten Subang	Kec. Pusakanagara	0,663638084
52.	Kabupaten Subang	Kec. Cibogo	0,663259512



No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks
53.	Kabupaten Subang	Kec. Comprang	0,660041643
54.	Kabupaten Subang	Kec. Ciasem	0,636759417
55.	Kabupaten Subang	Kec. Blanakan	0,634298694
56.	Kabupaten Subang	Kec. Pamanukan	0,617073632
57.	Kabupaten Subang	Kec. Purwadadi	0,588491387
58.	Kabupaten Subang	Kec. Tanjungsang	0,567291312
59.	Kabupaten Subang	Kec. Binong	0,543630513
60.	Kabupaten Subang	Kec. Cipeundeuy	0,497255347
61.	Kabupaten Subang	kec. Patokbeusi	0,487791028
62.	Kabupaten Subang	Kec. Pagaden	0,460344501
63.	Kabupaten Subang	Kec. Legankolon	0,401097861
64.	Kabupaten Subang	Kec. Cikaum	0,372137043
65.	Kabupaten Subang	Kec. Pabuaran	0

#### 4. Wilayah Priangan

No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks
1.	Kabupaten Bandung	Kec. Batujajar	1
2.	Kabupaten Bandung	Kec. Cilengkrang	0,500678222
3.	Kabupaten Bandung	Kec. Pangalengan	0,49962321
4.	Kabupaten Bandung	Kec. Margaasih	0,497814619
5.	Kabupaten Bandung	Kec. Baleendah	0,460135644
6.	Kabupaten Bandung	Kec. Pasirjambu	0,453353429
7.	Kabupaten Bandung	Kec. Soreang	0,447626225
8.	Kabupaten Bandung	Kec. Ciwidey	0,447023361
9.	Kabupaten Bandung	Kec. Lembang	0,446872645
10.	Kabupaten Bandung	Kec. Cimenyan	0,4426526
11.	Kabupaten Bandung	Kec. Parongpong	0,43933685
12.	Kabupaten Bandung	Kec. Cisarua	0,419593067
13.	Kabupaten Bandung	Kec. Dayeuh Kolot	0,407234363
14.	Kabupaten Bandung	Kec. Padalarang	0,398040693
15.	Kabupaten Bandung	Kec. Rancaekek	0,395478523
16.	Kabupaten Bandung	Kec. Cimaung	0,395327807

No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks
17.	Kabupaten Bandung	Kec. Banjaran	0,3933685
18.	Kabupaten Bandung	Kec. Cipatat	0,360813866
19.	Kabupaten Bandung	Kec. Pameungpeuk	0,358854559
20.	Kabupaten Bandung	Kec. Cililin	0,349058026
21.	Kabupaten Bandung	Kec. Katapang	0,331574981
22.	Kabupaten Bandung	Kec. Cangkuang	0,330670686
23.	Kabupaten Bandung	Kec. Nagreg	0,321477016
24.	Kabupaten Bandung	Kec. Cihampelas	0,3213263
25.	Kabupaten Bandung	Kec. Pacet	0,320271289
26.	Kabupaten Bandung	Kec. Arjasari	0,311981914
27.	Kabupaten Bandung	Kec. Cikancung	0,303843255
28.	Kabupaten Bandung	Kec. Rancabali	0,303541824
29.	Kabupaten Bandung	Kec. Margahayu	0,302034665
30.	Kabupaten Bandung	Kec. Paseh	0,290128109
31.	Kabupaten Bandung	Kec. Cileunyi	0,277618689
32.	Kabupaten Bandung	Kec. Ngamprah	0,27611153
33.	Kabupaten Bandung	Kec. Rongga	0,273549359
34.	Kabupaten Bandung	Kec. Cipeundeuy	0,260437076
35.	Kabupaten Bandung	Kec. Kertasari	0,259834213
36.	Kabupaten Bandung	Kec. Cipongkor	0,248229088
37.	Kabupaten Bandung	Kec. Ciparay	0,237076112
38.	Kabupaten Bandung	Kec. Sindangkerta	0,217332329
39.	Kabupaten Bandung	Kec. Solokanjeruk	0,209947249
40.	Kabupaten Bandung	Kec. Majalaya	0,154182366
41.	Kabupaten Garut	Kec. Cisewu	0,529917106
42.	Kabupaten Garut	Kec. Pamulihan	0,444310475
43.	Kabupaten Garut	Kecamatan Cibiuk	0,427128862
44.	Kabupaten Garut	Kecamatan Talegong	0,37648832
45.	Kabupaten Garut	Kecamatan Karangtengah	0,36654107
46.	Kabupaten Garut	Kecamatan Pangatikan	0,362471741
47.	Kabupaten Garut	Kecamatan Sucinaraja	0,357950264
48.	Kabupaten Garut	Kecamatan Limbangan	0,354634514



50.	Kabupaten Garut	Kecamatan Cihurip	0,350263753
51.	Kabupaten Garut	Kec. Sukawening	0,337754333
52.	Kabupaten Garut	Kecamatan Cigeduk	0,33308214
53.	Kabupaten Garut	Kecamatan Mekarmukti	0,332629992
54.	Kabupaten Garut	Kec. Garut Kota	0,330369254
55.	Kabupaten Garut	KecTarogong Kaler	0,328259231
56.	Kabupaten Garut	Kec. Cisurupan	0,327505652
57.	Kabupaten Garut	Kecamatan Tarogong	0,327053504
58.	Kabupaten Garut	Kec. Peundeuy	0,326299925
59.	Kabupaten Garut	Kec Karangpawitan	0,316503391
60.	Kabupaten Garut	Kecamatan Kersamanah	0,314393369
61.	Kabupaten Garut	Kec. Banjarwangi	0,313338357
62.	Kabupaten Garut	Kec.Cibatu	0,307611153
63.	Kabupaten Garut	Kec. Cilawu	0,30625471
64.	Kabupaten Garut	Kec. Bayongbong	0,300678222
65.	Kabupaten Garut	Kecamatan Sukaresmi	0,278975132
66.	Kabupaten Garut	Kec. Singajaya	0,272192916
67.	Kabupaten Garut	Kec. Cikajang	0,266465712
68.	Kabupaten Garut	Kec.Samarang	0,263903542
69.	Kabupaten Garut	Kecamatan Caringin	0,257121326
70.	Kabupaten Garut	Kecamatan Selawi	0,250640543
71.	Kabupaten Garut	Kecamatan Pasir Wangi	0,221552374
72.	Kabupaten Garut	Kec.Pabedilan	0,193217784
73.	Kabupaten Garut	Kec.Beber	0,19155991
74.	Kabupaten Garut	Kec.Ciwaringin	0,182667671
75.	Kabupaten Garut	Kec Banyuresmi	0,173323286
76.	Kabupaten Garut	Kec.Pabuaran	0,168651093
77.	Kabupaten Garut	Kec.Cirebon Utara	0,151318764
78.	Kabupaten Garut	Kec.Leuwigoong	0,137905049
79.	Kabupaten Garut	Kec Weru	0,111981914



80.	Kabupaten Garut	Kec Wanaraja	0,098568199
81.	Kabupaten Garut	Kec.Kadungora	0,030746044
82.	Kabupaten Garut	Kec.Leles	0
83.	Kabupaten Sumedang	Kecamatan Surian	0,706857573
84.	Kabupaten Sumedang	Kecamatan Tanjung Sari	0,517256971
85.	Kabupaten Sumedang	Kecamatan Jatigede	0,474905803
86.	Kabupaten Sumedang	Kecamatan Cimalaka	0,410550113
87.	Kabupaten Sumedang	Kecamatan Pamulihan	0,401657875
88.	Kabupaten Sumedang	Kecamatan Cisarua	0,390052751
89.	Kabupaten Sumedang	Kecamatan Buahdua	0,383873399
90.	Kabupaten Sumedang	Kecamatan ???????	0,379954785
91.	Kabupaten Sumedang	Kecamatan Jatinangor	0,323285607
92.	Kabupaten Sumedang	Kecamatan Tanjung Medar	0,251243406
93.	Kabupaten Sumedang	Kecamatan Ujung Jaya	0,243858327
94.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Gunungtanjung	0,788093444
95.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Cisayong	0,740768651
96.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Cikalong	0,709721176
97.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Manonjaya	0,66691786
98.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Cikatomas	0,63014318
99.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Ciawi	0,618839488
100.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Cineam	0,606179352
101.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Pancatengah	0,601507159
102.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Sariwangi	0,600452148
103.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Pagerageung	0,596834966
104.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Mangunreja	0,592614921
105.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Karangjaya	0,590203466
106.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Tanjung jaya	0,584476262
107.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Bojonggambir	0,529464959
108.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Taraju	0,489826677
109.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Karangnunggal	0,48786737
110.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Cipatujah	0,44596835
111.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Culamega	0,444762622

No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks
112.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Salopa	0,441597589
113.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Sukaraja	0,423210249
114.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Bantarkalong	0,421250942
115.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Jatiwaras	0,411152977
116.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Padakembang	0,405275057
117.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Mangunreja	0,395478523
118.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Cibalong	0,386737001
119.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Sukarame	0,381461944
120.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Kadipaten	0,375433308
121.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Singaparna	0,371363979
122.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Parungponteng	0,361868877
123.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Sukahening	0,361416729
124.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Leuwisari	0,359457423
125.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Salawu	0,346495855
126.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Rajapolah	0,341070083
127.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Puspahiang	0,320271289
128.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Jamanis	0,31876413
129.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Bojongasih	0,287716654
130.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Sodong Hilir	0,286058779
131.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Sukaratu	0,25440844
132.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Sukaresik	0,235568953
133.	Kota Bandung	Kec. Cibeunying Kaler	0,626224567
134.	Kota Bandung	Kec. Rancasari	0,511077619
135.	Kota Bandung	Kec. Bojongloa Kaler	0,472946496
136.	Kota Bandung	Kec. Cidadap	0,457121326
137.	Kota Bandung	Kec. Bojongloa Kidul	0,436473248
138.	Kota Bandung	Kec. Regol	0,43270535
139.	Kota Bandung	Kec. Ujungberung	0,431801055
140.	Kota Bandung	Kec. Sukasari	0,386586285
141.	Kota Bandung	Kec. Cicendo	0,371816127
142.	Kota Bandung	Kec. Coblong	0,350866616
143.	Kota Bandung	Kec. Bandung Kulon	0,323436323



No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks
144.	Kota Bandung	Kec. Batununggal	0,32057272
145.	Kota Bandung	Kec. Arcamanik	0,309871891
146.	Kota Bandung	Kec. Andir	0,258327054
147.	Kota Bandung	Kec. Bandung Kidul	0,246420497
148.	Kota Bandung	Kec. Babakan Ciparay	0,246269781
149.	Kota Banjar	Kec. Pataruman	0,434061794
150.	Kota Banjar	Kec. Purwahaarja	0,379502638
151.	Kota Banjar	Kec. Banjar	0,262245667
152.	Kota Banjar	Kec. Langensari	0,234815373
153.	Kota Cimahi	Kec. Cimahi Tengah	0,430293896
154.	Kota Cimahi	Kec. Cimahi Utara	0,417332329
155.	Kota Cimahi	Kec. Cimahi Selatan	0,281386586
156.	Kota Tasikmalaya	Kec. Cipedes	0,423662396
157.	Kota Tasikmalaya	Kec. Tawang	0,404370761
158.	Kota Tasikmalaya	Kec. Tamansari	0,3639789
159.	Kota Tasikmalaya	Kec. Cibeureum	0,297362472
160.	Kota Tasikmalaya	Kec. Kawalu	0,245365486
161.	Kota Tasikmalaya	Kec. Indihiang	0,228334589
162.	Kota Tasikmalaya	Kec. Cihideung	0,216729465
163.	Kota Tasikmalaya	Kec. Mangkubumi	0,110776187

## B. Indeks Kinerja Pelayanan (IKP)

### 1. Wilayah Bogor

No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks
1	Kabupaten Bogor	Kec. Cibungbulang	0,847867199
2	Kabupaten Bogor	Kec. Cibinong	0,790502206
3	Kabupaten Bogor	Kec. Citeureup	0,770750158
4	Kabupaten Bogor	Kec. Megamendung	0,749106955
5	Kabupaten Bogor	Kec. Sukaraja	0,616516075
6	Kabupaten Bogor	Kec. Leuwisadeng	0,595083001
7	Kabupaten Bogor	Kec. Bojonggede	0,566925825
8	Kabupaten Bogor	Kec. Jonggol	0,516284934



No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks
9	Kabupaten Bogor	Kec. Tamansari	0,511662114
10	Kabupaten Bogor	Kec. Tenjo	0,495482244
11	Kabupaten Bogor	Kec. Jasinga	0,480563144
12	Kabupaten Bogor	Kec. Leuwiliang	0,45555789
13	Kabupaten Bogor	Kec. Ciseeng	0,448203404
14	Kabupaten Bogor	Kec. Nanggung	0,438117252
15	Kabupaten Bogor	Kec. Rancabungur	0,414793024
16	Kabupaten Bogor	Kec. Tanjurhalang	0,407018281
17	Kabupaten Bogor	Kec. Kemang	0,391258668
18	Kabupaten Bogor	Kec. Kalapanunggal	0,387266232
19	Kabupaten Bogor	Kec. Cigudeg	0,384744694
20	Kabupaten Bogor	Kec. Cogombong	0,381382643
21	Kabupaten Bogor	Kec. Dramaga	0,368985081
22	Kabupaten Bogor	Kec. Babakan Madang	0,337675982
23	Kabupaten Bogor	Kec. Ciawi	0,328430343
24	Kabupaten Bogor	Kec. Caringin	0,317503677
25	Kabupaten Bogor	Kec. Sukamakmur	0,298382013
26	Kabupaten Bogor	Kec. Tanjungsari	0,26875394
27	Kabupaten Bogor	Kec. Cijeruk	0,239546123
28	Kabupaten Bogor	Kec. Gunungsindur	0,231771381
29	Kabupaten Bogor	Kec. Rumpin	0,051691532
30	Kabupaten Cianjur	Kecamatan Pacet	0,456818659
31	Kabupaten Cianjur	Kecamatan Cugenang	0,353435596
32	Kabupaten Cianjur	Kecamatan Cibinong	0,339777264
33	Kabupaten Cianjur	Kecamatan Cipanas	0,337675982
34	Kabupaten Cianjur	Kecamatan Warung Kondang	0,32296701
35	Kabupaten Cianjur	Kecamatan Cilaku	0,270855222
36	Kabupaten Cianjur	Kecamatan Cidaun	0
<b>37</b>	<b>Kabupaten Sukabumi</b>	<b>Kec. Kadudampit</b>	<b>1</b>
38	Kabupaten Sukabumi	Kec. Sukabumi	0,917209498
39	Kabupaten Sukabumi	Kec. Cisolok	0,887371296
40	Kabupaten Sukabumi	Kec. Kabandungan	0,845976045

No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks
41	Kabupaten Sukabumi	Kec. Sagaranten	0,814036562
42	Kabupaten Sukabumi	Kec. Palabuhanratu	0,744063879
43	Kabupaten Sukabumi	Kec. Cikidang	0,697625552
44	Kabupaten Sukabumi	Kec. Cikakak	0,674511452
45	Kabupaten Sukabumi	Kec. Simpenan	0,652447993
46	Kabupaten Sukabumi	Kec. Sukalarang	0,646354276
47	Kabupaten Sukabumi	Kec. Cidolog	0,619457869
48	Kabupaten Sukabumi	Kec. Tegalbuleud	0,611683127
49	Kabupaten Sukabumi	Kec. Cidadap	0,604118512
50	Kabupaten Sukabumi	Kec. Caringin	0,500735449
51	Kabupaten Sukabumi	Kec. Cireunghas	0,475940324
52	Kabupaten Sukabumi	Kec. Cidahu	0,467745325
53	Kabupaten Sukabumi	Kec. Cicurug	0,445471738
54	Kabupaten Sukabumi	Kec. Lengkong	0,435805842
55	Kabupaten Sukabumi	Kec. Nyalindung	0,435385585
56	Kabupaten Sukabumi	Kec. Gunungguruh	0,429291868
57	Kabupaten Sukabumi	Kec. Cibadak	0,417944946
58	Kabupaten Sukabumi	Kec. Pabuaran	0,409329691
59	Kabupaten Sukabumi	Kec. Ciemas	0,385585207
60	Kabupaten Sukabumi	Kec. Kalapanunggal	0,381172515
61	Kabupaten Sukabumi	Kec. Sukaraja	0,374448414
62	Kabupaten Sukabumi	Kec. Curugkembar	0,371926875
63	Kabupaten Sukabumi	Kec. Cikembar	0,359949569
64	Kabupaten Sukabumi	Kec. Ciracap	0,357428031
65	Kabupaten Sukabumi	Kec. Purabaya	0,353645724
66	Kabupaten Sukabumi	Kec. Parakansalak	0,350283673
67	Kabupaten Sukabumi	Kec. Jampangtengah	0,33914688
68	Kabupaten Sukabumi	Kec. Waluran	0,337675982
69	Kabupaten Sukabumi	Kec. Kalibunder	0,334734188
70	Kabupaten Sukabumi	Kec. Cibitung	0,326118933
71	Kabupaten Sukabumi	Kec. Kebonpedes	0,325488548
72	Kabupaten Sukabumi	Kec. Bantargadung	0,303845346



No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks
73	Kabupaten Sukabumi	Kec. Cisaat	0,301113679
74	Kabupaten Sukabumi	Kec. Jampangkulon	0,298171885
75	Kabupaten Sukabumi	Kec. Surade	0,286404707
76	Kabupaten Sukabumi	Kec. Parungkuda	0,259298172
77	Kabupaten Sukabumi	Kec. Warungkiara	0,252153814
78	Kabupaten Sukabumi	Kec. Gegerbitung	0,249632276
79	Kabupaten Sukabumi	Kec. Bojonggenteng	0,173776003
80	Kabupaten Sukabumi	Kec. Nagrak	0,172725362
81	Kabupaten Sukabumi	Kec. Cicantayan	0,150661904
82	Kota Bogor	Kec. Tanah Sareal	0,978146669
83	Kota Bogor	Kec. Bogor Tengah	0,647404917
84	Kota Bogor	Kec. Bogor Selatan	0,609371717
85	Kota Bogor	Kec. Bogor Timur	0,445891994
86	Kota Bogor	Kec. Bogor Barat	0,314351755
87	Kota Bogor	Kec. Bogor Utara	0,175036772
88	Kota Depok	Kecamatan Sawargan	0,798907333
89	Kota Depok	Kecamatan Limo	0,77390208
90	Kota Depok	Kecamatan Sukmajaya	0,399873923
91	Kota Depok	Kecamatan Cimanggis	0,355957134
92	Kota Depok	Kecamatan Beji	0,298171885
93	Kota Depok	Kecamatan Pancoran mas	0,152973314
94	Kota Sukabumi	Kec. Gunung Puyuh	0,768228619
95	Kota Sukabumi	Kec. Cibeureum	0,549485186
96	Kota Sukabumi	Kec. Cikole	0,501155705
97	Kota Sukabumi	Kec. Lembursitu	0,473418785
98	Kota Sukabumi	Kec. Citamiang	0,376969952
99	Kota Sukabumi	Kec. Baros	0,356167262
100	Kota Sukabumi	Kec. Warudoyong	0,355326749

## 2. Wilayah Cirebon

No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks
<b>1.</b>	<b>Kabupaten Cirebon</b>	<b>Kec.Susukan</b>	<b>1</b>
2.	Kabupaten Cirebon	Kec.Pabuaran	0,624006933
3.	Kabupaten Cirebon	Kec.Ciwaringin	0,541094901
4.	Kabupaten Cirebon	Kec Waled	0,520439116
5.	Kabupaten Cirebon	Kec. Pangenan	0,474360826
6.	Kabupaten Cirebon	Kec. Karangsembung	0,44388271
7.	Kabupaten Cirebon	Kec.Karangwareng	0,406760075
8.	Kabupaten Cirebon	Kec. Babakan	0,366748519
9.	Kabupaten Cirebon	Kec.Klangenan	0,288458761
10.	Kabupaten Cirebon	Kec.Beber	0,226202513
11.	Kabupaten Cirebon	Kec. Dukupuntang	0,214213491
12.	Kabupaten Cirebon	Kec. Kedawung	0,193557706
13.	Kabupaten Cirebon	Kec.Panguragan	0,190668785
14.	Kabupaten Cirebon	Kec.Cirebon Utara	0,184024267
15.	Kabupaten Cirebon	Kec. Kaliwedi	0,172901921
16.	Kabupaten Cirebon	Kec.Pabedilan	0,169001878
17.	Kabupaten Cirebon	Kec. Palimanan	0,141846021
18.	Kabupaten Cirebon	Kec. Ciledug	0,12942366
19.	Kabupaten Cirebon	Kec. Astanajapura	0,123645818
20.	Kabupaten Cirebon	Kec. Losari	0,113679041
21.	Kabupaten Cirebon	Kec. Kapetakan	0,094034378
22.	Kabupaten Cirebon	Kec.Gebang	0,048389427
23.	Kabupaten Cirebon	Kec Weru	0,04058934
24.	Kabupaten Cirebon	Kec. Susukanlebak	0,020366893
25.	Kabupaten Indramayu	Kec. Sukagumiwang	0,383070923
26.	Kabupaten Indramayu	Kec. Haurgeulis	0,367326304
27.	Kabupaten Indramayu	Kec. Anjatan	0,324281381
28.	Kabupaten Indramayu	Kec. Bangodua	0,29871443
29.	Kabupaten Indramayu	Kec. Sukra	0,265058501
30.	Kabupaten Indramayu	Kec. Karangampel	0,161924021
31.	Kabupaten Indramayu	Kec. Kandanghaur	0,13419038



No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks
32.	Kabupaten Indramayu	Kec. Krangkeng	0,118156868
33.	Kabupaten Indramayu	Kec. Bongas	0,109923444
34.	Kabupaten Indramayu	Kec. Widasari	0,098801098
35.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Cibingbin	0,554095046
36.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Subang	0,462660696
37.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Jalaksana	0,428426983
38.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Sindang Agung	0,41643796
39.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Kuningan	0,385526506
40.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Karangancana	0,360970677
41.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Ciniru	0,337714863
42.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Hantara	0,321681352
43.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Mandirancan	0,319370215
44.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Japara	0,299725553
45.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Cigandamekar	0,296692185
46.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Lebak Wangi	0,262314026
47.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Ciwaru	0,252780586
48.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Cigugur	0,249169435
49.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Garawangi	0,205257836
50.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Kramatmulya	0,192979922
51.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Luragung	0,191824354
52.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Darma	0,159179546
53.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Selajambe	0,158023978
54.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Kadugede	0,157157302
55.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Kalimanggis	0,155712841
56.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Pasawahan	0,122923588
57.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Pancalang	0,119745775
58.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Cilimus	0,089845443
59.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Nusaherang	0,086956522
60.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Cibeureum	0,071934133
61.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Ciawigebang	0,048967211
62.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Cilebak	0,048389427

64.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Cimahi	0,030189224
65.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Cipicung	0,012711252
66.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Maleber	0
67.	Kabupaten Majalengka	Kec. Cingambul	0,334970389
68.	Kabupaten Majalengka	Kec. Banjaran	0,318070201
69.	Kabupaten Majalengka	Kec. Sukahaji	0,305936733
70.	Kabupaten Majalengka	Kec. Maja	0,303770042
71.	Kabupaten Majalengka	Kec. Rajagaluh	0,246280514
72.	Kabupaten Majalengka	Kec.Cigasong	0,224613607
73.	Kabupaten Majalengka	Kec. Lemahsugih	0,222591362
74.	Kabupaten Majalengka	Kec.Leuwimunding	0,205402282
75.	Kabupaten Majalengka	Kec.Sindangwangi	0,189513217
76.	Kabupaten Majalengka	Kec. Kadipaten	0,175357504
77.	Kabupaten Majalengka	Kec. Talaga	0,148779431
78.	Kabupaten Majalengka	Kec. Dawuan	0,12393471
79.	Kabupaten Majalengka	Kec. Argapura	0,113101257
80.	Kabupaten Majalengka	Kec. Jatitujuh	0,101545573
81.	Kabupaten Majalengka	Kec. Kertajati	0,101112235
82.	Kabupaten Majalengka	Kec.Majalengka	0,086956522
83.	Kabupaten Majalengka	Kec.Bantarujeg	0,056045067
84.	Kabupaten Majalengka	Kec. Palasah	0,034811498
85.	Kota Cirebon	Kec. Lemahwungkuk	0,390148779
86.	Kota Cirebon	Kec. Kesambi	0,359381771
87.	Kota Cirebon	Kec. Harjamukti	0,335114835
88.	Kota Cirebon	Kec. Pekalipan	0,294381049



### 3. Wilayah Purwakarta

No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks
1.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Batujaya	0,62627023
2.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Telukjambe Timur	0,532367332
3.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Cilamaya Wetan	0,474783591
4.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Rawameta	0,372600677
5.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Jayakarta	0,341926985
6.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Tempuran	0,305419646
7.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Tegalwaru	0,277756869
8.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Ciampel	0,275310501
9.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Cibuaya	0,27267595
10.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Kotabaru	0,270417764
11.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Pangkalan	0,270229582
12.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Banyusari	0,260255928
13.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Telagasari	0,248212269
14.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Cikampek	0,242943169
15.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Purwasari	0,211893113
16.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Karawang Timur	0,201543094
17.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Jatisari	0,190816711
18.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Karawang Barat	0,135491155
19.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Tirtamulya	0,111403839
20.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Kutawaluya	0,100489274
21.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Telukjambe Barat	0,100301091
22.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Lemahabang	0,089574708
23.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Pakisjaya	0,084117426
24.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Pedes	0,068310124
25.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Rengasdengklok	0,058901016
26.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Cilebar	0,034060971
27.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Cilamaya Kulon	0,020135491
28.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Majalaya	0
29.	Kabupaten Purwakarta	Kec. Bungursari	1

No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks
30.	Kabupaten Purwakarta	Kec. Plered	0,777192322
31.	Kabupaten Purwakarta	Kec. Pasawahan	0,59578472
32.	Kabupaten Purwakarta	Kec. Pondoksalam	0,562852842
33.	Kabupaten Purwakarta	Kec. Campaka	0,559653745
34.	Kabupaten Purwakarta	Kec. Jatiluhur	0,50263455
35.	Kabupaten Purwakarta	Kec.Bojong	0,365073391
36.	Kabupaten Purwakarta	Kec. Babakancikao	0,323861498
37.	Kabupaten Purwakarta	Kec. Purwakarta	0,27963869
38.	Kabupaten Purwakarta	Kec. Darangdan	0,22299586
39.	Kabupaten Purwakarta	Kec. Maniis	0,190628528
40.	Kabupaten Purwakarta	Kec. Tegalwaru	0,187053067
41.	Kabupaten Purwakarta	Kec.Sukasari	0,162589387
42.	Kabupaten Purwakarta	Kec. Kiarapedes	0,130410237
43.	Kabupaten Purwakarta	Kec. Sukatani	0,125893865
44.	Kabupaten Purwakarta	Kec. Cibat	0,120060218
45.	Kabupaten Purwakarta	Kec. Wanayasa	0,104064735
46.	Kabupaten Subang	Kec. Comprang	0,573014678
47.	Kabupaten Subang	Kec. Ciasem	0,496800903
48.	Kabupaten Subang	Kec. Cisalak	0,442039895
49.	Kabupaten Subang	Kec. Tanjungsiang	0,437523523
50.	Kabupaten Subang	Kec. Pusakanagara	0,40854347
51.	Kabupaten Subang	Kec. Blanakan	0,30748965
52.	Kabupaten Subang	Kec. Kalijati	0,299774181
53.	Kabupaten Subang	kec. Patokbeusi	0,280955965
54.	Kabupaten Subang	Kec. Pamanukan	0,259503199
55.	Kabupaten Subang	Kec. Cikaum	0,231652239
56.	Kabupaten Subang	Kec. Binong	0,214339481
57.	Kabupaten Subang	Kec. Sagalaherang	0,199096726
58.	Kabupaten Subang	Kec. Cipeundeuy	0,198908543
59.	Kabupaten Subang	Kec. Legankolon	0,176514866
60.	Kabupaten Subang	Kec. Cibogo	0,175385773
61.	Kabupaten Subang	Kec. Purwadadi	0,17425668



No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks
62.	Kabupaten Subang	Kec. Cijambe	0,145652992
63.	Kabupaten Subang	Kec. Cipunagara	0,136620248
64.	Kabupaten Subang	Kec. Pabuaran	0,109710199
65.	Kabupaten Subang	Kec. Pagaden	0,024087317

#### 4. Wilayah Priangan

No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks
<b>1.</b>	<b>Kabupaten Bandung</b>	<b>Kec. Margahayu</b>	<b>1</b>
2.	Kabupaten Bandung	Kec. Cipongkor	0,664877664
3.	Kabupaten Bandung	Kec. Rancabali	0,472454617
4.	Kabupaten Bandung	Kec. Parongpong	0,379479084
5.	Kabupaten Bandung	Kec. Majalaya	0,373954223
6.	Kabupaten Bandung	Kec. Pasirjambu	0,358484609
7.	Kabupaten Bandung	Kec. Cililin	0,349960537
8.	Kabupaten Bandung	Kec. Pameungpeuk	0,337016575
9.	Kabupaten Bandung	Kec. Nagreg	0,330702447
10.	Kabupaten Bandung	Kec. Dayeuh Kolot	0,327229676
11.	Kabupaten Bandung	Kec. Cihampelas	0,325493291
12.	Kabupaten Bandung	Kec. Arjasari	0,289029203
13.	Kabupaten Bandung	Kec. Paseh	0,26519337
14.	Kabupaten Bandung	Kec. Cisarua	0,259984215
15.	Kabupaten Bandung	Kec. Cangkuang	0,257458564
16.	Kabupaten Bandung	Kec. Margaasih	0,242936069
17.	Kabupaten Bandung	Kec. Cilengkrang	0,239305446
18.	Kabupaten Bandung	Kec. Rancaekek	0,235201263
19.	Kabupaten Bandung	Kec. Cipeundeuy	0,231570639
20.	Kabupaten Bandung	Kec. Pacet	0,21973165
21.	Kabupaten Bandung	Kec. Padalarang	0,212943962
22.	Kabupaten Bandung	Kec. Ciwidey	0,206314128
23.	Kabupaten Bandung	Kec. Cimenyan	0,202841358
24.	Kabupaten Bandung	Kec. Cipatat	0,200631413
25.	Kabupaten Bandung	Kec. Sindangkerta	0,20047356

No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks
26.	Kabupaten Bandung	Kec. Lembang	0,197947908
27.	Kabupaten Bandung	Kec. Batujajar	0,19210734
28.	Kabupaten Bandung	Kec. Cikancung	0,189423836
29.	Kabupaten Bandung	Kec. Pangalengan	0,188792423
30.	Kabupaten Bandung	Kec. Cimaung	0,176637727
31.	Kabupaten Bandung	Kec. Ngamprah	0,16543015
32.	Kabupaten Bandung	Kec. Solokanjeruk	0,16101026
33.	Kabupaten Bandung	Kec. Cileunyi	0,156906077
34.	Kabupaten Bandung	Kec. Katapang	0,139857932
35.	Kabupaten Bandung	Kec. Baleendah	0,131649566
36.	Kabupaten Bandung	Kec. Kertasari	0,121704815
37.	Kabupaten Bandung	Kec. Rongga	0,11207577
38.	Kabupaten Bandung	Kec. Ciparay	0,06866614
39.	Kabupaten Bandung	Kec. Banjaran	0,059352802
40.	Kabupaten Bandung	Kec. Soreang	0
41.	Kabupaten Garut	Kec. Peundeuy	0,758800316
42.	Kabupaten Garut	Kec. Sukawening	0,583425414
43.	Kabupaten Garut	Kec. Garut Kota	0,576322021
44.	Kabupaten Garut	Kecamatan Sukaresmi	0,570165746
45.	Kabupaten Garut	Kec.Pabuaran	0,540805051
46.	Kabupaten Garut	Kecamatan Mekarmukti	0,521389108
47.	Kabupaten Garut	Kecamatan Cigeduk	0,419415943
48.	Kabupaten Garut	Kecamatan Karangtengah	0,418626677
49.	Kabupaten Garut	Kecamatan Cihurip	0,373954223
50.	Kabupaten Garut	Kec. Pamulihan	0,359431728
51.	Kabupaten Garut	Kec. Cisewu	0,303235991
52.	Kabupaten Garut	Kecamatan Sucinaraja	0,302920284
53.	Kabupaten Garut	Kecamatan Tarogong	0,298816101
54.	Kabupaten Garut	Kecamatan Pangatikan	0,29581689
55.	Kabupaten Garut	Kec. Bayongbong	0,291239148
56.	Kabupaten Garut	Kecamatan Cibiuk	0,28887135
57.	Kabupaten Garut	Kecamatan Limbangan	0,281452249



No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks
58.	Kabupaten Garut	Kec. Cikajang	0,256669298
59.	Kabupaten Garut	Kecamatan Caringin	0,248934491
60.	Kabupaten Garut	Kec. Cisurupan	0,247513812
61.	Kabupaten Garut	Kecamatan Kersamanah	0,242304657
62.	Kabupaten Garut	Kec. Malangbong	0,237411208
63.	Kabupaten Garut	Kec Wanaraja	0,220363062
64.	Kabupaten Garut	KecTarogong Kaler	0,216101026
65.	Kabupaten Garut	Kec. Banjarwangi	0,209313339
66.	Kabupaten Garut	Kec.Leles	0,206629834
67.	Kabupaten Garut	Kec.Samarang	0,200789266
68.	Kabupaten Garut	Kec Karangpawitan	0,198105762
69.	Kabupaten Garut	Kecamatan Talegong	0,188003157
70.	Kabupaten Garut	Kec Banyuresmi	0,166692976
71.	Kabupaten Garut	Kec. Singajaya	0,159431728
72.	Kabupaten Garut	Kec.Cibatu	0,156906077
73.	Kabupaten Garut	Kec.Ciwaringin	0,146803473
74.	Kabupaten Garut	Kec.Pabedilan	0,143962115
75.	Kabupaten Garut	Kec. Cilawu	0,135595896
76.	Kabupaten Garut	Kec.Kadungora	0,135438043
77.	Kabupaten Garut	Kecamatan Pasir Wangi	0,134964483
78.	Kabupaten Garut	Kec.Beber	0,123283346
79.	Kabupaten Garut	Kecamatan Selawi	0,117442778
80.	Kabupaten Garut	Kec.Leuwigoong	0,109550118
81.	Kabupaten Garut	Kec Weru	0,093606946
82.	Kabupaten Garut	Kec.Cirebon Utara	0,026835043
83.	Kabupaten Sumedang	Kecamatan Surian	0,816890292
84.	Kabupaten Sumedang	Kecamatan Tanjung Sari	0,453196527
85.	Kabupaten Sumedang	Kecamatan Jatigede	0,41136543
86.	Kabupaten Sumedang	Kecamatan Tanjung Medar	0,409944751
87.	Kabupaten Sumedang	Kecamatan Pamulihan	0,338595107
88.	Kabupaten Sumedang	Kecamatan ???????	0,325019732
89.	Kabupaten Sumedang	Kecamatan Cisarua	0,286661405

No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks
90.	Kabupaten Sumedang	Kecamatan Ujung Jaya	0,260615627
91.	Kabupaten Sumedang	Kecamatan Cimalaka	0,208524073
92.	Kabupaten Sumedang	Kecamatan Jatinangor	0,2074191
93.	Kabupaten Sumedang	Kecamatan Buahdua	0,167482242
94.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Ciawi	0,616732439
95.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Sukaratu	0,583267561
96.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Cineam	0,506708761
97.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Culamega	0,463299132
98.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Bojonggambir	0,445303867
99.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Karangjaya	0,385003946
100.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Mangunreja	0,38121547
101.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Sukaresik	0,379005525
102.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Cikatomas	0,315864246
103.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Cipatujah	0,313812155
104.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Sukaraja	0,311444357
105.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Salawu	0,298342541
106.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Parungponteng	0,298342541
107.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Kadipaten	0,293291239
108.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Jamanis	0,292659826
109.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Sukrame	0,289029203
110.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Karangnunggal	0,28097869
111.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Singaparna	0,272928177
112.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Leuwisari	0,270718232
113.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Pagerageung	0,259194949
114.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Bantarkalong	0,250986582
115.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Pancatengah	0,245619574
116.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Cibalong	0,244672455
117.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Tanjung jaya	0,236464088
118.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Salopa	0,220047356
119.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Cisayong	0,214048934
120.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Cikalong	0,211207577
121.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Taraju	0,206156275



No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks
122.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Sariwangi	0,204104183
123.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Bojongasih	0,194001579
124.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Rajapolah	0,173480663
125.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Sukahening	0,170481452
126.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Manonjaya	0,168113654
127.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Puspahiang	0,16148382
128.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Jatiwaras	0,16101026
129.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Padakembang	0,152801894
130.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Sodong Hilir	0,148697711
131.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Mangunreja	0,144751381
132.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Gunungtanjung	0,136858721
133.	Kota Bandung	Kec. Sukasari	0,851933702
134.	Kota Bandung	Kec. Cidada	0,639936859
135.	Kota Bandung	Kec. Cicendo	0,63409629
136.	Kota Bandung	Kec. Regol	0,571112865
137.	Kota Bandung	Kec. Coblong	0,477821626
138.	Kota Bandung	Kec. Cibeunying Kaler	0,477348066
139.	Kota Bandung	Kec. Rancasari	0,334964483
140.	Kota Bandung	Kec. Bojongloa Kaler	0,302762431
141.	Kota Bandung	Kec. Andir	0,285556433
142.	Kota Bandung	Kec. Bojongloa Kidul	0,242778216
143.	Kota Bandung	Kec. Batununggal	0,229202841
144.	Kota Bandung	Kec. Ujungberung	0,201736385
145.	Kota Bandung	Kec. Bandung Kulon	0,158642463
146.	Kota Bandung	Kec. Babakan Ciparay	0,130544594
147.	Kota Bandung	Kec. Arcamanik	0,122494081
148.	Kota Bandung	Kec. Bandung Kidul	0,093291239
149.	Kota Banjar	Kec. Purwaharja	0,347434886
150.	Kota Banjar	Kec. Pataruman	0,282083662
151.	Kota Banjar	Kec. Banjar	0,181057616
152.	Kota Banjar	Kec. Langensari	0,063141279
153.	Kota Cimahi	Kec. Cimahi Tengah	0,555011839

No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks
154.	Kota Cimahi	Kec. Cimahi Utara	0,30765588
155.	Kota Cimahi	Kec. Cimahi Selatan	0,167008682
156.	Kota Tasikmalaya	Kec. Tawang	0,569218627
157.	Kota Tasikmalaya	Kec. Indihiang	0,338595107
158.	Kota Tasikmalaya	Kec. Kawalu	0,291397001
159.	Kota Tasikmalaya	Kec. Cihideung	0,278453039
160.	Kota Tasikmalaya	Kec. Mangkubumi	0,274664562
161.	Kota Tasikmalaya	Kec. Tamansari	0,250828729
162.	Kota Tasikmalaya	Kec. Cipedes	0,229360695
163.	Kota Tasikmalaya	Kec. Cibeureum	0,15406472

### C. Indeks Kinerja Indikator Makro Pembangunan (IKMP)

#### 1. Wilayah Bogor

No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks
<b>1.</b>	<b>Kabupaten Bogor</b>	<b>Kec. Megamendung</b>	<b>1</b>
2.	Kabupaten Bogor	Kec. Cibinong	0,596044499
3.	Kabupaten Bogor	Kec. Nanggung	0,57354759
4.	Kabupaten Bogor	Kec. Ciseeng	0,532262052
5.	Kabupaten Bogor	Kec. Sukaraja	0,521137206
6.	Kabupaten Bogor	Kec. Tanjungsari	0,476637824
7.	Kabupaten Bogor	Kec. Cogombong	0,430407911
8.	Kabupaten Bogor	Kec. Leuwiliang	0,426946848
9.	Kabupaten Bogor	Kec. Kalapanunggal	0,419777503
10.	Kabupaten Bogor	Kec. Citeureup	0,418046972
11.	Kabupaten Bogor	Kec. Tanjurhalang	0,382694685
12.	Kabupaten Bogor	Kec. Tenjo	0,338936959
13.	Kabupaten Bogor	Kec. Cigudeg	0,329542645
14.	Kabupaten Bogor	Kec. Bojonggede	0,323856613
15.	Kabupaten Bogor	Kec. Rancabungur	0,322126082
16.	Kabupaten Bogor	Kec. Ciawi	0,317676143
17.	Kabupaten Bogor	Kec. Cibungbulang	0,305315204
18.	Kabupaten Bogor	Kec. Sukamakmur	0,283065513



No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks
19.	Kabupaten Bogor	Kec. Babakan Madang	0,282076638
20.	Kabupaten Bogor	Kec. Kemang	0,264771323
21.	Kabupaten Bogor	Kec. Jonggol	0,260321384
22.	Kabupaten Bogor	Kec. Leuwisadeng	0,212113721
23.	Kabupaten Bogor	Kec. Dramaga	0,168850433
24.	Kabupaten Bogor	Kec. Cijeruk	0,168603214
25.	Kabupaten Bogor	Kec. Tamansari	0,161433869
26.	Kabupaten Bogor	Kec. Jasinga	0,151792336
27.	Kabupaten Bogor	Kec. Caringin	0,134487021
28.	Kabupaten Bogor	Kec. Gunungsindur	0,025216316
29.	Kabupaten Bogor	Kec. Rumpin	0
30.	Kabupaten Cianjur	Kecamatan Cilaku	0,409888752
31.	Kabupaten Cianjur	Kecamatan Pacet	0,29394314
32.	Kabupaten Cianjur	Kecamatan Cugenang	0,249938195
33.	Kabupaten Cianjur	Kecamatan Cipanas	0,2368356
34.	Kabupaten Cianjur	Kecamatan Cibinong	0,189122373
35.	Kabupaten Cianjur	Kecamatan Warung Kondang	0,156983931
36.	Kabupaten Cianjur	Kecamatan Cidaun	0,023980222
37.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Sagaranten	0,829171817
38.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Kalapanunggal	0,827935723
39.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Surade	0,747095179
40.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Cibadak	0,585414091
41.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Cisaat	0,559950556
42.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Tegalbuleud	0,549814586
43.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Cikembar	0,524351051
44.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Cidadap	0,506551298
45.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Gegerbitung	0,505315204
46.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Warungkiara	0,486526576
47.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Cicurug	0,474412855
48.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Waluran	0,462051916
49.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Cidolog	0,444499382
50.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Cisolok	0,405438813

No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks
51.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Lengkong	0,391347342
52.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Parakansalak	0,38368356
53.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Nyalindung	0,383436341
54.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Palabuhanratu	0,383436341
55.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Curugkembar	0,380469716
56.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Sukaraja	0,37750309
57.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Kadudampit	0,375772559
58.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Sukabumi	0,360444994
59.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Simpenan	0,343634116
60.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Purabaya	0,33868974
61.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Parungkuda	0,327070457
62.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Sukalarang	0,309517923
63.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Jampangkulon	0,29394314
64.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Kebonpedes	0,288998764
65.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Kabandungan	0,288009889
66.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Cikidang	0,2815822
67.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Pabuaran	0,272929543
68.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Cicantayan	0,272682324
69.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Nagrak	0,261557478
70.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Cireunghas	0,242274413
71.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Ciracap	0,241038319
72.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Kalibunder	0,221260816
73.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Jampangtengah	0,217799753
74.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Bojonggenteng	0,217552534
75.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Ciemas	0,214585909
76.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Cibitung	0,208652658
77.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Cidahu	0,202719407
78.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Caringin	0,152039555
79.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Cikakak	0,14684796
80.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Bantargadung	0,110754017
81.	Kabupaten Sukabumi	Kec. Gunungguruh	0,043757726
82.	Kota Bogor	Kec. Bogor Tengah	0,63461063



No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks
83.	Kota Bogor	Kec. Tanah Sareal	0,617305315
84.	Kota Bogor	Kec. Bogor Selatan	0,541656366
85.	Kota Bogor	Kec. Bogor Timur	0,400247219
86.	Kota Bogor	Kec. Bogor Barat	0,25512979
87.	Kota Bogor	Kec. Bogor Utara	0,065760198
88.	Kota Depok	Kecamatan Sukmajaya	0,808899876
89.	Kota Depok	Kecamatan Beji	0,318170581
90.	Kota Depok	Kecamatan Limo	0,283065513
91.	Kota Depok	Kecamatan Cimanggis	0,234116193
92.	Kota Depok	Kecamatan Sawargan	0,076390606
93.	Kota Depok	Kecamatan Pancoran mas	0,050432633
94.	Kota Sukabumi	Kec. Warudoyong	0,547095179
95.	Kota Sukabumi	Kec. Cikole	0,488257108
96.	Kota Sukabumi	Kec. Lembursitu	0,483559951
97.	Kota Sukabumi	Kec. Gunung Puyuh	0,466996292
98.	Kota Sukabumi	Kec. Baros	0,352039555
99.	Kota Sukabumi	Kec. Citamiang	0,229666255
100.	Kota Sukabumi	Kec. Cibeureum	0,168850433

## 2. Wilayah Cirebon

No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks
1.	Kabupaten Cirebon	Kec.Susukan	0,859957776
1.	Kabupaten Cirebon	Kec.Klangenan	0,549964814
2.	Kabupaten Cirebon	Kec. Kapetakan	0,501759324
3.	Kabupaten Cirebon	Kec.Gebang	0,490851513
4.	Kabupaten Cirebon	Kec Weru	0,45531316
5.	Kabupaten Cirebon	Kec.Ciwaringin	0,396199859
6.	Kabupaten Cirebon	Kec.Cirebon Utara	0,386347643
7.	Kabupaten Cirebon	Kec.Beber	0,383532723
8.	Kabupaten Cirebon	Kec. Babakan	0,380014075
9.	Kabupaten Cirebon	Kec.Pabuaran	0,372273047
10.	Kabupaten Cirebon	Kec. Pangenan	0,346586911

No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks
11.	Kabupaten Cirebon	Kec.Pabedilan	0,340957072
12.	Kabupaten Cirebon	Kec. Losari	0,337790289
13.	Kabupaten Cirebon	Kec. Kedawung	0,330752991
14.	Kabupaten Cirebon	Kec. Karangsembung	0,307529909
15.	Kabupaten Cirebon	Kec. Astanajapura	0,244546094
16.	Kabupaten Cirebon	Kec.Karangwareng	0,227304715
17.	Kabupaten Cirebon	Kec. Susukanlebak	0,22695285
18.	Kabupaten Cirebon	Kec.Panguragan	0,215341309
19.	Kabupaten Cirebon	Kec. Kaliwedi	0,211470795
20.	Kabupaten Cirebon	Kec. Ciledug	0,210063336
21.	Kabupaten Cirebon	Kec Waled	0,139690359
22.	Kabupaten Cirebon	Kec. Dukupuntang	0,129134412
23.	Kabupaten Cirebon	Kec. Palimanan	0,125615764
24.	Kabupaten Indramayu	Kec. Sukra	0,749472203
25.	Kabupaten Indramayu	Kec. Anjatan	0,474665728
26.	Kabupaten Indramayu	Kec. Haurgeulis	0,445812808
27.	Kabupaten Indramayu	Kec. Bangodua	0,42505278
28.	Kabupaten Indramayu	Kec. Widasari	0,407107671
29.	Kabupaten Indramayu	Kec. Karangampel	0,39268121
30.	Kabupaten Indramayu	Kec. Bongas	0,306122449
31.	Kabupaten Indramayu	Kec. Sukagumiwang	0,277973258
32.	Kabupaten Indramayu	Kec. Krangkeng	0,245953554
33.	Kabupaten Indramayu	Kec. Kandanghaur	0,240323716
34.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Japara	0,917663617
35.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Nusaherang	0,824771288
36.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Jalaksana	0,770935961
37.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Ciniru	0,759676284
38.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Ciwaru	0,725545391
39.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Subang	0,719211823
40.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Garawangi	0,66643209
41.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Darma	0,6052076
42.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Selajambe	0,57635468



No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks
43.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Cilimus	0,572132301
44.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Kramatmulya	0,555242787
45.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Kadugede	0,522871217
46.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Cimahi	0,516185785
47.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Cibeureum	0,47044335
48.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Cigandamekar	0,469387755
49.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Sindang Agung	0,467980296
50.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Pasawahan	0,459887403
51.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Cibingbin	0,43947924
52.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Mandirancan	0,424700915
53.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Luragung	0,416959887
54.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Maleber	0,412385644
55.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Cigugur	0,401829697
56.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Cipicung	0,366643209
57.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Hantara	0,358550317
58.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Karangkencana	0,358198452
59.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Cilebak	0,355735398
60.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Kuningan	0,313511612
61.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Ciawigebang	0,290640394
62.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Lebak Wangi	0,254750176
63.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Cidahu	0,181914145
64.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Pancalang	0,163969036
65.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Kalimanggis	0
<b>66.</b>	<b>Kabupaten Majalengka</b>	<b>Kec. Sukahaji</b>	<b>1</b>
67.	Kabupaten Majalengka	Kec. Maja	0,761787474
68.	Kabupaten Majalengka	Kec. Lemahsugih	0,536945813
69.	Kabupaten Majalengka	Kec. Banjaran	0,476425053
70.	Kabupaten Majalengka	Kec. Jatitujuh	0,47114708
71.	Kabupaten Majalengka	Kec. Talaga	0,437368051
72.	Kabupaten Majalengka	Kec.Cigasong	0,435960591
73.	Kabupaten Majalengka	Kec.Leuwimunding	0,434553132

No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks
74.	Kabupaten Majalengka	Kec.Sindangwangi	0,415904293
75.	Kabupaten Majalengka	Kec. Rajagaluh	0,357494722
76.	Kabupaten Majalengka	Kec.Majalengka	0,31703026
77.	Kabupaten Majalengka	Kec. Palasah	0,305418719
78.	Kabupaten Majalengka	Kec. Kadipaten	0,30401126
79.	Kabupaten Majalengka	Kec. Dawuan	0,293455313
80.	Kabupaten Majalengka	Kec.Bantarujeg	0,19669247
81.	Kabupaten Majalengka	Kec. Cingambul	0,186136524
82.	Kabupaten Majalengka	Kec. Argapura	0,100985222
83.	Kabupaten Majalengka	Kec. Kertajati	0,076002815
84.	Kota Cirebon	Kec. Pekalipan	0,963406052
85.	Kota Cirebon	Kec. Lemahwungkuk	0,302955665
86.	Kota Cirebon	Kec. Harjamukti	0,276565799
87.	Kota Cirebon	Kec. Kesambi	0,114707952

### 3. Wilayah Purwakarta

No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks
1.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Tirtamulya	0,876017048
2.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Cikampek	0,829523441
3.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Telagasari	0,815962805
4.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Ciampel	0,796977916
5.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Jayakarta	0,772181325
6.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Banyusari	0,765207284
7.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Telukjambe Timur	0,708252615
8.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Purwasari	0,698566447
9.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Rawameta	0,631538164
10.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Tempuran	0,628826036
11.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Cilamaya Kulon	0,616427741
12.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Karawang Timur	0,598992639
13.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Telukjambe Barat	0,554436265
14.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Pedes	0,524990314



No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks
15.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Kotabaru	0,488957768
16.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Jatisari	0,460674157
17.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Lemahabang	0,444788842
18.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Pangkalan	0,368849283
19.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Kutawaluya	0,342502906
20.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Cibuaya	0,333591631
21.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Tegalwaru	0,321580783
22.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Batujaya	0,311119721
23.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Cilamaya Wetan	0,286323131
24.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Karawang Barat	0,255714839
25.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Majalaya	0,232468036
26.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Pakisjaya	0,213870593
27.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Cilebar	0,163502518
28.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Rengasdengklok	0,087175513
29.	Kabupaten Purwakarta	Kec. Purwakarta	0,795815575
30.	Kabupaten Purwakarta	Kec. Darangdan	0,662921348
31.	Kabupaten Purwakarta	Kec. Wanayasa	0,597830298
32.	Kabupaten Purwakarta	Kec. Pondoksalam	0,514529252
33.	Kabupaten Purwakarta	Kec. Tegalwaru	0,492832236
34.	Kabupaten Purwakarta	Kec. Sukasari	0,466485858
35.	Kabupaten Purwakarta	Kec. Plered	0,418442464
36.	Kabupaten Purwakarta	Kec. Bungursari	0,378922898
37.	Kabupaten Purwakarta	Kec. Babakancikao	0,361487795
38.	Kabupaten Purwakarta	Kec. Sukatani	0,304533127
39.	Kabupaten Purwakarta	Kec. Cibatu	0,282448663
40.	Kabupaten Purwakarta	Kec. Jatiluhur	0,266175901
41.	Kabupaten Purwakarta	Kec. Maniis	0,244866331
42.	Kabupaten Purwakarta	Kec. Bojong	0,165827199
43.	Kabupaten Purwakarta	Kec. Kiarapedes	0,153428904
44.	Kabupaten Purwakarta	Kec. Campaka	0,125532739
45.	Kabupaten Purwakarta	Kec. Pasawahan	0,118171251

No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks
46.	Kabupaten Subang	Kec. Cisalak	1
47.	Kabupaten Subang	Kec. Kalijati	0,97985277
48.	Kabupaten Subang	Kec. Pusakanagara	0,890352577
49.	Kabupaten Subang	Kec. Sagalaherang	0,770631538
50.	Kabupaten Subang	Kec. Pagaden	0,743122821
51.	Kabupaten Subang	Kec. Comprang	0,736923673
52.	Kabupaten Subang	Kec. Pamanukan	0,710964742
53.	Kabupaten Subang	Kec. Cibogo	0,676094537
54.	Kabupaten Subang	Kec. Cipunagara	0,659821775
55.	Kabupaten Subang	Kec. Ciasem	0,535451375
56.	Kabupaten Subang	Kec. Purwadadi	0,530802015
57.	Kabupaten Subang	Kec. Tanjungsiang	0,501356064
58.	Kabupaten Subang	Kec. Pabuaran	0,456024797
59.	Kabupaten Subang	Kec. Blanakan	0,447113522
60.	Kabupaten Subang	Kec. Cijambe	0,43316544
61.	Kabupaten Subang	Kec. Cipeundeuy	0,277799303
62.	Kabupaten Subang	Kec. Binong	0,269662921
63.	Kabupaten Subang	Kec. Legankolon	0,267725688
64.	Kabupaten Subang	kec. Patokbeusi	0,196822937
65.	Kabupaten Subang	Kec. Cikaum	0,023246804

#### 4. Wilayah Priangan

No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks
1.	Kabupaten Bandung	Kec. Margahayu	0,590718105
2.	Kabupaten Bandung	Kec. Cipongkor	0,451298701
3.	Kabupaten Bandung	Kec. Cihampelas	0,440412529
4.	Kabupaten Bandung	Kec. Arjasari	0,407944996
5.	Kabupaten Bandung	Kec. Ngamprah	0,377005348
6.	Kabupaten Bandung	Kec. Pameungpeuk	0,365928189
7.	Kabupaten Bandung	Kec. Cisarua	0,36038961
8.	Kabupaten Bandung	Kec. Parongpong	0,334033613
9.	Kabupaten Bandung	Kec. Pacet	0,333651642



No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks
10.	Kabupaten Bandung	Kec. Rancaekek	0,327540107
11.	Kabupaten Bandung	Kec. Rancabali	0,317226891
12.	Kabupaten Bandung	Kec. Katapang	0,317035905
13.	Kabupaten Bandung	Kec. Cilengkrang	0,315508021
14.	Kabupaten Bandung	Kec. Margaasih	0,310542399
15.	Kabupaten Bandung	Kec. Baleendah	0,286096257
16.	Kabupaten Bandung	Kec. Sindangkerta	0,28342246
17.	Kabupaten Bandung	Kec. Cililin	0,283040489
18.	Kabupaten Bandung	Kec. Padalarang	0,279220779
19.	Kabupaten Bandung	Kec. Paseh	0,278074866
20.	Kabupaten Bandung	Kec. Cipeundeuy	0,277692895
21.	Kabupaten Bandung	Kec. Nagreg	0,277119939
22.	Kabupaten Bandung	Kec. Pasirjambu	0,260504202
23.	Kabupaten Bandung	Kec. Ciwidey	0,258976318
24.	Kabupaten Bandung	Kec. Ciparay	0,237585943
25.	Kabupaten Bandung	Kec. Dayeuh Kolot	0,234530176
26.	Kabupaten Bandung	Kec. Pangalengan	0,232811306
27.	Kabupaten Bandung	Kec. Solokanjeruk	0,215622613
28.	Kabupaten Bandung	Kec. Cimaung	0,20473644
29.	Kabupaten Bandung	Kec. Cangkuang	0,203590527
30.	Kabupaten Bandung	Kec. Batujajar	0,195187166
31.	Kabupaten Bandung	Kec. Banjaran	0,187547746
32.	Kabupaten Bandung	Kec. Cimenyan	0,183537051
33.	Kabupaten Bandung	Kec. Majalaya	0,177807487
34.	Kabupaten Bandung	Kec. Cipatat	0,176852559
35.	Kabupaten Bandung	Kec. Soreang	0,168258212
36.	Kabupaten Bandung	Kec. Rongga	0,151642475
37.	Kabupaten Bandung	Kec. Lembang	0,113445378
38.	Kabupaten Bandung	Kec. Kertasari	0,102941176
39.	Kabupaten Bandung	Kec. Cikancung	0,032467532
40.	Kabupaten Bandung	Kec. Cileunyi	0,026928953
41.	Kabupaten Garut	Kec.Ciwaringin	0,506111536

No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks
42.	Kabupaten Garut	Kecamatan Cibiuk	0,441176471
43.	Kabupaten Garut	Kec. Sukawening	0,422077922
44.	Kabupaten Garut	Kecamatan Cihurip	0,383880825
45.	Kabupaten Garut	Kec Weru	0,380825057
46.	Kabupaten Garut	Kec. Leles	0,349503438
47.	Kabupaten Garut	Kec. Cisewu	0,320282659
48.	Kabupaten Garut	Kecamatan Talegong	0,313407181
49.	Kabupaten Garut	Kecamatan Selawi	0,308632544
50.	Kabupaten Garut	Kecamatan Limbangan	0,299274255
51.	Kabupaten Garut	Kec. Banjarwangi	0,296600458
52.	Kabupaten Garut	Kec. Pabedilan	0,292589763
53.	Kabupaten Garut	Kec. Garut Kota	0,285714286
54.	Kabupaten Garut	Kecamatan Karangtengah	0,284568373
55.	Kabupaten Garut	Kec. Peundeuy	0,277119939
56.	Kabupaten Garut	Kecamatan Sukaresmi	0,266233766
57.	Kabupaten Garut	Kecamatan Tarogong	0,265278839
58.	Kabupaten Garut	Kecamatan Mekarmukti	0,263368984
59.	Kabupaten Garut	Kec. Pabuaran	0,258785332
60.	Kabupaten Garut	Kecamatan Pasir Wangi	0,254774637
61.	Kabupaten Garut	Kecamatan Caringin	0,253628724
62.	Kabupaten Garut	Kec Tarogong Kaler	0,243888464
63.	Kabupaten Garut	Kec. Beber	0,241405653
64.	Kabupaten Garut	Kec. Cibat	0,240068755
65.	Kabupaten Garut	Kec. Singajaya	0,237585943
66.	Kabupaten Garut	Kecamatan Pangatikan	0,235867074
67.	Kabupaten Garut	Kec. Leuwigoong	0,228227655
68.	Kabupaten Garut	Kec. Cikajang	0,221161192
69.	Kabupaten Garut	Kec Karangpawitan	0,220970206
70.	Kabupaten Garut	Kecamatan Cigeduk	0,22039725
71.	Kabupaten Garut	Kec. Pamulihan	0,21657754
72.	Kabupaten Garut	Kec. Kadungora	0,215431627
73.	Kabupaten Garut	Kec. Bayongbong	0,212566845



No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks
74.	Kabupaten Garut	Kec. Cilawu	0,211038961
75.	Kabupaten Garut	Kec. Cisurupan	0,21065699
76.	Kabupaten Garut	Kec. Malangbong	0,206455309
77.	Kabupaten Garut	Kec Wanaraja	0,204163484
78.	Kabupaten Garut	Kecamatan Kersamanah	0,199197861
79.	Kabupaten Garut	Kecamatan Sucinaraja	0,195760122
80.	Kabupaten Garut	Kec Banyuresmi	0,177425516
81.	Kabupaten Garut	Kec.Samarang	0,176661574
82.	Kabupaten Garut	Kec.Cirebon Utara	0,17131398
<b>83.</b>	<b>Kabupaten Sumedang</b>	<b>Kecamatan Buahdua</b>	<b>1</b>
84.	Kabupaten Sumedang	Kecamatan Cimalaka	0,740832697
85.	Kabupaten Sumedang	Kecamatan Tanjung Medar	0,387509549
86.	Kabupaten Sumedang	Kecamatan Surian	0,383880825
87.	Kabupaten Sumedang	Kecamatan ???????	0,361726509
88.	Kabupaten Sumedang	Kecamatan Tanjung Sari	0,343009931
89.	Kabupaten Sumedang	Kecamatan Ujung Jaya	0,339381207
90.	Kabupaten Sumedang	Kecamatan Jatigede	0,243888464
91.	Kabupaten Sumedang	Kecamatan Jatinangor	0,20091673
92.	Kabupaten Sumedang	Kecamatan Cisarua	0,198242934
93.	Kabupaten Sumedang	Kecamatan Pamulihan	0,163101604
94.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Sodong Hilir	0,530939649
95.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Taraju	0,476890756
96.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Karangnunggal	0,356951872
97.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Ciawi	0,347784568
98.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Cipatujah	0,332887701
99.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Sukaratu	0,332887701
100.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Cikatomas	0,331168831
101.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Jamanis	0,325439267
102.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Mangunreja	0,325057296
103.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Sukarame	0,310542399
104.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Sukaresik	0,306340718
105.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Karangjaya	0,304621849

No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks
106.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Singaparna	0,302711994
107.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Cisayong	0,302521008
108.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Bojongasih	0,296218487
109.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Padakembang	0,279984721
110.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Salopa	0,275019099
111.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Gunungtanjung	0,271772345
112.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Parungponteng	0,26776165
113.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Sariwangi	0,263368984
114.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Sukaraja	0,262796028
115.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Rajapolah	0,259931245
116.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Bojonggambir	0,245225363
117.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Cineam	0,239113827
118.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Puspahiang	0,237203972
119.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Cibalong	0,234912147
120.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Tanjung jaya	0,231856379
121.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Salawu	0,231665393
122.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Pancatengah	0,231474408
123.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Bantarkalong	0,227081742
124.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Manonjaya	0,222689076
125.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Cikalong	0,219251337
126.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Leuwisari	0,216386555
127.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Pagerageung	0,209702063
128.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Mangunreja	0,19499618
129.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Kadipaten	0,18315508
130.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Sukahening	0,167685256
131.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Culamega	0,162146677
132.	Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Jatiwaras	0,110198625
133.	Kota Bandung	Kec. Cidadap	0,496944232
134.	Kota Bandung	Kec. Ujungberung	0,464858671
135.	Kota Bandung	Kec. Andir	0,433537051
136.	Kota Bandung	Kec. Cicendo	0,424178762
137.	Kota Bandung	Kec. Arcamanik	0,389228419



No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks
138.	Kota Bandung	Kec. Rancasari	0,366692131
139.	Kota Bandung	Kec. Bandung Kidul	0,361153552
140.	Kota Bandung	Kec. Coblong	0,317608862
141.	Kota Bandung	Kec. Babakan Ciparay	0,271772345
142.	Kota Bandung	Kec. Bojongloa Kidul	0,271772345
143.	Kota Bandung	Kec. Bojongloa Kaler	0,227654698
144.	Kota Bandung	Kec. Cibeunying Kaler	0,225553858
145.	Kota Bandung	Kec. Batununggal	0,224025974
146.	Kota Bandung	Kec. Regol	0,203399542
147.	Kota Bandung	Kec. Sukasari	0,196524064
148.	Kota Bandung	Kec. Bandung Kulon	0,075821238
149.	Kota Banjar	Kec. Purwaharja	0,354278075
150.	Kota Banjar	Kec. Banjar	0,343773873
151.	Kota Banjar	Kec. Pataruman	0,321237586
152.	Kota Banjar	Kec. Langensari	0,205500382
153.	Kota Cimahi	Kec. Cimahi Tengah	0,451871658
154.	Kota Cimahi	Kec. Cimahi Selatan	0,360962567
155.	Kota Cimahi	Kec. Cimahi Utara	0,188502674
156.	Kota Tasikmalaya	Kec. Cihideung	0,569518717
157.	Kota Tasikmalaya	Kec. Cipedes	0,231856379
158.	Kota Tasikmalaya	Kec. Indihiang	0,182200153
159.	Kota Tasikmalaya	Kec. Kawalu	0,171886937
160.	Kota Tasikmalaya	Kec. Tawang	0,165011459
161.	Kota Tasikmalaya	Kec. Cibeureum	0,127578304
162.	Kota Tasikmalaya	Kec. Tamansari	0,125095493
163.	Kota Tasikmalaya	Kec. Mangkubumi	0

No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks	Ranking
1	Kabupaten Bogor	Kec. Babakan Madang	48	24
2	Kabupaten Bogor	Kec. Rumpin	18	43
3	Kabupaten Bogor	Kec. Sukamakmur	39	33
4	Kabupaten Bogor	Kec. Dramaga	62	11
5	Kabupaten Bogor	Kec. Rancabungur	48	24
6	Kabupaten Bogor	Kec. Nanggung	58	15
7	Kabupaten Bogor	Kec. Cigudeg	42	30
8	Kabupaten Bogor	Kec. Ciawi	52	20
9	Kabupaten Bogor	Kec. Jonggol	55	18
10	Kabupaten Bogor	Kec. Ciseeng	56	17
11	Kabupaten Bogor	Kec. Citeureup	66	9
12	Kabupaten Bogor	Kec. Tanjuralang	44	28
13	Kabupaten Bogor	Kec. Leuwiliang	51	21
14	Kabupaten Bogor	Kec. Tanjungsari	46	26
15	Kabupaten Bogor	Kec. Cijeruk	37	35
16	Kabupaten Bogor	Kec. Megamendung	86	2
17	Kabupaten Bogor	Kec. Caringin	43	29
18	Kabupaten Bogor	Kec. Tenjo	52	20
19	Kabupaten Bogor	Kec. Jasinga	46	26
20	Kabupaten Bogor	Kec. Tamansari	50	22
21	Kabupaten Bogor	Kec. Cibungbulang	70	8
22	Kabupaten Bogor	Kec. Cibinong	74	5
23	Kabupaten Bogor	Kec. Cogombong	45	27
24	Kabupaten Bogor	Kec. Kalapanunggal	52	20
25	Kabupaten Bogor	Kec. Leuwisadeng	47	25
26	Kabupaten Bogor	Kec. Bojonggede	51	21
27	Kabupaten Bogor	Kec. Kemang	55	18
28	Kabupaten Bogor	Kec. Sukaraja	59	14
29	Kabupaten Bogor	Kec. Gunungsindur	20	42



No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks	Ranking
30	Kota Bogor	Bogor Selatan	73	6
31	Kota Bogor	Tanah sereal	72	7
32	Kota Bogor	Bogor utara	7	45
33	Kota Bogor	Bogor timur	45	27
34	Kota Bogor	Bogor Barat	37	35
35	Kota Bogor	Bogor Tengah	62	11
36	Kota Sukabumi	Kec. Gunung Puyuh	59	14
<b>37</b>	<b>Kota Sukabumi</b>	<b>Kec. Cikole</b>	<b>100</b>	<b>1</b>
38	Kota Sukabumi	Kec. Citamiang	45	27
39	Kota Sukabumi	Kec. Warudoyong	47	25
40	Kota Sukabumi	Kec. Baros	45	27
41	Kota Sukabumi	Kec. Lembursitu	50	22
42	Kota Sukabumi	Kec. Cibeureum	48	24
43	Kab. Sukabumi	Kec. Tegalbuleud	62	11
44	Kab. Sukabumi	Kec. Simpenan	53	19
45	Kab. Sukabumi	Kec. Cikakak	51	21
46	Kab. Sukabumi	Kec. Curugkembar	41	31
47	Kab. Sukabumi	Kec. Cidahu	49	23
48	Kab. Sukabumi	Kec. Cikidang	51	21
49	Kab. Sukabumi	Kec. Pabuaran	48	24
50	Kab. Sukabumi	Kec. Kadudampit	84	3
51	Kab. Sukabumi	Kec. Gegerbitung	41	31
52	Kab. Sukabumi	Kec. Kalapanunggal	61	12
53	Kab. Sukabumi	Kec. Parungkuda	38	34
54	Kab. Sukabumi	Kec. Cisolok	61	12
55	Kab. Sukabumi	Kec. Cireunghas	36	36
56	Kab. Sukabumi	Kec. Parakansalak	48	24
57	Kab. Sukabumi	Kec. Ciemas	37	35
58	Kab. Sukabumi	Kec. Sukalarang	52	20
59	Kab. Sukabumi	Kec. Bojonggenteng	24	41
60	Kab. Sukabumi	Kec. Sukabumi	61	12

No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks	Ranking
61	Kab. Sukabumi	Kec. Lengkong	47	25
62	Kab. Sukabumi	Kec. Jampangkulon	41	31
63	Kab. Sukabumi	Kec. Jampangtengah	35	37
64	Kab. Sukabumi	Kec. Nyalindung	48	24
65	Kab. Sukabumi	Kec. Palabuhanratu	57	16
66	Kab. Sukabumi	Kec. Cicantayan	28	40
67	Kab. Sukabumi	Kec. Kebonpedes	49	23
68	Kab. Sukabumi	Kec. Cibadak	60	13
69	Kab. Sukabumi	Kec. Cikembar	49	23
70	Kab. Sukabumi	Kec. Nagrak	41	31
71	Kab. Sukabumi	Kec. Cisaat	48	24
72	Kab. Sukabumi	Kec. Cibitung	37	35
73	Kab. Sukabumi	Kec. Sukaraja	52	20
74	Kab. Sukabumi	Kec. Kabandungan	55	18
75	Kab. Sukabumi	Kec. Gunungguruh	31	38
76	Kab. Sukabumi	Kec. Waluran	46	26
77	Kab. Sukabumi	Kec. Purabaya	42	30
78	Kab. Sukabumi	Kec. Surade	53	19
79	Kab. Sukabumi	Kec. Caringin	49	23
80	Kab. Sukabumi	Kec. Warungkiara	41	31
81	Kab. Sukabumi	Kec. Cidadap	58	15
82	Kab. Sukabumi	Kec. Bantargadung	28	40
83	Kab. Sukabumi	Kec. Cicurug	55	18
84	Kab. Sukabumi	Kec. Ciracap	42	30
85	Kab. Sukabumi	Kec. Cidolog	60	13
86	Kab. Sukabumi	Kec. Sagaranten	70	8
87	Kab. Sukabumi	Kec. Kalibunder	40	32
88	Kota Depok	Kecamatan Beji	42	30
89	Kota Depok	Kecamatan Sawargan	55	18
90	Kota Depok	Kecamatan Cimanggis	36	36
91	Kota Depok	Kecamatan Limo	64	10



No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks	Ranking
92	Kota Depok	Kecamatan Pancoran mas	15	44
93	Kota Depok	Kecamatan Sukmajaya	57	16
94	Kabupaten Cianjur	Kecamatan Cipanas	35	37
95	Kabupaten Cianjur	Kecamatan Cilaku	38	34
96	Kabupaten Cianjur	Kecamatan Cibinong	37	35
97	Kabupaten Cianjur	Kecamatan Warung Kondang	36	36
98	Kabupaten Cianjur	Kecamatan Pacet	76	4
99	Kabupaten Cianjur	Kecamatan Cugenang	30	39
100	Kabupaten Cianjur	Kecamatan Cidaun	0	46

## 2. Wilayah Cirebon

No.	Kabupaten/Kota	Nama Kecamatan	Indeks	Ranking
1	Kota Cirebon	Kec. Lemahwungkuk	31	22
2	Kota Cirebon	Kec. Pekalipan	55	6
3	Kota Cirebon	Kec. Harjamukti	28	25
4	Kota Cirebon	Kec. Kesambi	28	25
5	Kab. Cirebon	Kec Weru	9	38
6	Kab. Cirebon	Kec.Klangenan	37	17
7	Kab. Cirebon	Kec.Cirebon Utara	16	34
8	Kab. Cirebon	Kec.Pabuaran	58	4
9	Kab. Cirebon	Kec.Beber	22	30
10	Kab. Cirebon	Kec.Pabedilan	21	31
11	Kab. Cirebon	Kec.Karangwareng	31	22
12	Kab. Cirebon	Kec.Ciwaringin	47	9
13	Kab. Cirebon	Kec.Panguragan	16	34
14	Kab. Cirebon	Kec.Gebang	18	33
<b>15</b>	<b>Kab. Cirebon</b>	<b>Kec.Susukan</b>	<b>100</b>	<b>1</b>
16	Kab. Cirebon	Kec. Waled	35	18
17	Kab. Cirebon	Karangsembung	35	18
18	Kab. Cirebon	Babakan	46	10
19	Kab. Cirebon	Kapetakan	7	39

No.	Kabupaten/Kota	Nama Kecamatan	Indeks	Ranking
20	Kab. Cirebon	Palimanan	21	31
21	Kab. Cirebon	Kedawung	20	32
22	Kab. Cirebon	Losari	31	22
23	Kab. Cirebon	Astanajapura	16	34
24	Kab. Cirebon	Ciledug	26	26
25	Kab. Cirebon	Kaliwedi	9	38
26	Kab. Cirebon	Pangenan	38	16
27	Kab. Cirebon	Dukupuntang	16	34
28	Kab. Cirebon	Susukanlebak	0	42
29	Kab. Kuningan	Kecamatan Kuningan	35	18
30	Kab. Kuningan	Kecamatan Kadugede	33	20
31	Kab. Kuningan	Kecamatan Karangancana	35	18
32	Kab. Kuningan	Kecamatan Luragung	34	19
33	Kab. Kuningan	Kecamatan Subang	60	2
34	Kab. Kuningan	Kecamatan Cilimus	26	26
35	Kab. Kuningan	Kecamatan Cimahi	20	32
36	Kab. Kuningan	Kecamatan Mandirancan	43	11
37	Kab. Kuningan	Kecamatan Pancalang	13	36
38	Kab. Kuningan	Kecamatan Cigugur	42	12
39	Kab. Kuningan	Kecamatan Selajambe	35	18
40	Kab. Kuningan	Kecamatan Darma	48	8
41	Kab. Kuningan	Kecamatan Cibingbin	48	8
42	Kab. Kuningan	Kecamatan Cidahu	6	40
43	Kab. Kuningan	Kecamatan NUSAHERANG	47	9
44	Kab. Kuningan	Kecamatan Cibeureum	13	36
45	Kab. Kuningan	Kecamatan Ciawigebang	13	36
46	Kab. Kuningan	Kecamatan Cipicung	5	41
47	Kab. Kuningan	Kecamatan Ciwaru	39	15
48	Kab. Kuningan	Kecamatan Maleber	9	38
49	Kab. Kuningan	Kecamatan Ciniru	46	10
50	Kab. Kuningan	Kecamatan Kalimanggis	5	41



No.	Kabupaten/Kota	Nama Kecamatan	Indeks	Ranking
51	Kab. Kuningan	Kecamatan Cilebak	13	36
52	Kab. Kuningan	Kecamatan Jalaksana	59	3
53	Kab. Kuningan	Kecamatan Garawangi	41	13
54	Kab. Kuningan	Kecamatan Lebak Wangi	30	23
55	Kab. Kuningan	Kecamatan Japara	47	9
56	Kab. Kuningan	Kecamatan Hantara	26	26
57	Kab. Kuningan	Kecamatan Cigandamekar	32	21
58	Kab. Kuningan	Kecamatan Sindang Agung	40	14
59	Kab. Kuningan	Kecamatan Pasawahan	33	20
60	Kab. Kuningan	Kecamatan Kramatmulya	28	25
61	Kab. Majalengka	Kec. Dawuan	16	34
62	Kab. Majalengka	Kec. Palasah	12	37
63	Kab. Majalengka	Kec. Bantarujeg	12	37
64	Kab. Majalengka	Kec. Sindangwangi	29	24
65	Kab. Majalengka	Kec. Kadipaten	29	24
66	Kab. Majalengka	Kec. Leuwimunding	33	20
67	Kab. Majalengka	Kec. Majalengka	40	14
68	Kab. Majalengka	Kec. Cigasong	30	23
69	Kab. Majalengka	Kec. Lemahsugih	23	29
70	Kab. Majalengka	Kec. Banjaran	57	5
71	Kab. Majalengka	Kec. Cingambul	24	28
72	Kab. Majalengka	Kec. Sukahaji	42	12
73	Kab. Majalengka	Kec. Kertajati	20	32
74	Kab. Majalengka	Kec. Rajagaluh	35	18
75	Kab. Majalengka	Kec. Jatitujuh	29	24
76	Kab. Majalengka	Kec. Maja	52	7
77	Kab. Majalengka	Kec. Argapura	7	39
78	Kab. Majalengka	Kec. Talaga	23	29
79	Kab. Indramayu	Sukagumiwang	25	27
80	Kab. Indramayu	Kandanghaur	20	32
81	Kab. Indramayu	Karangampel	28	25

No.	Kabupaten/Kota	Nama Kecamatan	Indeks	Ranking
82	Kab. Indramayu	Bongas	15	35
83	Kab. Indramayu	Haurgeulis	46	10
84	Kab. Indramayu	Sukra	41	13
85	Kab. Indramayu	Widasari	18	33
86	Kab. Indramayu	Bangodua	39	15
87	Kab. Indramayu	Anjatan	43	11
88	Kab. Indramayu	Krangkeng	5	41

### 3. Wilayah Purwakarta

No.	Kab/Kota	Kecamatan	Indeks	Ranking
1	Kab. Karawang	Kecamatan Cibuaya	31	30
2	Kab. Karawang	Kecamatan Kutawaluya	30	31
3	Kab. Karawang	Kecamatan Batujaya	50	17
4	Kab. Karawang	Kecamatan Ciampel	57	13
5	Kab. Karawang	Kecamatan Rengasdengklok	2	43
6	Kab. Karawang	Kecamatan Pangkalan	34	27
7	Kab. Karawang	Kecamatan Telukjambe Timur	68	6
8	Kab. Karawang	Kecamatan Cilamaya Kulon	29	32
9	Kab. Karawang	Kecamatan Banyusari	41	23
10	Kab. Karawang	Kecamatan Telagasari	59	11
11	Kab. Karawang	Kecamatan Tempuran	57	13
12	Kab. Karawang	Kecamatan Cilamaya Wetan	48	18
13	Kab. Karawang	Kecamatan Jatisari	30	31
14	Kab. Karawang	Kecamatan Pakisjaya	9	41
15	Kab. Karawang	Kecamatan Cikampek	47	19
16	Kab. Karawang	Kecamatan Telukjambe Barat	24	35
17	Kab. Karawang	Kecamatan Majalaya	16	39
18	Kab. Karawang	Kecamatan Cilebar	5	42
19	Kab. Karawang	Kecamatan Purwasari	39	25
20	Kab. Karawang	Kecamatan Kotabaru	43	22
21	Kab. Karawang	Kecamatan Karawang Timur	43	22



No.	Kab/Kota	Kecamatan	Indeks	Ranking
22	Kab. Karawang	Kecamatan Karawang Barat	33	28
23	Kab. Karawang	Kecamatan Tirtamulya	51	16
24	Kab. Karawang	Kecamatan Rawameta	54	14
25	Kab. Karawang	Kecamatan Lemahabang	27	33
26	Kab. Karawang	Kecamatan Jayakarta	60	10
27	Kab. Karawang	Kecamatan Tegalwaru	25	34
28	Kab. Karawang	Kecamatan Pedes	38	26
29	Kab. Purwakarta	Kec. Purwakarta	73	4
30	Kab. Purwakarta	Kec. Cibat	30	31
<b>31</b>	<b>Kab. Purwakarta</b>	<b>Kec. Bungursari</b>	<b>100</b>	<b>1</b>
32	Kab. Purwakarta	Kec. Sukasari	43	22
33	Kab. Purwakarta	Kec. Pondoksalam	48	18
34	Kab. Purwakarta	Kec. Bojong	40	24
35	Kab. Purwakarta	Kec. Kiarapedes	23	36
36	Kab. Purwakarta	Kec. Pasawahan	60	10
37	Kab. Purwakarta	Kec. Tegalwaru	23	36
38	Kab. Purwakarta	Kec. Campaka	74	3
39	Kab. Purwakarta	Kec. Babakancikao	41	23
40	Kab. Purwakarta	Kec. Wanayasa	15	40
41	Kab. Purwakarta	Kec. Darangdan	47	20
42	Kab. Purwakarta	Kec. Sukatani	33	28
43	Kab. Purwakarta	Kec. Plered	63	7
44	Kab. Purwakarta	Kec. Maniis	20	38
45	Kab. Purwakarta	Kec. Jatiluhur	58	12
46	Kab. Subang	Kec. Legankolon	22	37
47	Kab. Subang	Kec. Pagaden	30	31
48	Kab. Subang	Kec. Tanjungsiang	53	15
49	Kab. Subang	Kec. Ciasem	61	9
50	Kab. Subang	Kec. Pamanukan	51	16
51	Kab. Subang	Kec. Comprang	73	4
52	Kab. Subang	kec. Patokbeusi	31	30

No.	Kab/Kota	Kecamatan	Indeks	Ranking
53	Kab. Subang	Kec. Cisalak	79	2
54	Kab. Subang	Kec. Sagalaherang	62	8
55	Kab. Subang	Kec. Pabuaran	0	44
56	Kab. Subang	Kec. Binong	32	29
57	Kab. Subang	Kec. Cipeundeuy	29	32
58	Kab. Subang	Kec. Pusakanagara	68	6
59	Kab. Subang	Kec. Cibogo	48	18
60	Kab. Subang	Kec. Purwadadi	40	24
61	Kab. Subang	Kec. Cipunagara	46	21
62	Kab. Subang	Kec. Cijambe	41	23
63	Kab. Subang	Kec. Cikaum	16	39
64	Kab. Subang	Kec. Kalijati	72	5
65	Kab. Subang	Kec. Blanakan	48	18

#### 4. Wilayah Priangan

No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks	Ranking
1	Kota Banjar	Kec. Purwaharja	35	24
2	Kota Banjar	Kec. Pataruman	28	31
3	Kota Banjar	Kec. Banjar	18	41
4	Kota Banjar	Kec. Langensari	6	51
5	Kota Tasikmalaya	Kec. Cipedes	23	36
6	Kota Tasikmalaya	Kec. Cihideung	28	31
7	Kota Tasikmalaya	Kec. Indihiang	34	25
8	Kota Tasikmalaya	Kec. Tawang	57	10
9	Kota Tasikmalaya	Kec. Tamansari	25	34
10	Kota Tasikmalaya	Kec. Cibeureum	15	44
11	Kota Tasikmalaya	Kec. Kawalu	29	30
12	Kota Tasikmalaya	Kec. Mangkubumi	27	32
13	Kota Bandung	Kec. Cidadap	64	6
14	Kota Bandung	Kec. Coblong	48	14
15	Kota Bandung	Kec. Bojongloa Kaler	30	29
16	Kota Bandung	Kec. Andir	29	30



No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks	Ranking
17	Kota Bandung	Kec. Cicendo	63	7
18	Kota Bandung	Kec. Babakan Ciparay	13	46
19	Kota Bandung	Kec. Cibeunying Kaler	48	14
20	Kota Bandung	Kec. Sukasari	85	2
21	Kota Bandung	Kec. Bojongloa Kidul	24	35
22	Kota Bandung	Kec. Bandung Kulon	16	43
23	Kota Bandung	Kec. Batununggal	23	36
24	Kota Bandung	Kec. Regol	57	10
25	Kota Bandung	Kec. Ujungberung	20	39
26	Kota Bandung	Kec. Arcamanik	12	47
27	Kota Bandung	Kec. Rancasari	33	26
28	Kota Bandung	Kec. Bandung Kidul	9	49
29	Kota Cimahi	Kec. Cimahi Tengah	56	11
30	Kota Cimahi	Kec. Cimahi Selatan	17	42
31	Kota Cimahi	Kec. Cimahi Utara	31	28
32	Kabupaten Bandung	Kec. Cileunyi	16	43
33	Kabupaten Bandung	Kec. Cimenyan	20	39
34	Kabupaten Bandung	Kec. Cilengkrang	24	35
<b>35</b>	<b>Kabupaten Bandung</b>	<b>Kec. Margahayu</b>	<b>100</b>	<b>1</b>
36	Kabupaten Bandung	Kec. Margaasih	24	35
37	Kabupaten Bandung	Kec. Cipatat	20	39
38	Kabupaten Bandung	Kec. Parongpong	38	21
39	Kabupaten Bandung	Kec. Ngamprah	17	42
40	Kabupaten Bandung	Kec. Ciparay	7	50
41	Kabupaten Bandung	Kec. Cipeundeuy	23	36
42	Kabupaten Bandung	Kec. Pacet	22	37
43	Kabupaten Bandung	Kec. Kertasari	12	47
44	Kabupaten Bandung	Kec. Baleendah	13	46
45	Kabupaten Bandung	Kec. Majalaya	37	22
46	Kabupaten Bandung	Kec. Solokanjeruk	16	43
47	Kabupaten Bandung	Kec. Rongga	11	48
48	Kabupaten Bandung	Kec. Pangalengan	19	40

No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks	Ranking
49	Kabupaten Bandung	Kec. Banjaran	6	51
50	Kabupaten Bandung	Kec. Nagreg	33	26
51	Kabupaten Bandung	Kec. Cihampelas	33	26
52	Kabupaten Bandung	Kec. Pameungpeuk	34	25
53	Kabupaten Bandung	Kec. Arjasari	29	30
54	Kabupaten Bandung	Kec. Cikancung	19	40
55	Kabupaten Bandung	Kec. Rancaekek	24	35
56	Kabupaten Bandung	Kec. Pasirjambu	36	23
57	Kabupaten Bandung	Kec. Soreang	0	53
58	Kabupaten Bandung	Kec. Paseh	27	32
59	Kabupaten Bandung	Kec. Ciwidey	21	38
60	Kabupaten Bandung	Kec. Rancabali	47	15
61	Kabupaten Bandung	Kec. Lembang	20	39
62	Kabupaten Bandung	Kec. Cisarua	26	33
63	Kabupaten Bandung	Kec. Cangkuang	26	33
64	Kabupaten Bandung	Kec. Cimaung	18	41
65	Kabupaten Bandung	Kec. Cipongkor	66	5
66	Kabupaten Bandung	Kec. Katapang	14	45
67	Kabupaten Bandung	Kec. Padalarang	21	38
68	Kabupaten Bandung	Kec. Batujajar	19	40
69	Kabupaten Bandung	Kec. Cililin	35	24
70	Kabupaten Bandung	Kec. Dayeuh Kolot	33	26
71	Kabupaten Bandung	Kec. Sindangkerta	20	39
72	Kab. Tasikmalaya	Kec. Singaparna	27	32
73	Kab. Tasikmalaya	Kec. Cipatujah	31	28
74	Kab. Tasikmalaya	Kec. Cikalong	21	38
75	Kab. Tasikmalaya	Kec. Manonjaya	17	42
76	Kab. Tasikmalaya	Kec. Pancatengah	25	34
77	Kab. Tasikmalaya	Kec. Salopa	22	37
78	Kab. Tasikmalaya	Kec. Karangnunggal	28	31
79	Kab. Tasikmalaya	Kec. Cikatomas	32	27
80	Kab. Tasikmalaya	Kec. Salawu	30	29



No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks	Ranking
81	Kab. Tasikmalaya	Kec. Rajapolah	17	42
82	Kab. Tasikmalaya	Kec. Ciawi	62	8
83	Kab. Tasikmalaya	Kec. Taraju	21	38
84	Kab. Tasikmalaya	Kec. Parungponteng	30	29
85	Kab. Tasikmalaya	Kec. Bojonggambir	45	17
86	Kab. Tasikmalaya	Kec. Cibalong	24	35
87	Kab. Tasikmalaya	Kec. Sukaraja	31	28
88	Kab. Tasikmalaya	Kec. Sodong Hilir	15	44
89	Kab. Tasikmalaya	Kec. Pagerageung	26	33
90	Kab. Tasikmalaya	Kec. Gunungtanjung	14	45
91	Kab. Tasikmalaya	Kec. Tanjung jaya	24	35
92	Kab. Tasikmalaya	Kec. Mangunreja	14	45
93	Kab. Tasikmalaya	Kec. Mangunreja	38	21
94	Kab. Tasikmalaya	Kec. Sukaratu	58	9
95	Kab. Tasikmalaya	Kec. Culamega	46	16
96	Kab. Tasikmalaya	Kec. Kadipaten	29	30
97	Kab. Tasikmalaya	Kec. Bojongasih	19	40
98	Kab. Tasikmalaya	Kec. Leuwisari	27	32
99	Kab. Tasikmalaya	Kec. Puspahiang	16	43
100	Kab. Tasikmalaya	Kec. Sukarame	29	30
101	Kab. Tasikmalaya	Kec. Jamanis	29	30
102	Kab. Tasikmalaya	Kec. Sukaresik	38	21
103	Kab. Tasikmalaya	Kec. Sariwangi	20	39
104	Kab. Tasikmalaya	Kec. Jatiwaras	16	43
105	Kab. Tasikmalaya	Kec. Padakembang	15	44
106	Kab. Tasikmalaya	Kec. Sukahening	17	42
107	Kab. Tasikmalaya	Kec. Cincam	51	13
108	Kab. Tasikmalaya	Kec. Bantarkalong	25	34
109	Kab. Tasikmalaya	Kec. Karangjaya	39	20
110	Kab. Tasikmalaya	Kec. Cisayong	21	38
111	Kabupaten Garut	Kec. Cisewu	30	29
112	Kabupaten Garut	Kec. Garut Kota	58	9

No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks	Ranking
113	Kabupaten Garut	Kec. Cikajang	26	33
114	Kabupaten Garut	Kec. Cisurupan	25	34
115	Kabupaten Garut	Kec. Cilawu	14	45
116	Kabupaten Garut	Kec. Sukawening	58	9
117	Kabupaten Garut	Kec. Peundeuy	76	4
118	Kabupaten Garut	Kec. Bayongbong	29	30
119	Kabupaten Garut	Kec. Pamulihan	36	23
120	Kabupaten Garut	Kec. Singajaya	16	43
121	Kabupaten Garut	Kec. Banjarwangi	21	38
122	Kabupaten Garut	Kec. Malangbong	24	35
123	Kabupaten Garut	Kec Weru	9	49
124	Kabupaten Garut	Kec.Ciwaringin	15	44
125	Kabupaten Garut	Kec.Cirebon Utara	3	52
126	Kabupaten Garut	Kec.Pabuaran	54	11
127	Kabupaten Garut	Kec.Beber	12	47
128	Kabupaten Garut	Kec.Pabedilan	14	45
129	Kabupaten Garut	Kec.Kadungora	14	45
130	Kabupaten Garut	Kec.Leuwigoong	11	48
131	Kabupaten Garut	Kec.Cibatu	16	43
132	Kabupaten Garut	Kec.Samarang	20	39
133	Kabupaten Garut	Kec.Leles	21	38
134	Kabupaten Garut	KecTarogong Kaler	22	37
135	Kabupaten Garut	Kec Banyuresmi	17	42
136	Kabupaten Garut	Kec Wanaraja	22	37
137	Kabupaten Garut	Kec Karangpawitan	20	39
138	Kabupaten Garut	Kecamatan Talegong	19	40
139	Kabupaten Garut	Kecamatan Mckarmukti	52	12
140	Kabupaten Garut	Kecamatan Cigeduk	42	18
141	Kabupaten Garut	Kecamatan Caringin	25	34
142	Kabupaten Garut	Kecamatan Karangtengah	42	18
143	Kabupaten Garut	Kecamatan Kersamanah	24	35
144	Kabupaten Garut	Kecamatan Sukaresmi	57	10



No.	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Indeks	Ranking
145	Kabupaten Garut	Kecamatan Tarogong	30	29
146	Kabupaten Garut	Kecamatan Pangatikan	30	29
147	Kabupaten Garut	Kecamatan Sucinaraja	30	29
148	Kabupaten Garut	Kecamatan Cihurip	37	22
149	Kabupaten Garut	Kecamatan Pasir Wangi	13	46
150	Kabupaten Garut	Kecamatan Cibiuk	29	30
151	Kabupaten Garut	Kecamatan Selawi	12	47
152	Kabupaten Garut	Kecamatan Limbangan	28	31
153	Kab. Sumedang	Kecamatan Tanjung Medar	41	19
154	Kab. Sumedang	Kecamatan Pamulihan	34	25
155	Kab. Sumedang	Kecamatan Cisarua	29	30
156	Kab. Sumedang	Kec. Surian	82	3
157	Kab. Sumedang	Kecamatan Tanjung Sari	45	17
158	Kab. Sumedang	Kecamatan Ujung Jaya	26	33
159	Kab. Sumedang	Kecamatan Buahdua	17	42
160	Kab. Sumedang	Kecamatan Cimalaka	21	38
161	Kab. Sumedang	Kecamatan Jatinangor	21	38
162	Kab. Sumedang	Kecamatan Jatigede	41	19
163	Kab. Sumedang	Kecamatan ???????	33	26

## BAB VI

### P E N U T U P

Sebagai kata akhir dari evaluasi ini, perlu ditegaskan kembali bahwa kinerja suatu kecamatan tidak dibandingkan dengan standar yang telah baku. Sebagai pembanding dalam hal ini adalah kinerja kecamatan tertinggi dan terendah. Dengan demikian, jika suatu kecamatan mendapatkan indeks kinerja baik parsial (per aspek) ataupun total (keseluruhan) sebesar 0 tidak berarti bahwa kinerja kecamatan tersebut adalah nol, melainkan terendah dibandingkan dengan kecamatan lainnya dalam wilayahnya (Bakorwil). Demikian juga, jika suatu kecamatan mendapatkan nilai indeks 100, bukan berarti kinerja kecamatan tersebut telah optimal, melainkan kinerja tertinggi diantara kecamatan lainnya di wilayahnya (Bakorwil).

Nilai indeks suatu kecamatan yang diperoleh sangat tergantung kepada keakuratan dan kelengkapan data yang diberikan dalam instrumen yang telah disebarkan sebelumnya. Jika data tersebut tidak akurat dan tidak lengkap, maka nilai indeksnya pun tidak akan tepat menggambarkan kondisi riil kecamatan yang bersangkutan.

Seandainya, data-dan informasi yang disampaikan benar, maka hasil evaluasi ini telah mengelompokkan seluruh kecamatan yang ada ke dalam empat kategori dilihat dari kinerja totalnya, yaitu:

- *Kategori pertama*, Kecamatan yang mempunyai indeks kinerja total antara 76-100 dinamakan *kecamatan dengan kinerja baik*;
- *Kategori kedua*, Kecamatan yang mempunyai indeks kinerja total antara 51-75 dinamakan *kecamatan dengan kinerja menuju baik*;
- *Kategori ketiga*, Kecamatan yang mempunyai indeks kinerja total antara 26-50 dinamakan *kecamatan dengan kinerja sedang*;



- *Kategori keempat*, Kecamatan yang mempunyai indeks kinerja total antara 0-25 dinamakan *kecamatan dengan kinerja menuju sedang*;

Selain itu, kategorisasi juga dilakukan dengan melihat keunggulan setiap kecamatan pada masing-masing aspek. Perbandingan bukan dilakukan antar kecamatan, melainkan antar aspek dalam satu kecamatan, sehingga setiap kecamatan akan memperoleh satu predikat. Atas dasar hal tersebut maka kecamatan-kecamatan yang ada dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori sebagai berikut:

- *Kategori pertama*, Kecamatan yang unggul dalam aspek administratif (inputs), dinamakan "*Kecamatan Potensial*";
- *Kategori kedua*, Kecamatan yang unggul dalam aspek pelayanan (output), dinamakan "*Kecamatan Pengabdian*";
- *Kategori ketiga*, Kecamatan yang unggul dalam kinerja indikator makro pembangunan, dinamakan "*Kecamatan Menuju Kesejahteraan*".

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap seluruh kecamatan yang ada di Jawa Barat, maka diperoleh hasil sebagaimana tercantum pada Bab V. Diantara seluruh kecamatan yang ada, terdapat beberapa kecamatan yang unggul dalam aspek-aspek tertentu sebagai berikut:

**Tabel 6.1**

**Kecamatan Yang Unggul Pada Setiap Wilayah**

<b>Wilayah</b>	<b>Aspek Administratif (IKA)</b>	<b>Aspek Pelayanan (IKP)</b>	<b>Indikator Makro Pembangunan (IKMP)</b>	<b>Kinerja Kecamatan (IKK)</b>
<b>Bogor</b>	Kecamatan Cikole Kabupaten Sukabumi	Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi	Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor	Kecamatan Cikole Kabupaten Sukabumi
<b>Cirebon</b>	Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka	Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon	Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka	Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon
<b>Purwakarta</b>	Kecamatan Campakan Kabupaten Purwakarta	Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta	Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang	Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta
<b>Priangan</b>	Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung	Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung	Kecamatan Buahdua Kabupetan Sumedang	Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung



## DAFTAR PUSTAKA

- BPS, BAPPENAS, dan UNDP (2001), Indonesia: Laporan Pembangunan Manusia 2001: *Menuju Konsensus Baru Demokrasi dan Pembangunan Manusia Indonesia*.
- DeVrye, Catherine (1994), *Good Service is Good Business, 7 simple Strategies for Success*, Australia, Prentice Hall.
- Flynn, Norman, *Public Sector Management*, (1990), London : Harvester Wheatsheaf
- Harmon, Michael M., and Richard T. Mayer, (1986), *Organization Theory for Public Administration*, Canada : Little, Brown & Company
- Haynes Robert J. (1980), *Organisation Theory and Local government*, George Allen & Unwin Ltd, london.
- Hudson, Catheryn Seckler, (1955), *Organization and Management : Theory and Practice*, Washington DC : The American University Press
- Kartiwa Asep, (2002), *Birokrasi dan Konsep Pelayanan Publik Dalam Otonomi Daerah*, Makalah, FISIP UNPAD
- Lembaga Administrasi Negara (2000), *Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah (Modul 3 dari 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)*.
- Lembaga Administrasi Negara (2003), *Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah*, LAN, Jakarta
- Lovelock, ChristopherH. 1992. *Managing Service*, Englewood Cliff, New Jersey: Prentice Hall.

- Nugraha (2004), Makalah Berjudul "*Standarisasi Dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik*", UNPAD.
- Sobandi, Baban (2004), *Etika Kebijakan Publik: Moralitas Profetis dan Profesionalisme Birokrasi*, Humaniora Utama Press.
- Sobandi, Baban, *Model Pengukuran Beban Kerja Organisasi* (dalam Modul Diklat Penataan Kelembagaan), Lembaga Administrasi Negara, PKP2A I LAN Bandung, 2004.
- Sobandi, Baban (2004), *Pengukuran Kinerja Organisasi* (dalam Modul Diklat Teknik Analisis Manajemen), Lembaga Administrasi Negara, PKP2A I LAN Bandung.
- Sobandi, Baban (2005), *Mengkaji Ulang Mekanisme Penyusunan Renstra Dan Lakip Di Daerah: Studi Terhadap Persepsi Pejabat Struktural Mengenai Inpres 7 Tahun 1999 Dan Keputusan Kepala Lan Nomor 239 Tahun 2003*, Jurnal Ilmu Administrasi (JIA), STIA-LAN Bandung.
- Wasistiono Sadu dkk (2002), *Menata Ulang Kelembagaan Pemerintah Kecamatan*, Pusat Kajian Pemerintahan STPDN), Citra Pindo, Bandung,
- Zeithaml, Valarie, A. Parasuraman and Leonard L. Berry. (1990), *Delivering Quality Service*. New York: The Free Press.



